



PT PP ENERGI

Plaza PP 7th Floor
Jln. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo - Jakarta 13760
Telepon : (021) 840 3933
Fax : (021) 840 8234
Email : corsec.office@pp-energi.com

**PT PP ENERGI
DAN ENTITAS ANAK/
AND ITS SUBSIDIARIES**

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DAN INFORMASI TAMBAHAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND SUPPLEMENTARY INFORMATION**

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020/
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

**No. 00027/2.1000/AU.1/02/0912-1/1/III/2022
Tanggal 18 Februari 2022/ Dated February 18, 2022**

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		<i>DIRECTORS' STATEMENT LETTER</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1	<i>INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT</i>
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020		<i>CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS - For the years ended December 31, 2021 and 2020</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	7	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	8	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9	<i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>
 INFORMASI TAMBAHAN		 SUPPLEMENTARY INFORMATION
Daftar I : Laporan Posisi Keuangan - Entitas Induk Saja	Lampiran 1/ <i>Appendix 1</i>	<i>Schedule I : Statements of Financial Position - Parent Entity Only</i>
Daftar II : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Entitas Induk Saja	Lampiran 3/ <i>Appendix 3</i>	<i>Schedule II : Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income - Parent Entity Only</i>
Daftar III : Laporan Perubahan Ekuitas - Entitas Induk Saja	Lampiran 4/ <i>Appendix 4</i>	<i>Schedule III : Statements of Changes in Equity - Parent Entity Only</i>
Daftar VI : Laporan Arus Kas - Entitas Induk Saja	Lampiran 5/ <i>Appendix 5</i>	<i>Schedule IV : Statements of Cash Flows - Parent Entity Only</i>
Daftar V : Estimasi Cadangan (Tidak Diaudit)	Lampiran 6/ <i>Appendix 6</i>	<i>Schedule V : Reserves Estimation (Unaudited)</i>

**PT PP ENERGI**

Plaza PP 7th Floor
Jln. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo - Jakarta 13760
Telepon : (021) 840 3933
Fax : (021) 840 8234
Email : corsec.office@pp-energi.com

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN ENERGI
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN ENERGI
AND ITS SUBSIDIARY**

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

For and on behalf of Board of Directors, We, the undersigned:

I. Nama	:	H.R. Ario Setyawan	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. TB Simatupang No. 57	:	Office Address
	:	Pasar Rebo - Jakarta Timur	:	
Alamat Domisili	:	Sutorejo Selatan 6/19 RT 04 RW 08	:	Domicile
	:	Mulyorejo Surabaya	:	
Nomor Telepon	:	(021) 8403988	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur Utama	:	Position
II. Nama	:	Supriyadi	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. TB Simatupang No. 57	:	Office Address
	:	Pasar Rebo - Jakarta Timur	:	
Alamat Domisili	:	Jl. Permata I/6 Cluster Permata Prima	:	Domicile
	:	RT 015 RW 008, Semarang	:	
Nomor Telepon	:	(021) 8403988	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur Keuangan	:	Position

Menyatakan bahwa :

Declare that :

- | | |
|---|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan; | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the Company's Consolidated Financial Statements;</i> |
| 2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The Company's Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information contained in the Company's Consolidated Financial Statements are complete and correct;</i> |
| b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | b. <i>The Company's Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information and facts; and</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan entitas anak. | 4. <i>We are responsible for the Company and its subsidiaries internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement letter is made truthfully.

Jakarta, 18 Februari 2022/ February 18, 2022

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan/
Finance Director

H. R. Ario Setyawan

Supriyadi

No. 00027/2.1000/AU.1/02/0912-1/1/II/2022

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Pembangunan Perumahan Energi

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pembangunan Perumahan Energi dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

No. 00027/2.1000/AU.1/02/0912-1/1/II/2022

Independent Auditor's Report

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Pembangunan Perumahan Energi

We have audited the accompanying consolidated financial statements PT Pembangunan Perumahan Energi and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021 and consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year ended then and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Company Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor's consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G

Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310

Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434

Email : info@hgkfirm.com Web : www.hgkfirm.com www.TIAGnet.com

NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015

No. 00027/2.1000/AU.1/02/0912-1/1/II/2022

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pembangunan Perumahan Energi tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian yang menyatakan bahwa Perusahaan dan entitas anak mengalami rugi bersih sebesar Rp.115.859.181.671 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan akumulasi defisit sebesar Rp.362.734.069.564, dan dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasi Perusahaan dan entitas anak yang belum dapat secara akurat diprediksi dan dikuantifikasi seberapa lama atau sejauh mana wabah Covid-19 tersebut berdampak terhadap hasil operasi, posisi keuangan dan arus kas Perusahaan dan entitas anak. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan dan entitas anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga telah diungkapkan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin dilakukan atas ketidakpastian tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Pembangunan Perumahan Energi dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Pembangunan Perumahan Energi (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut diatas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir.

No. 00027/2.1000/AU.1/02/0912-1/1/II/2022

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Pembangunan Perumahan Energi, as of December 31, 2021, and their financial performance and their cash flows for the year ended accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of Matters

We draw attention to Note 38 to financial statements to the consolidated financial statements which states that the Company suffered a nett loss of Rp.115,859,181,671 for the year ended December 31, 2021 with accumulated deficit amounting to Rp.362,734,069,564, and impact of the Covid-19 pandemic on the business and operations of the Company and its subsidiaries that could not yet to accurately predicted and quantified how long or how far the Covid-19 pandemic will effect the operating result, financial position, and cash flows of the Company and its subsidiaries. These conditions indicate the existence of material uncertainty which may cause significant doubt on the Company's ability to maintain its bussiness continuity. Management plans to address such conditions have also been disclosed in Note 38 to the consolidated financial statements. The accompanying consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from outcome of the uncertainty. Our opinion is not modified in respect of this matters.

Other Matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Pembangunan Perumahan Energi and its subsidiaries as of December 31, 2021, and for the year then ended, was performed for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Pembangunan Perumahan Energi (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2021, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. This Parent Entity Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and related directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements.

No. 00027/2.1000/AU.1/02/0912-1/1/II/2022

Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

No. 00027/2.1000/AU.1/02/0912-1/1/II/2022

Such Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, such Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



Bambang Karunawan, CPA.
Register Akuntan Publik/ Register of Public Accountant No. AP.0912

18 Februari 2022/ February 18, 2022

PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
A S E T				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	26.295.352.736	6.143.631.401	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	6	10.380.420.002	3.090.579.179	Trade account receivables
Aset keuangan atas proyek konsesi - bagian lancar	7	-	24.825.080.634	Financial assets for concession project current portion -
Piutang lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit masing - masing sebesar Rp.13.704.915.615 dan Rp.13.639.611.210 pada 31 Desember 2021 dan 2020	8	72.365.209.627	162.632.349.526	Other receivables - net of allowance for credit losses of Rp.13,704,915,615 and Rp.13,639,611,210 at December 31, 2021 and 2020, respectively
Persediaan	9	368.258.300	921.038.300	Inventories
Beban dibayar dimuka	10	8.070.912.941	14.820.894.711	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	11a	79.297.320.631	77.889.869.591	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar		196.777.474.237	290.323.443.342	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset keuangan atas proyek konsesi	7	194.713.000.000	194.428.919.366	Financial assets for concession project
Piutang lain-lain - pihak berelasi - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit masing - masing sebesar Rp.94.346.171.177 dan Rp.62.851.207.828 pada 31 Desember 2021 dan 2020	12	242.947.317.297	109.399.199.139	Other receivables - related parties - net of allowance for credit losses of Rp.94,346,171,177 and Rp.62,851,207,828 at December 31, 2021 and 2020, respectively
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	13	90.512.563.968	88.336.293.782	Investments in associates company and joint ventures
Investasi jangka panjang	14	246.428.935.000	246.428.935.000	Long-term investments
Aset hak guna	15	-	138.632.789	Rights - of - use assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	16	97.593.618	189.187.053	Property and equipment - net of accumulated depreciation
Aset minyak dan gas bumi	17	943.564.766.700	975.248.019.314	Oil and gas properties
Aset tidak lancar lain-lain	18	555.543.204	392.769.050	Other non - current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		1.718.819.719.787	1.614.561.955.493	Total Non - Current Assets
JUMLAH ASET		1.915.597.194.024	1.904.885.398.835	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS LANCAR				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	19	40.468.731.443	58.031.159.654	Trade account payables
Utang pajak	11b	20.426.491.593	23.901.801.975	Taxes payables
Biaya yang masih harus dibayar	20	54.711.009.755	40.622.481.985	Accrued expenses
Liabilitas sewa		-	317.665.734	Lease liabilities
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term liabilities current maturities
Utang bank	21	2.582.451.709	5.200.727.245	Bank loans
Jumlah Liabilitas Lancar		118.188.684.500	128.073.836.593	Total Current Liabilities
LIABILITAS TIDAK LANCAR				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	19	55.508.306.158	60.130.385.525	Trade account payables
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	21	90.230.788.774	87.743.679.592	Bank loans
Liabilitas program imbalan pasca kerja	22	5.384.182.200	7.269.444.452	Post employment benefit liabilities
Utang lain-lain jangka panjang	23			Long-term other payables
Pihak berelasi		1.245.574.240.455	1.101.952.029.354	Related parties
Pihak ketiga		119.152.897.594	122.298.747.305	Third parties
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar		1.515.850.415.181	1.379.394.286.228	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		1.634.039.099.681	1.507.468.122.821	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp.1.000.000 per saham				Capital stock - par value Rp.1,000,000 per share
Modal dasar - 700.000 saham				Authorized capital - 700,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor - masing-masing 541.233 and 521.073 saham pada 31 Desember 2021 dan 2020	24	541.233.000.000	521.073.000.000	Subscribed and paid - up capital - 541,233 and 521,073 shares as of December 31, 2021 and 2020, respectively
Tambahan modal disetor - bersih	26	13.425.138.372	13.425.138.372	Additional paid in capital - net
Uang muka setoran modal	25	-	20.160.000.000	Advance for future shares subscription
Penghasilan (rugi) komprehensif lain		1.268.642.323	1.138.151.295	Other comprehensive (loss) income
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		(3.445.776.633)	(3.062.485.550)	Exchange differences due to financial statement translation
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	27	46.500.234.923	-	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		(409.234.304.487)	(229.211.129.523)	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		189.746.934.498	323.522.674.594	Equity attributable to owners of the parent
Kepentingan non pengendali	28	91.811.159.845	73.894.601.420	Non controlling interest
Jumlah Ekuitas		281.558.094.343	397.417.276.014	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.915.597.194.024	1.904.885.398.835	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
PENDAPATAN USAHA	29	138.699.027.599	62.721.620.335	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN				COST OF REVENUES AND
BEBAN LANGSUNG	30	(131.313.172.998)	(89.233.909.816)	DIRECT COSTS
RUGI KOTOR		7.385.854.601	(26.512.289.481)	GROSS LOSS
BEBAN USAHA	31			OPERATING EXPENSES
Pegawai		(13.920.292.976)	(21.126.924.511)	Employees
Umum		(6.442.637.526)	(4.365.466.409)	General
Penyusutan dan amortisasi		(230.226.224)	(897.626.642)	Depreciation and amortization
Pemasaran		(440.177.217)	(6.850.532)	Marketing
Jumlah		(21.033.333.943)	(26.396.868.094)	Total
RUGI USAHA		(13.647.479.342)	(52.909.157.575)	OPERATING LOSS
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih	32			Other Incomes (Expenses) - Net
Selisih kurs - bersih		10.790.689.298	8.452.437.740	Foreign exchange - net
Pendapatan bunga		3.384.292.436	125.819.384	Interest income
Pemulihan cadangan penurunan nilai		409.356	10.255.057	Recovery allowance for impairment
Beban bunga		(122.491.801.333)	(48.516.625.720)	Interest expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai		(31.654.062.305)	(33.023.158.462)	Allowance for impairment loss expense
Penurunan nilai aset minyak dan gas bumi		(16.943.847.804)	(16.943.847.804)	Provision for impairment losses on oil and gas properties
Penurunan nilai aset keuangan konsesi		(24.541.000.000)	(10.871.720.772)	Provision for impairment losses on financial assets concession
Bagian rugi entitas asosiasi		(3.740.044.512)	(3.029.568.851)	Loss from associated company
Rugi penjualan aset		-	(310.104.154)	Loss of assets sale
Beban administrasi bank		(23.184.532)	(247.297.570)	Bank administration expense
Beban bunga liabilitas sewa		-	(78.429.607)	Interest expense on lease liabilities
Lain-lain - bersih		83.321.103.643	125.358.653.316	Others - net
Jumlah		(101.897.445.753)	20.926.412.557	Total
RUGI SEBELUM PAJAK		(115.544.925.095)	(31.982.745.018)	LOSS BEFORE TAX
(Beban) manfaat pajak penghasilan				Income tax (expense) benefit
Kini	11c	-	-	Current
Tangguhan	11c	-	-	Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Bersih		-	-	Income Tax Expense - Net
RUGI BERSIH		(115.544.925.095)	(31.982.745.018)	NET LOSS
TAHUN BERJALAN				FOR THE YEAR
Laba Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income
Pos-pos yang tidak akan				Items that will not be
direklasifikasi ke laba rugi				reclassified to profit or loss
Laba aktuarial program				Profit on employment benefit
imbalan kerja	22	233.302.114	(426.172.340)	plan actuarial
Aset pajak tangguhan	11d	-	-	Deferred tax assets
Pos-pos yang akan				Items that will be
direklasifikasi ke laba rugi				reclassified to profit or loss
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		(547.558.690)	(2.808.275.300)	Foreign exchange due to financial statement translation
RUGI KOMPREHENSIF		(115.859.181.671)	(35.217.192.658)	COMPREHENSIVE LOSS
TAHUN BERJALAN				FOR THE YEAR
Laba bersih yang dapat				Net income
diatribusikan kepada:				attributable to:
Pemilik entitas induk		(133.522.940.041)	(40.993.419.566)	Owners of parent entity
Kepentingan non pengendali		17.978.014.946	9.010.674.548	Non controlling interest
RUGI BERSIH		(115.544.925.095)	(31.982.745.018)	NET LOSS
TAHUN BERJALAN				FOR THE YEAR
Laba komprehensif yang dapat				Comprehensive income
diatribusikan kepada:				attributable to:
Pemilik entitas induk		(133.775.740.096)	(43.375.021.436)	Owners of parent entity
Kepentingan non pengendali		17.916.558.425	8.157.828.778	Non controlling interest
RUGI KOMPREHENSIF		(115.859.181.671)	(35.217.192.658)	COMPREHENSIVE LOSS
TAHUN BERJALAN				FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

Dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Attributed to the owner of the parent entity

	Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor/ Subscribed and paid up capital	Tambahannya modal disetor/ Additional paid in capital	Uang muka setoran modal/ Advance for stock subscription	Pendapatan komprehensif lain/ Other comprehensive income		Saldo laba/ Retained earning		Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity		
					Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ Foreign exchange due to financial statement	Keuntungan (kerugian) program imbalan kerja/ Gain (loss) on employment Benefit plan	Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaannya/ Appropriated				Jumlah/ Total
Saldo per 1 Januari 2020		493.037.000.000	13.425.138.372	28.036.000.000	(1.096.692.840)	1.553.960.455	-	(188.217.709.957)	346.737.696.030	65.736.772.642	412.474.468.672	Balance as of January 1, 2020
Setoran modal	24	28.036.000.000	-	(28.036.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	Paid-up capital
Uang muka setoran modal	26	-	-	20.160.000.000	-	-	-	-	20.160.000.000	-	20.160.000.000	Advance for stock subscription
Rugi komprehensif tahun berjalan		-	-	-	(1.965.792.710)	(415.809.160)	-	(40.993.419.566)	(43.375.021.436)	8.157.828.778	(35.217.192.658)	Comprehensive loss for the year
Saldo per 31 Desember 2020		521.073.000.000	13.425.138.372	20.160.000.000	(3.062.485.550)	1.138.151.295	-	(229.211.129.523)	323.522.674.594	73.894.601.420	397.417.276.014	Balance as of December 31, 2020
Setoran modal	24	20.160.000.000	-	(20.160.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	Paid-up capital
Cadangan wajib	22	-	-	-	-	-	46.500.234.923	(46.500.234.923)	-	-	-	Statutory reserve
Rugi komprehensif tahun berjalan		-	-	-	(383.291.083)	130.491.028	-	(133.522.940.041)	(133.775.740.096)	17.916.558.425	(115.859.181.671)	Comprehensive loss for the year
Saldo per 31 Desember 2021		541.233.000.000	13.425.138.372	-	(3.445.776.633)	1.268.642.323	46.500.234.923	(409.234.304.487)	189.746.934.498	91.811.159.845	281.558.094.343	Balance as of December 31, 2021

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		126.099.935.689	92.459.677.921	Receipt from customers
Pembayaran kas kepada:				Cash disbursement to:
Pemasok dan pihak ketiga lainnya		(73.788.726.354)	(65.744.747.284)	Supplier and other third parties
Direksi dan karyawan		(23.684.972.526)	(28.126.319.217)	Board of directors and employees
Kas dihasilkan dari operasi		28.626.236.809	(1.411.388.580)	Cash generated from operations
Pembayaran beban keuangan	31, 32	(1.759.368.298)	(4.584.053.327)	Payment of finance charge
Pembayaran pajak	11	(15.624.332.315)	(14.031.282.698)	Payment of taxation
Penerimaan pajak	11	3.730.059.703	826.762.707	Receipt from tax
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)				Net Cash Provided by (Used in)
 Aktivitas Operasi		14.972.595.899	(19.199.961.898)	 Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan bunga		76.384.945	95.216.679	Interest received
Penerimaan dari penjualan aset tetap	16	-	430.000.000	Proceed from sale of property and equipment
Penambahan aset tetap	16	(100.000.000)	(2.874.476.080)	Property and equipment addition
Pembayaran utang sewa pembiayaan	23	-	(285.748.399)	Payment of finance lease payable
Penambahan investasi	13	(2.015.235.730)	(1.874.637.888)	Investment addition
Penerimaan piutang	8	2.080.000.000	6.150.000.000	Receipt receivable
Kas Bersih Diperoleh dari				Net Cash Provided by
 Aktivitas Investasi		41.149.215	1.640.354.312	 Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan uang muka setoran modal	25	-	20.160.000.000	Received an advance payment of capital
Pembayaran utang bank jangka pendek	21	(36.720.530.624)	-	Bank loan received - short-term
Pembayaran utang bank jangka panjang	21	-	(1.136.469.993)	Bank loan payment - long-term
Penerimaan utang non bank jangka panjang		44.354.101.192	13.333.000.000	Non bank loan received - long-term
Pembayaran utang lain-lain		(2.048.944.243)	(22.355.500.000)	Other loan payment
Kas Bersih Diperoleh dari				Net Cash Provided by
 Aktivitas Pendanaan		5.584.626.325	10.001.030.007	 Financing Activities
PENURUNAN BERSIH - KAS DAN SETARA KAS		20.598.371.439	(7.558.577.579)	NET DECREASE - CASH AND CASH EQUIVALENTS
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING		(446.650.104)	(207.172.772)	EFFECT OF CHANGES FOREIGN CURRENCY
KAS DAN SETARA KAS - AWAL TAHUN	5	6.143.631.401	13.909.381.752	CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS - AKHIR TAHUN	5	26.295.352.736	6.143.631.401	CASH AND CASH EQUIVALENTS - ENDING OF THE YEAR
Transaksi Non Kas				Non-Cash Transactions
 Diungkapkan dalam Catatan 39				 is Presented in Note 39

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pembangunan Perumahan Energi yang disingkat PT PPEN (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 05 tanggal 2 Agustus 2016 dibuat oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0038298.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 90 tanggal 30 Juni 2020 Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH., tentang Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan dan direksi, Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0120304.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juli 2020.

Entitas induk langsung dan terakhir Perusahaan adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.

Perusahaan beralamat di Gedung Plaza PP, Jl. Letjen TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

b. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan Pasal 3 Akta Pendirian Perusahaan adalah menjalankan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak Perusahaan dibidang energi (tidak terbatas pada energi konversi maupun energi terbarukan), Sumber Daya Mineral (termasuk di dalamnya Minyak dan Gas Bumi), pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, Industri, Perdagangan dan Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M).

c. Pengurus Perusahaan

Sesuai dengan Akta Notaris No. 101 dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., tanggal 30 Juni 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris

Eddy Herman Harun
Ismail Zulkarnain
Didik Mardiyanto

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Pembangunan Perumahan Energi that shortened PT PPEN (the Company) was established based on the Deed of Establishment of the Company of Notary Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., No. 05 dated August 2, 2016 in Jakarta. The Deed of Establishment has been approved by Minister of Justice and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0038298.AH.01.01.Tahun 2016 dated August 29, 2016.

The Company's Articles of Association has been amended several times, the latest by Notarial Deed No. 90 dated June 30, 2020 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH., concerning changes in the purpose and objectives and the Company's business activities and directors, The amendment was approved by Minister of Laws and Human Right of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0120304.AH.01.11.TAHUN 2020 dated July 23, 2020.

The Company's immediate and the ultimate parent Company is PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk incorporated and domiciled in Indonesia.

The Company is located at Plaza PP Building, Jl. Letjen TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, East Jakarta.

b. Purpose and objectives

The purposes and objectives of the Company in accordance with Article 3 of the Deed of establishment of the Company is to run business both directly and indirectly through subsidiaries in the energy sector (not limited to conversion energy or renewable energy), Mineral Resources (including Oil and Gas), utilization of Natural Resources, Waste Management and Recycling, Industry, Trade and Operations and Maintenance Services (O&M).

c. Management of the Company

In accordance with Notarial Deed No. 101 made by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., dated June 30, 2021, the members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2021 are as follows:

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner
Commissioner

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Dewan Direksi		Board of Directors
Direktur Utama	H. R. Ario Setyawan	President Director
Direktur	Supriyadi	Director
Direktur	Lumban Tobing Erick Erland M	Director

Sesuai dengan Akta Notaris No. 522 dibuat oleh Notaris Ivan John Harris, S.H., M.Kn., tanggal 19 Oktober 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

In accordance with Notarial Deed No. 522 made by Notary Ivan John Harris, S.H., M.Kn., dated October 19, 2020, the members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2020 are as follows:

Dewan Komisaris		Board of Commissioners
Komisaris Utama	Eddy Herman Harun	President Commissioner
Komisaris	Ismail Zulkarnain	Commissioner

Direksi		Directors
Direktur Utama	H. R. Ario Setyawan	President Director
Direktur	Supriyadi	Director
Direktur	Anwar Ismail	Director

d. Entitas anak yang dikonsolidasi

Perusahaan memiliki lebih dari 50% saham di entitas anak pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

d. Consolidated subsidiaries

The Company owns more than 50% of shares in subsidiaries as of December 31, 2021 and 2020 consisting of:

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Bidang usaha/ Nature of business	Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Sebelum Eliminasi/ Before Elimination				
				2021	2020	Jumlah Aset/ Total Asset		Jumlah Pendapatan/ Total Revenue		
						31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
<u>Kepemilikan langsung/ Direct ownership</u>										
PT Sepoetih Daya Prima (SDP)	Jakarta	Penyediaan tenaga listrik/ Provider of Electricity	2002	75%	75%	196.425.115.039	221.590.515.402	-	14.520.905.698	
PT Odira Energy Karang Agung (OEKA)	Jakarta	Kontraktor eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ Oil and Gas Exploration and Production and Contractor	2017	70%	70%	824.249.742.889	811.087.929.936	138.699.027.599	48.200.714.637	
PT Mahkota Dinamika Niaga (MDN)	Jakarta	Penimbunan dan/atau penyimpanan minyak/ Oil storage business activities	2018	73%	73%	61.098.665.755	60.803.928.426	-	-	

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATIONS OF PSAK (ISAK)

a. Standar, amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

a. Standard, amendments/improvements and interpretation to standard effective in the current year

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif

In the current year, the Company has applied new standards and a number of amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for

(Lanjutan/Continued)

untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

- Amendemen PSAK 73, PSAK 71, PSAK 60 dan PSAK 55: Sewa, Instrumen Keuangan, Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran Tentang Pembaruan IBOR Tahap Dua.
- Penyesuaian Tahunan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2021 dan relevan bagi Perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- PSAK 73 (amendemen) Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19

b. Standar, amendemen/penyesuaian dan interpretasi standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Perusahaan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

- PSAK 22 (amendemen) Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual
- PSAK 57 (amendemen) Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2021 atas PSAK (amendemen PSAK 69 Agrikultur, PSAK 71 Instrumen Keuangan, dan PSAK 73 Sewa)

accounting period beginning on or after January 1, 2021. The adoption of these new/revised PSAKs does not result in changes to the Company's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years, as discussed below.

- *Amendments to PSAK 73, PSAK 71, PSAK 60 and PSAK 55: Leases, Financial Instruments, Financial Instruments: Disclosures and Financial Instruments: Recognition and Measurement of the Phase Two IBOR Renewal.*
- *PSAK 1 Annual Adjustment: Presentation of Financial Statements.*

The adoption of the change in accounting standards effective as of April 1, 2021 and relevant to the Company but did not cause significant changes to the Company's accounting policies and did not have a material impact on the amounts reported in the current period's financial statements:

- *PSAK 73 (amendment) Leases: Covid-19 Related Rent Concessions*

b. Standards, amendments/improvements and interpretations to standards issued not yet adopted

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAK relevant to the Company were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2022

- *PSAK 22 (amendment) Business Combinations: References to the Conceptual Framework*
- *PSAK 57 (amendment) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts*
- *2021 Annual Improvements to PSAK (amendments to PSAK 69 Agriculture, PSAK 71 Financial Instruments, and PSAK 73 Leases)*

(Lanjutan/Continued)

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 16 (amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- PSAK 25 (amendement) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- PSAK 1 (amendement) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

b. Dasar penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan Perusahaan adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas Perusahaan disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Effective for periods beginning on or after January 1, 2023

- PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current
- PSAK 16 (amendment) Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use
- PSAK 25 (amendment) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates
- Amendments to PSAK 1 (amendment) Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies
- Amendment to PSAK 46: Income Tax on Deferred Tax on Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of compliance

The financial statements have been prepared based on the Indonesia Financial Accounting Standard (IFAS) consisting of statement and interpretations of the statement which were issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board the Indonesian Institute of Accountants.

b. Basis of preparation

The Company's financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The Company's statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

(Lanjutan/Continued)

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

The reporting currency used in the preparation of financial statements is the Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Company.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan.

The directors have, at the time of approving the financial statements, a reasonable expectation that the Company has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the financial statements.

c. Dasar konsolidasian

c. Basis of consolidated

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan (entitas anak). Pengendalian tercapai dimana Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities controlled by the Company (subsidiaries). Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

The Company reassessment whether the entity is investee if fact and condition indicate are change to one or more of them the elements control of mentioned above.

Ketika Perusahaan memiliki kurang dari hak suara mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan kekuasaan termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilihan dalam RUPS sebelumnya.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights are sufficient to give it power including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan non-pengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

Kepentingan non-pengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan pemegang saham non-pengendali awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali dari nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dilakukan untuk setiap akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan non-pengendali adalah jumlah kepemilikan pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan non-pengendali dari perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Jumlah laba rugi komprehensif entitas anak diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan non-pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

Perubahan kepemilikan Perusahaan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Perusahaan atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Perusahaan dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

When required, adjustment are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Company's accounting policies.

All intra group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Company are fully eliminated on consolidated.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately and presented in equity. The interest of non-controlling shareholders initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the recognized amounts at the fair value of the acquiree's identifiable net asset. The choice of measurement is made on acquisition by acquisition basis. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus non-controlling interests share of subsequent changes in equity. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

Changes in the Company's ownership interest in subsidiaries that do not result in the Company losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Company's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

(Lanjutan/Continued)

Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (retained interest) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk *goodwill*), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non-pengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Perusahaan telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

d. Kombinasi bisnis

Akuisisi bisnis dicatat menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi

When the Company loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/ permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a jointly controlled entity.

d. Business combinations

Business acquisitions are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Company, liabilities incurred by the Company to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Company in exchange for control of the acquiree. Acquisition related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the

(Lanjutan/Continued)

jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Kepentingan non-pengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan non-pengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjensi (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjensi yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perlakuan akuntansi selanjutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi lain diukur ulang ke nilai wajar pada tanggal pelaporan selanjutnya dengan perubahan nilai wajar diakui diakui di laba rugi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba

acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase option.

Non-controlling interests that are present ownership interests and entitle their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.

When the consideration transferred by the Company in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Other contingent consideration is remeasured to fair value at subsequent reporting dates with changes in fair value recognized in profit or loss.

When a business combination is achieved in stages, the Company's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or

(Lanjutan/Continued)

rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikannya dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

e. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Selisih antara harga pengalihan yang timbul dari pengalihan aset, utang, saham atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya dengan nilai buku transaksi dalam rangka restrukturisasi antara entitas sepengendali diakui sebagai "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Akun ini disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan tidak diakui ke laba rugi.

f. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Perusahaan menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	14.269

Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, yang sudah terealisasi maupun yang belum, baik yang berasal dari transaksi dalam mata uang asing maupun penjabaran aset dan liabilitas moneter dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif.

loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have an impact on the amounts recognized at that date.

e. Business combination under common control

The difference between the transfer price and book value of assets, liabilities, shares or other forms of ownership instruments in a restructuring transaction between entities under common control is recorded as "Business Combination Under Common Control". This account are presented as part of additional paid-in capital and not recycled to profit or loss.

f. Transactions and balances in foreign currencies

The Company maintains its accounting records in Indonesian Rupiah. Transactions involving foreign currency are recorded at the rate of exchange prevailing at the time of the transactions.

On each balance sheet date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated to Rupiah using the Bank of Indonesia average rate of exchange at such date, as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	
	14.105	United States Dollar (USD) 1

Realized and unrealized foreign exchange gains or losses arising from transactions in foreign currency and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the statements of comprehensive income.

(Lanjutan/Continued)

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam poin (a);
 - vii. Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam poin a.i memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);

g. Transactions with related parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

- a) *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:*
 - i. Has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. Has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and follow subsidiary is related to the other);*
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.*
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
 - v. The entity is a post - employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is an entity who performing that plan, the sponsoring entity are also related to the reporting entity;*
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in point (a);*
 - vii. A person identified in point a.i has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity);*

(Lanjutan/Continued)

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

h. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

h. Financial instrument

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument or another entity.

Aset keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Financial assets

All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

The Company's financial assets are classified as follows:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

- Financial assets at amortized cost.
- Financial assets at fair value through profit and loss.
- Financial assets at fair value through other comprehensive income.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial adoption.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal penyelesaian, yaitu pada tanggal aset tersebut diserahkan kepada atau oleh Perusahaan.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized settlement date, i.e., the date that an asset is delivered to or by the Company.

(Lanjutan/Continued)

Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, piutang pihak berelasi, aset derivatif, aset lancar lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi harga). Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari SBE tersebut. Amortisasi SBE dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

The Company's assets include cash and cash equivalents, trade and other receivables, due from related parties, derivative assets, other current assets and other non-current financial assets (quoted and unquoted financial instrument). Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current assets.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- *Financial assets at amortized cost*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the Effective Interest Rate ("EIR") method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the profit or loss. The losses arising for impairment are also recognized in the profit or loss.

- *Financial assets at fair value through profit and loss*

Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the statements of financial position at fair value, with changes in fair value recognized in the profit or loss.

- *Financial assets at fair value through other comprehensive income*

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

(Lanjutan/Continued)

Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Perusahaan hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang usaha, utang pengadaan, akrual, pinjaman dan utang obligasi, utang pihak berelasi, uang muka pelanggan, liabilitas derivatif dan liabilitas keuangan jangka pendek, dan jangka panjang lain-lain. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode SBE. Amortisasi SBE termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk

Financial liabilities

Initial recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classified as follows:

- Financial liabilities at amortized cost;
- Financial liabilities at fair value through profit and loss;
- Financial liabilities at fair value other comprehensive income.

The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition. The Company only has financial liabilities at amortized cost.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

The Company's financial liabilities include trade payables, procurement payable, accruals, loans and bonds payable, due to related parties, deposits from customer, derivative liabilities and other current and non-current financial liabilities. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities at amortized cost (e.g interest-bearing loans and borrowings) are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

Gains or losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

- Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held

(Lanjutan/Continued)

liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok untuk diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini termasuk instrumen keuangan derivatif yang diambil Perusahaan yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan salinghapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Perusahaan atau pihak lawan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Aset keuangan dinilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya apabila terdapat bukti obyektif sebagai akibat adanya satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut dan dilakukan estimasi terhadap arus kas masa depan dari investasi tersebut yang akan terdampak.

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit

for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through the profit or loss.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. This category includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

Impairment of financial assets

Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

At each reporting date, the Company assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that

(Lanjutan/Continued)

ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Perusahaan telah mengalihkan hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau memiliki hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

Nilai wajar instrumen keuangan

Perusahaan menilai instrumen keuangan, termasuk derivatif, sebesar nilai wajar pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

assessment, the Company compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Company applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

Derecognition of financial assets and liabilities

Financial assets

A financial asset, or whichever is applicable, part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets, is derecognized when:

- The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
- The Company transferred its contractual rights to receive the cash flows of financial assets or retained the contractual rights to receive the cash flows of the financial assets.

Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Fair value of financial instruments

The Company measures financial instruments, including derivatives, at fair value at each statement of financial position date.

(Lanjutan/Continued)

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan manfaat ekonomi tertinggi dalam penggunaan aset atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut secara maksimal.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input relevan yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *In the principal market for the asset and liability; or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

(Lanjutan/Continued)

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

Penyesuaian risiko kredit

Perusahaan melakukan penyesuaian harga dalam kondisi pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit di pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang sedang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasury) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

i. Kas dan setara kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

j. Piutang usaha

Piutang usaha disajikan dalam nilai wajar awal, dan selanjutnya diukur pada nilai yang diamortisasi setelah dikurangi dengan provisi penurunan nilai piutang. Provisi dibentuk

For assets and liabilities that are recognized at fair value in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

Credit risk adjustment

The Company adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Company's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the Company assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments.

i. Cash and cash equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

j. Trade account receivables

Trade account receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost less provision for impairment of receivables. This provision is established

(Lanjutan/Continued)

apabila terdapat bukti yang objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Piutang dihapus-bukukan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan persediaan ditentukan dengan metode rata-rata (*average method*). Penyisihan atas persediaan usang dan tidak lancar (*slow moving*), jika ada, ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun dan disajikan sebagai pengurang nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

Persediaan minyak mentah, bahan kimia dan produk petroleum lainnya, suku cadang dan perlengkapan untuk operasi dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atau metode rata-rata. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual yang wajar di dalam proses usaha normal setelah dikurangi dengan estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya penjualannya yang diperlukan. Cadangan untuk penurunan nilai keusangan persediaan ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan pada akhir periode/tahun.

l. Beban dibayar dimuka

Biaya dibayar di muka dibebankan pada operasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya bersangkutan.

m. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah tidak disusutkan. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Efektif tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan mengubah kebijakan akuntansi aset tetap tanah dan bangunan yaitu metode *cost* menjadi metode revaluasi. Semua aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*), dengan tarif sebagai berikut:

when there is objective evidence that the Company will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. Receivables are written-off in the period during which they are determined to be not collectible.

k. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value (*the lower of cost or net realizable value*). Cost of inventories is determined by the average method (*average method*). Allowance for obsolete inventories and non-current (*slow moving*), if any, is determined by review of the inventory at the end of the year and presented as a deduction from the value of inventory to net realizable value.

Inventories of crude oil, chemicals and other petroleum products, spare parts and equipment for operations are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method or average method. The net realizable value is a reasonable estimate of the selling price in the normal business process after deducting the estimated cost of completion and the estimated cost of its sales. Reserves for impairment of inventory obsolescence are determined based on a review of the condition of each inventory at the end of the period/year.

l. Prepaid expenses

Prepaid expenses are charged to operations over the beneficial periods.

m. Property and equipment

Property and equipment are recognized at cost less accumulated depreciation, except for land that is not depreciated. Any portion of property and equipment that have significant cost to the total cost of all assets should be depreciated separately. Any portion of a property and equipment that has a significant cost to the total cost of assets should be depreciated separately. Effective January 1, 2017, the Company changes the accounting policy of property and equipment, land and buildings that from the cost method to be a revaluation method. All property and equipment are depreciated using the "straight line" method, at the following rates:

(Lanjutan/Continued)

Peralatan Kantor	4 tahun/years	Equipment
Peralatan Berat	8 tahun/years	Heavy Equipment

Biaya-biaya setelah perolehan awal termasuk di dalam jumlah tercatat aset dan diakui secara terpisah, jika memungkinkan, hanya jika terdapat kemungkinan bahwa biaya yang dikapitalisasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomis bagi Perusahaan dan dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat dari komponen yang diganti tidak diakui. Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

The costs after initial acquisition are included in the carrying amount of the asset and recognized separately, if possible, only when there is a possibility that the capitalized costs will provide an economic benefit to the Company and can be reliably measured. The carrying amount of the replaced component is not recognized. All other maintenance and repair costs are recognized.

Apabila aset tetap ditarik dari penggunaannya atau dijual, maka nilai tercatat akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

When property and equipment are withdrawn from their use or been sold, then the accumulated depreciation carrying amount are eliminated from the financial statements, and the resulting gains or losses are recognized in the statement of comprehensive income.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan dari nilai mana yang lebih tinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai.

When the carrying amount of assets are greater than its recoverable amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount, which is determined by which value is higher between net selling price and value in use.

n. Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari bisnis tersebut dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

n. Goodwill

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business less accumulated impairment losses, if any.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi *goodwill* diuji penurunan nilainya secara tahunan, dan ketika terdapat indikasi bahwa unit tersebut mengalami penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pertama untuk mengurangi jumlah tercatat aset atas setiap *goodwill* yang dialokasikan pada unit dan selanjutnya ke aset lainnya dari unit dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset dalam unit tersebut. Setiap kerugian penurunan nilai *goodwill* diakui secara langsung dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Company's cash generating units expected to benefit from the synergy of the combination. Cash generating units which has been allocated to goodwill are tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired. If the recoverable amount of the cash generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit prorata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit. Any impairment loss for goodwill is recognized directly in profit or loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in a subsequent period.

Pada pelepasan unit penghasil kas yang relevan, jumlah yang dapat diatribusikan dari *goodwill* termasuk dalam penentuan laba atau rugi atas pelepasan.

On disposal of the relevant cash generating unit, the attributable amount of goodwill is included in the determination of the profit or loss on disposal.

(Lanjutan/Continued)

o. Penurunan nilai aset non-keuangan kecuali goodwill

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi kecuali aset tersebut dicatat pada jumlah revaluasi, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi.

p. Sewa

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi". Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

o. Impairment of non-financial assets except goodwill

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

p. Lease

From January 1, 2020, the Company has applied PSAK 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as "operating lease". This policy is applied to contracts entered into or changed, on or after January 1, 2020.

(Lanjutan/Continued)

Sebagai pesewa

Apabila aset disewakan melalui sewa pembiayaan, nilai kini pembayaran sewa diakui sebagai piutang. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang tersebut diakui sebagai penghasilan sewa pembiayaan tangguhan.

Penghasilan sewa diakui selama masa sewa dengan menggunakan metode investasi neto yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan.

Apabila aset disewakan melalui sewa operasi, aset disajikan di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Penghasilan sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan;
- Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
- Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

As lessor

When assets are leased out under a finance lease, the present value of the lease payments is recognized as receivable. The difference between the gross receivable and the present value of the receivable is recognized as unearned finance lease income.

Lease income is recognized over the term of the lease using the net investment method which reflects a constant periodic rate of return.

When assets are leased out under an operating lease, the asset is presented in the statements of financial position based on the nature of the asset. Lease income is recognized over the term of the lease on a straight-line basis.

As lessee

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assesses whether:

- *The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined;*
- *The Company has the right to operate the asset;*
- *The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

The Company recognises a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

(Lanjutan/Continued)

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Sewa jangka pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka - pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

q. Imbalan pasca kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang - undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam komponen ekuitas lainnya tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklas ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Short-term lease

The Company has elected not to recognize right - of - use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Company recognize the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

q. Post employment benefits

The Company provides defined post - employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other components of equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:

- *Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).*
- *Net interest expense or income.*
- *Remeasurement.*

(Lanjutan/Continued)

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

r. Pengakuan pendapatan dan beban

r. Recognition of revenue and costs

Pendapatan keuangan atas sewa pembiayaan

Finance income of finance lease

Pengakuan awal

Initial recognition

Dalam sewa pembiayaan, Perusahaan (*lessor*) mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Pada hakikatnya dalam sewa pembiayaan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan hukum dialihkan oleh *lessor* kepada *lessee*, dan dengan demikian penerimaan piutang sewa diperlakukan oleh *lessor* sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan sebagai penggantian dan imbalan atas investasi dan jasanya.

In finance lease, the Company (the lessor) recognizes an asset in the form of finance lease receivables in its statement of financial position at an amount equal to the net lease investment. Essentially, in finance lease, the entire of risks and benefits related to ownership law are transferred from the lessor to the lessee, therefore the lease receivables are treated by the lessor as payment the principal of finance lease receivable and payment of finance income as a benefit for investment and services which conducted by the lessor.

Pada awal masa sewa, seluruh nilai aset sewa pembiayaan yang telah selesai dikerjakan sebesar nilai perolehan ditambah laba konstruksi dipindahkan menjadi piutang aset sewa pembiayaan. Jumlah piutang aset sewa pembiayaan tersebut dibandingkan dengan jumlah pembayaran sewa minimum dijadikan dasar pengalokasian antara bagian yang merupakan pelunasan piutang aset sewa pembiayaan dan bagian yang merupakan pendapatan keuangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas pendapatan keuangan dari sewa pembiayaan.

At the beginning of the lease term, the entire cost of finance lease asset under construction that have been completed, after added the profit from construction, are reclassified as the receivable of finance lease asset. Those amounts are compared to the value of the minimum lease payments and recognized as the basis of allocation between a part of installment for the receivable of finance lease asset and a part of financial income which was resulted a constant rate of interest on the financial income of the lease.

Pengukuran selanjutnya

Subsequent measurement

Setiap penerimaan pembayaran sewa dialokasikan antara bagian yang merupakan pelunasan piutang aset sewa pembiayaan dan bagian yang merupakan pendapatan keuangan.

Each lease payment is allocated between the part of installment for receivable of finance lease asset and a part of finance income.

Pendapatan dari penjualan minyak dan gas bumi

Revenue from sales of oil and gas

Pendapatan dari penjualan minyak mentah dan gas diakui pada saat pengiriman ke pelanggan. Apabila volume dari minyak yang di-*lifting* kurang atau lebih dari hak Perusahaan, maka piutang dari atau utang ke Pemerintah harus diakui.

Revenue from sales crude oil and gas is recognized upon delivery to the customer. For lifting imbalances with the Government, wherein the volume of the oil lifted is less or greater than the Company entitlement, a receivable or payable is accrued.

(Lanjutan/Continued)

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga yang diakui berdasarkan waktu terjadinya, dengan acuan jumlah pokok terhutang dengan suatu tingkat bunga yang berlaku.

Beban langsung

Beban langsung yang pembebanannya terkait dengan masa sewa operasi:

- Penyusutan aset tetap.
- Amortisasi atas beban operasi dan pemeliharaan instalasi dan mesin pembangkit listrik dibayar di muka.
- Bunga beban rekondisi peralatan.
- Pembebanan dimulai sejak tanggal berita acara COD hingga masa kontrak berakhir. Manajemen melakukan evaluasi berkala terhadap estimasi yang digunakan, selisih atas hasil evaluasi dibebankan atau dikurangkan pada beban masing-masing pada tahun berjalan.

Beban terkait biaya operasional dan pemeliharaan instalasi dan pembangkit listrik diakui pada saat terjadinya berdasarkan ketentuan kontrak.

Biaya diakui pada saat terjadinya.

s. Perjanjian konsesi jasa

Pendapatan PT SDP (entitas anak) berasal dari perjanjian konsesi jasanya. Konstruksi jasa yang berhubungan dengan perjanjian konsesi jasa diakui sebagai pendapatan sesuai dengan PSAK 34: "Kontrak Konstruksi" dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Jika hasil kontrak konstruksi tidak dapat diestimasi secara andal, pendapatan dihitung menggunakan metode keuntungan nihil sebesar jumlah pengeluaran yang terjadi dan kemungkinan dapat dipulihkan.

Berdasarkan konsesi jasa, PT SDP akan menerima beberapa komponen pembayaran untuk jasa yang diberikan, yakni pengembalian biaya modal atas pembangkit listrik, komponen operasi, dan bahan baku serta pengembalian modal atas fasilitas tambahan.

Pendapatan atas konstruksi diakui dengan penetapan estimasi margin konstruksi dari biaya yang dikeluarkan untuk termin penyelesaian pembangkit listrik selama periode berjalan.

Pendapatan keuangan dari konsesi jasa mencerminkan pendapatan bunga atas piutang dari perjanjian konsesi jasa, yang diakui dengan menggunakan metode bunga efektif.

Interest income

Interest income is accrued on time basis, by reference to the principal outstanding at the applicable interest rate.

Direct cost

Direct cost that charged based on the contract term of operating lease:

- *Depreciation of property and equipment.*
- *Amortization of operating and maintenance of installation and power plant prepaid expenses.*
- *Interest of equipment recondition cost.*
- *The cost are charged starting from the date of COD until the expired date of contract. Management periodically evaluates the estimation used, the difference of evaluation results is charged or deducted on each related cost in current year.*

Cost related to operation and maintenance of the installation and power plant are recognized as incurred based on the terms of contract.

Expenses are recognized when incurred.

s. Concession service agreements

Revenue of PT SDP (subsidiary) comes from services concession agreements. Construction services related to service concession agreements are recognized as income in accordance with PSAK 34: "Construction Contracts" by using the percentage of completion method. If the outcome of a construction contract can not be reliably estimated, revenue is calculated using the method nil profit amount and possible expenses incurred can be recovered.

Based on service concession, PT SDP will receive some of the components of the payment for services rendered, namely the return of capital costs on power plant, operating components, and raw materials as well as return of capital on additional amenities.

Revenue from construction are recognized by the determination of the estimated margin of the construction costs incurred for the settlement terms of power plant during the period.

Financial income from service concession reflects the interest income on receivables from service concession arrangement, which is recognized using the effective interest method.

(Lanjutan/Continued)

t. Aset minyak dan gas bumi

Biaya pengeboran sumur pengembangan dan sumur tes stratigrafi tahap pengembangan, platform, perlengkapan sumur dan fasilitas produksi terkait, dikapitalisasi sebagai aset sumur, perlengkapan dan fasilitas dalam pengerjaan. Biaya tersebut dipindahkan ke aset sumur, perlengkapan dan fasilitas terkait pada saat pengeboran atau konstruksi selesai.

Penyusutan, deplesi dan amortisasi atas aset minyak dan gas bumi, kecuali untuk aset sumur, perlengkapan dan fasilitas dalam pengerjaan, dihitung dengan menggunakan metode satuan unit produksi, dengan menggunakan produksi kotor yang dibagi dengan cadangan kotor yang terbukti dan telah dikembangkan. Penyusutan atas fasilitas pendukung dan peralatan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

u. Aset eksplorasi dan evaluasi

Beban eksplorasi dan evaluasi termasuk biaya geologi dan geofisika, biaya pengeboran sumur eksplorasi termasuk biaya pengeboran sumur tes stratigrafi tahap eksplorasi, dan biaya lainnya yang terkait untuk mengevaluasi kelayakan teknis dan komersialitas dari minyak dan gas yang diekstraksi dikapitalisasi dan disajikan terpisah sebagai Aset Eksplorasi dan Evaluasi di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pengeluaran yang dilakukan sebelum perolehan izin penambangan untuk entitas anak yang bergerak di bidang tambang batu bara dibebankan pada saat terjadinya.

Jika tidak ditemukan potensi cadangan yang secara ekonomis dapat diperoleh, aset eksplorasi dan evaluasi dihapus melalui laba rugi sebagai sumur kering. Jika cadangan terbukti ditemukan dan layak dikembangkan tergantung pada aktivitas penilaian lebih lanjut, pengeluaran disajikan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi pada saat kegiatan mengevaluasi kelayakan tersebut sedang berlangsung.

Pemulihan aset eksplorasi dan evaluasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial daerah pengembangan (*area of interest*) tersebut. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji untuk penurunan nilai bila fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatatnya mungkin melebihi jumlah terpulihkannya. Dalam keadaan tersebut, maka entitas harus mengukur, menyajikan dan mengungkapkan rugi penurunan nilai terkait sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset".

t. Oil and gas properties

The costs of drilling development wells and development-type stratigraphic test wells, platforms, well equipment and attendant production facilities, are capitalized as uncompleted wells, equipment and facilities. Such costs are transferred to wells and related equipment and facilities upon completion.

Depreciation, depletion and amortization of oil and gas properties, except uncompleted wells, equipment and facilities, are calculated based on the unit-of-production method, using the gross production divided by gross proved developed reserves. Depreciation for support facilities and equipment is calculated using straight line.

u. Exploration and evaluation assets

Exploration and evaluation expenditures including geological and geophysical costs, costs of drilling exploratory wells, including the costs of drilling exploratory-type stratigraphic test wells, and other costs in relation to evaluating the technical feasibility and commercial viability of extracting oil and gas are capitalized and presented separately as Exploration and Evaluation Assets in the consolidated statement of financial position.

The costs incurred before the acquisition of mining license for subsidiaries engaged in coal mining are expensed when incurred.

If no potentially commercial hydrocarbons are discovered, the exploration asset is written off through profit or loss as a dry hole. If extractable hydrocarbons are found and, subject to further appraisal activity, it is probable that they can be commercially developed, the costs continue to be carried as an exploration and evaluation asset while progress is made in assessing the commerciality of the hydrocarbons.

The recoverability of exploration and evaluation assets depends on the successful development and commercial exploitation in such area (area of interest). Exploration and evaluation assets are tested for impairment if certain facts and circumstances indicate that the carrying amount of the assets may exceed the recoverable value. In such conditions, the entity must measure, present and disclose the impairment loss as required under PSAK No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets".

(Lanjutan/Continued)

Aset eksplorasi dan evaluasi ditransfer ke "Properti pertambangan" dan "Aset minyak dan gas bumi" pada akun "Aset minyak dan gas bumi dan properti pertambangan" setelah ditetapkan bahwa tambang memiliki nilai ekonomis untuk dikembangkan.

v. Liabilitas pembongkaran aset restorasi area

Perusahaan mengakui liabilitas pembongkaran dan pemindahan aset, restorasi area atas fasilitas produksi minyak dan gas bumi, sumur, pipa dan aset-aset yang terkait sesuai dengan persyaratan dalam kontrak bagi hasil atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset minyak dan gas bumi dan restorasi area diakui sebagai komponen biaya perolehan aset, yang kemudian disusutkan/didepresiasi dengan menggunakan metode satuan unit produksi yang sejalan dengan tarif depleksi aset yang dipilih.

Dalam banyak kasus, aktivitas pembongkaran dan pemindahan aset, restorasi area fasilitas produksi minyak dan gas, sumur, pipa saluran dan aset terkait terjadi pada beberapa tahun di masa yang akan datang. Provisi atas liabilitas pembongkaran dan pemindahan aset, dan restorasi area di masa yang akan datang adalah berupa estimasi terbaik pada tanggal pelaporan keuangan atas nilai kini dari pengeluaran di masa yang akan datang untuk melaksanakan liabilitas pembongkaran dan pemindahan aset, dan restorasi area tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada tanggal pelaporan.

Estimasi tersebut ditelaah setiap tahun dan disesuaikan bila diperlukan. Penyesuaian atas nilai kini dari liabilitas pembongkaran dan pemindahan aset, dan restorasi area dibukukan sebagai penyesuaian atas nilai buku aset yang bersangkutan dengan jumlah yang sama.

Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan, rehabilitasi dan lingkungan hidup yang terjadi pada tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

The exploration and evaluation assets are transferred to "Mining properties" and "Oil and gas properties" in the "Oil and gas assets and mining properties" account after the mining area is determined to have commercial reserves for further development.

v. Liability of asset abandonment and site restoration

The Company recognizes liability for the dismantling and reclassification of assets, restoration of areas for oil and gas production facilities, wells, pipes and related assets in accordance with the terms of the production sharing contract or in accordance with applicable regulations.

The initial estimated costs for dismantlement and site restoration of oil and gas properties are recognized as part of the acquisition costs of the assets, and are subsequently depreciated/depleted using the unit of production method in line with the selected assets depletion rate.

In most instances, the dismantlement and transfer of assets, site restoration activities of oil and gas production facilities, wells, pipelines and related assets will occur several years in the future. The provision for future dismantlement and transfer of assets, and site restoration obligation is the best estimate of the present value of the future expenditures required to undertake the dismantlement and transfer of assets, and site restoration obligation at the reporting date, based on current legal requirements.

Such estimates are reviewed on an annual basis and adjusted each year as required. Adjustments to the present value of the dismantlement and transfer of assets, and site restoration obligation are recorded as adjustment to the carrying amount of the associated asset in the same amount.

The costs related to restoration, rehabilitation and living environment which occurred in the production phase are expensed as part of production cost.

(Lanjutan/Continued)

w. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas dan laporan laba rugi komprehensif lainnya.

Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada posisi tanggal keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan balance sheet liability method, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk masing-masing entitas.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan dan yang akan digunakan pada saat aset pajak tangguhan dipulihkan atau liabilitas pajak tangguhan dilunasi.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

x. Segmen operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. Yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. Dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap bidang usaha.

w. Income tax

The income tax expense comprises current and deferred income tax. Tax is recognized in the statements of comprehensive income account, except to the extent that it relates to items recognized directly to equity and other comprehensive income.

The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the financial position date.

Deferred income tax is recognized using the balance sheet liability method, for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities with carrying values for each entity.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted at the statements of financial position date and are expected to be applied when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets relating to the carry forward of unused tax losses are recognized to the extent that it is probable that future tax able profit will be available against which the unused tax losses can be utilised.

x. Operation segment

Operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a. *That engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);*
- b. *Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and*
- c. *For which discrete financial information is available.*

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each business.

(Lanjutan/Continued)

y. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Ventura bersama adalah pengaturan bersama di mana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Perusahaan atas kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama melebihi kepentingan Perusahaan pada entitas asosiasi atau ventura bersama (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Perusahaan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama), Perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Perusahaan mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat *investee* menjadi entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Perusahaan atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai *goodwill*. *Goodwill* termasuk dalam jumlah tercatat

y. Investments in associates and joint ventures

An associate is an entity over which the Company has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangements have rights to the net assets of the joint arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

The results of operations and assets and liabilities of associates or joint ventures are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate or a joint venture is initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Company's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate or joint venture. When the Company's share of losses of an associate or a joint venture exceeds the Company's interest in that associate or joint venture (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company's net investment in the associate or joint venture) the Company discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Company has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

An investment in an associate or a joint venture is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate or a joint venture. Any excess of the cost of acquisition over the Company's share of the net fair value of identifiable assets and liabilities of the associate or a joint venture recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any

(Lanjutan/Continued)

investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan kepemilikan Perusahaan dari nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi dan liabilitas atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasinya.

Persyaratan dalam PSAK 48 Penurunan Nilai Aset ("PSAK 48"), diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Bila diperlukan, jumlah tercatat investasi (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Perusahaan mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Perusahaan mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 71. Selisih antara jumlah tercatat pada asosiasi atau ventura bersama pada tanggal metode ekuitas dihentikan, dan nilai wajar dari setiap bunga yang ditahan dan dihasilkan dari pelepasan sebagian kepentingan dalam asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pada pelepasan asosiasi atau ventura bersama.

Selanjutnya, Perusahaan mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi atau ventura bersama telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

excess of the Company's share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

The requirements of PSAK 48 Impairment of Assets ("PSAK 48") are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate or a joint venture. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

The Company discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Company retains an interest in the former associate or joint venture and the retained interest is a financial asset, the Company measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 71. The difference between the carrying amount of the associate or joint venture at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part of interest in the associate or joint venture is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate or joint venture.

In addition, the Company accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate or joint venture on the same basis as would be required if that associate or joint venture had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate or joint venture would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

(Lanjutan/Continued)

Perusahaan melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

Jika Perusahaan mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi atau ventura bersama tetapi Perusahaan tetap menerapkan metode ekuitas, Perusahaan mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

Ketika Perusahaan melakukan transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Perusahaan.

Perusahaan menerapkan PSAK 71, termasuk persyaratan penurunan nilai, untuk kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi atau ventura bersama ketika metode ekuitas tidak diterapkan dan yang merupakan bagian dari investasi neto pada *investee*.

Selanjutnya, dalam menerapkan PSAK 71 untuk kepentingan jangka panjang, Perusahaan tidak memperhitungkan penyesuaian nilai tercatat yang disyaratkan oleh PSAK 15 (misalnya, penyesuaian nilai tercatat kepentingan jangka panjang yang timbul dari alokasi kerugian *investee* atau penilaian penurunan nilai berdasarkan PSAK 15).

z. Kepemilikan dalam operasi bersama

Operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

The Company continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

When the Company reduces its ownership interest in an associate or a joint venture but the Company continues to use the equity method, the Company reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

When a Company transacts with an associate or a joint venture, profits and losses resulting from the transactions with the associate or joint venture are recognized in the Company's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate or joint venture that are not related to the Company.

The Company applies PSAK 71, including the impairment requirements, to long-term interests in an associate or joint venture when the equity method is not applied and become part of the net investment in the investee.

Furthermore, in applying PSAK 71 to long-term interests, the Company does not take into account adjustments to their carrying amount required by PSAK 15 (i.e. adjustments to the carrying amount of long-term interests arising from the allocation of losses of the investee or assessment of impairment in accordance with PSAK 15).

z. Interest in joint operations

A joint operation is a joint arrangement where by the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

(Lanjutan/Continued)

Ketika entitas Perusahaan melakukan kegiatan berdasarkan operasi bersama, Grup sebagai operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang menjadi kewajiban bersama;
- Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang ditanggung bersama.

Perusahaan mencatat aset, liabilitas, pendapatan dan beban terkait dengan kepemilikannya dalam operasi bersama sesuai dengan PSAK yang dapat diterapkan untuk aset, liabilitas, pendapatan dan beban tertentu.

Ketika entitas Perusahaan melakukan transaksi dengan operasi bersama di mana entitas Perusahaan tersebut bertindak sebagai salah satu operator bersamanya (seperti penjualan atau kontribusi aset), Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak lain dalam operasi bersama dan, dengan demikian, operator bersama mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam operasi bersama.

Ketika entitas Perusahaan melakukan transaksi dengan operasi bersama di mana entitas Perusahaan tersebut bertindak sebagai salah satu operator bersamanya (seperti pembelian aset), Perusahaan tidak mengakui bagian keuntungan dan kerugiannya sampai Perusahaan menjual kembali aset tersebut kepada pihak ketiga.

aa. Aset keuangan dari proyek dan layanan pengaturan konsesi

Aset keuangan - konsesi jasa yang timbul karena perjanjian konsesi jasa merupakan hak Perusahaan untuk mengakui pendapatan atas konstruksi yang telah dilakukan. Pembangunan infrastruktur ditambah margin tertentu dikapitalisasi sebagai aset keuangan. Akumulasi biaya-biaya konstruksi direklasifikasi sebagai harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi komprehensif Perusahaan pada periode yang bersangkutan. Sedangkan konstruksi yang berkaitan dengan perjanjian konsesi jasa diakui sebagai pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan yang dilakukan ditambah dengan margin.

When is the Company entity undertakes its activities under joint operations, the Company as a joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

- *An assets, including its share of any assets held jointly;*
- *A liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;*
- *A revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;*
- *Its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and*
- *An expenses, including its share of any expenses incurred jointly.*

The Company accounts for the assets, liabilities, revenues and expenses relating to its interest in a joint operation in accordance with the PSAK applicable to the particular assets, liabilities, revenues and expenses.

When a Company entity transacts with a joint operation in which a Company entity is a joint operator (such as a sale or contribution of assets), the Company is considered to be conducting the transaction with the other parties to the joint operation, and gains and losses resulting from the transactions are recognized in the Company's consolidated financial statements only to the extent of other parties' interests in the joint operation.

When a Company entity transacts with a joint operation in which a Company entity is a joint operator (such as a purchase of assets), the Company does not recognize its share of the gains and losses until it resells those assets to a third party.

aa. Financial assets from concession project and service concession arrangements

Financial assets - service concession arising from service concession arrangement is the right of the Company to recognize revenue on construction that has been done. Infrastructure development plus a certain margin capitalized as financial assets. Accumulated construction costs reclassified as cost of goods sold in the Company's statement of comprehensive income in the period in question. While construction related to service concession agreements are recognized as revenue based on the percentage of work completion plus a margin.

(Lanjutan/Continued)

PPA (Catatan 34) antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Perusahaan memenuhi definisi perjanjian konsesi jasa di mana PT PLN (Persero) bertindak sebagai grantor dan Perusahaan bertindak sebagai operator. Perusahaan setuju untuk merancang, keuangan, membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik tenaga batu bara ("infrastruktur") dan menjual ke PT PLN (Persero) kekuatan yang dihasilkan pada syarat dan kondisi yang disepakati dalam PPA. Infrastruktur yang digunakan untuk seluruh masa pakainya yang berguna untuk tujuan perjanjian konsesi jasa.

Perusahaan tidak mengakui penjualan kapasitas listrik, tetapi mengakui pendapatan keuangan (melalui aset keuangan) dan pendapatan dari layanan operasi (Bahan Bakar dan O & M pendapatan).

Perusahaan menghitung kewajiban kontraktual untuk memelihara atau memulihkan infrastruktur dioperasikan pabrik sebagai beban pada periode terjadinya.

bb. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut

The PPA (Notes 34) between PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and the Company meets the definition of a service concession arrangement where PT PLN (Persero) acts as a grantor and the Company acts as the operator. The Company agrees to design, finance, construct, own and operate a coal-fired power generating facility (the "infrastructure") and sell to PT PLN (Persero) the power generated there fore on terms and conditions as agreed in the PPA. The infrastucture is used for its entire useful life for the purpose of the service concession arrangement.

The Company does not recognize sale of electrical capacity, but recognizes financial revenue (through the financial asset) and revenue from operation service (Fuel and O & M revenue).

The Company accounts for the contractual obligations to maintain or restore the infrastucture in the plant operations as expense in the period they are incurred.

bb. Provision

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINITY

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Notes 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period

(Lanjutan/Continued)

direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan sesuai PSAK 25

Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan, dan kesalahan dalam mencatat, dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan, atau kesalahan penggunaan, informasi andal yang:

- a. Tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut; dan
- b. Secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan.

Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilakukan. Untuk suatu periode sebelumnya tertentu, tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan atau penyajian kembali retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika:

- a. Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan;
- b. Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode sebelumnya tersebut; atau
- c. Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang:
 - 1) Menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal disaat jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; dan
 - 2) Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya diselesaikan dengan informasi lain.

which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical considerations in the application of accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in notes 3, there are no critical judgment that has a significant impact on the amounts recognized financial statements.

Accounting policies, changes in accounting estimate and errors according to PSAK 25

The error of the previous period is the omission to include, and errors in the records, in the entity's financial statements for one or more prior periods arising from a failure to use, or misuse reliable information that:

- a. *Available when the completion of the financial statement for such period; and*
- b. *Rationally expected to be obtained and used in the preparation and presentation of financial statement. Such errors include the impact of errors of mathematical calculations, error of the application in accounting policy, error or misinterpretation of facts and fraud.*

The adoption of an arrangement is not practical when the entity cannot apply it after the whole erational business done. For a period previously specified, it is not practical to apply a change in accounting policy retrospectively or serves or restatement of the retrospective to correct an error if:

- a. *The impact of application of retrospective or restatement of the retrospective can not be done;*
- b. *The application of retrospective or restatement of the retrospective requires an assumption about the intent of management that exist in the previous period; or*
- c. *The application of retrospective or restatement of the retrospective requires significant estimates on the amount and it is impossible to distinguish objectively information about the estimation:*
 - 1) *Provides evidence of circumstances that existed on the date when such amounts recognized, measured or disclosed; and*
 - 2) *Available when the financial statement of the previous period is resolved with other information.*

(Lanjutan/Continued)

Sumber estimasi ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mungkin mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan, dijelaskan dibawah ini:

Rugi penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang

Perusahaan menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 16.

Penurunan nilai goodwill

Menentukan apakah suatu goodwill turun nilainya mengharuskan estimasi nilai pakai unit penghasil kas dimana goodwill dialokasikan. Perhitungan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk mengestimasi arus kas masa depan yang diharapkan timbul dari unit penghasil kas yang menggunakan tingkat pertumbuhan yang tepat dan tingkat diskonto yang sesuai untuk perhitungan nilai kini. Dimana aktual arus kas masa depan kurang dari yang diharapkan, kerugian penurunan nilai material mungkin timbul.

Key sources of estimation uncertainty

The principal assumptions regarding the future and other sources of estimates at the end of the reporting period, which have significant risks that may result in material adjustments to the carrying amount of assets and liabilities in the reporting period, are described below:

Impairment loss on loans and receivables

The Company assesses its loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss.

Estimated useful lives of property and equipment

The useful life of each item of the Company's property and equipment, are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment and would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets.

The carrying values of property, plant and equipment are disclosed in Notes 16.

Impairment of goodwill

Determining whether goodwill is impaired requires an estimation of the value in use of the cash generating units to which goodwill has been allocated. The value in use calculation requires the management to estimate the future cash flows expected to arise from the cash-generating unit using an appropriate growth rate and a suitable discount rate in order to calculate present value. Where the actual future cash flows are less than expected, a material impairment loss may arise.

(Lanjutan/Continued)

Pengakuan pendapatan konsesi jasa dari konstruksi

Perusahaan mengakui pendapatan konsesi jasa dari konstruksi berdasarkan nilai beban konstruksi ditambah marjin tertentu. Marjin ditentukan berdasarkan estimasi penilaian pasar untuk proyek yang serupa.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam Penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Pajak tangguhan dari perbedaan antara pendapatan dari entitas asosiasi dan dividen yang diterima dari entitas asosiasi telah diakui karena manajemen tidak dapat mengontrol distribusi dividen dan transaksi permodalan lainnya dan laba kena pajak sulit untuk diestimasi.

The recognition of revenue from construction service concession

The Company recognizes revenue from construction service concession based on the value of construction load plus a certain margin. Margins are determined based on estimates of the market for similar projects.

Determination of functional currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the entity operates. The management considered the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

Income tax

The calculation of income tax expense the Company requires judgement and assumptions in determining the specific load reduction during the estimating process. All management judgement and estimates are made questionable by the Directorate General of Taxation. As a result, there is uncertainty in the determination of tax. Resolution of tax positions taken by the Company, through negotiation with the relevant tax authorities can last for years and are very difficult to predict the outcome. If there are differences in the calculation of the tax amount already recorded, such differences will impact the income tax and deferred tax year in which the determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses and temporary differences are recognized if it is considered more likely than not that they can be readmitted, where this depends on the adequacy of the formation of the taxable income in the future. Assumed the formation of the taxable income is strongly influenced by management estimates and assumptions on the level of sales and related costs that there is a risk of uncertainty, so that there is the possibility of changes in estimates and assumptions will change the projected taxable income in the future.

Deferred tax on the difference between income from associates and dividends received from the associate has been recognized since management can not control the distribution of dividends and other capital transactions also taxable income is difficult to estimate.

(Lanjutan/Continued)

Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

The carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.

Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area

Liability of asset abandonment and site restoration obligations

Perusahaan mengakui provisi untuk liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area terkait dengan sumur minyak dan gas bumi, area tambang batu bara, dan fasilitas dan infrastruktur terkait. Dalam menentukan nilai provisi, asumsi dan estimasi yang diperlukan adalah tingkat diskonto dan biaya yang diharapkan untuk membongkar dan memindahkan semua peralatan dari daerah pengeboran dan restorasi area.

The Company has recognized provision for asset abandonment and site restoration obligations associated with its oil and gas wells, facilities and infrastructure. In determining the amount of the provision, assumptions and estimates are required in relation to discount rates and the expected cost to dismantle and remove all the structures from the site and restore the site.

Estimasi cadangan

Reserve estimates

Cadangan minyak dan gas bumi terbukti adalah perkiraan jumlah minyak mentah dan gas alam yang berdasarkan data geologis dan teknis dapat diambil dengan tingkat kepastian yang memadai ditahun-tahun mendatang dari cadangan yang ada berdasarkan kondisi ekonomi dan operasi yang sekarang ada, misalnya terkait dengan harga dan biaya pada tanggal estimasi tersebut dibuat. Cadangan terbukti meliputi:

Proved oil and gas reserves are the estimated quantities of crude oil and natural gas which geological and engineering data demonstrate with reasonable certainty to be recoverable in future years from known reservoirs under existing economic and operating conditions. Proved reserves include:

1. Cadangan terbukti yang belum dikembangkan: jumlah hidrokarbon yang diharapkan dapat diambil setelah adanya pengeboran, fasilitas dan metode operasi baru.
2. Cadangan terbukti yang belum dikembangkan: jumlah hidrokarbon yang diharapkan dapat diambil setelah adanya pengeboran, fasilitas dan metode operasi baru.

1. *Undeveloped proved reserves: amounts of hydrocarbons that are expected to be retrieved following new drilling, facilities and operating methods.*
2. *Undeveloped proved reserves: amounts of hydrocarbons that are expected to be retrieved following new drilling, facilities and operating methods.*

Akurasi dari cadangan terbukti tergantung pada sejumlah faktor, asumsi dan variabel seperti: kualitas data geologi, teknis dan ekonomi yang tersedia beserta interpretasi dan pertimbangan terkait, hasil pengeboran, pengujian dan produksi setelah tanggal estimasi, kinerja produksi reservoir, teknik produksi, proyeksi tingkat produksi di masa mendatang, estimasi besaran biaya dan waktu terjadinya pengeluaran pengembangan, ketersediaan pasar komersial, harga komoditi yang diharapkan dan nilai tukar.

The accuracy of proved reserve estimates depends on a number of factors, assumptions and variables such as: the quality of available geological, technical and economic data, results of drilling, testing and production after the date of the estimates, the production performance of the reservoirs, production techniques, projecting future rates of production, the anticipated cost and timing of development expenditures, the availability for commercial market, anticipated commodity prices and exchange rates.

Karena asumsi ekonomis yang digunakan untuk mengestimasi cadangan berubah dari waktu ke waktu dan tambahan data geologi yang dihasilkan selama operasi, estimasi cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Perusahaan dalam berbagai cara, diantaranya:

As the economic assumptions used to estimate reserves change from year to year, and additional geological data are generated during the course of operations, estimates of reserves may change from year to year. Changes in reported reserves may affect the Company financial results and financial position in a number of ways, including:

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- | | |
|---|---|
| <p>1. Penyusutan dan amortisasi yang ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika masa manfaat ekonomi sumur aset berubah.</p> <p>2. Provisi biaya pembongkaran, restorasi lokasi aset dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.</p> | <p>1. Depreciation and amortization which are determined on a unit of production basis, or where the useful economic lives of assets change.</p> <p>2. Decommissioning, site restoration and environmental provision may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.</p> |
|---|---|

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
<u>Kas</u>			<u>Cash on Hand</u>
Rupiah	82.296.372	149.880.196	Rupiah
<u>Bank</u>			<u>Banks</u>
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	7.757.563.996	2.004.877.501	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Bukopin, Tbk	204.307.095	3.486.485	PT Bank Bukopin, Tbk
PT HSBC Indonesia	27.102.379	-	PT HSBC Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	2.783.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT BNI (Persero), Tbk	275.000	875.000	PT BNI (Persero), Tbk
<u>USD</u>			<u>USD</u>
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	13.177.439.958	3.756.062.921	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT HSBC Indonesia	60.065.805	167.916.786	PT HSBC Indonesia
PT Bank Bukopin, Tbk	11.083.881	11.455.799	PT Bank Bukopin, Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	3.709.939	4.936.750	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
Jumlah Bank	21.244.331.053	5.949.611.242	Total Banks
Dikurangi Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(21.664.829)	(5.035.007)	Less Allowance of expected credit loss
Jumlah Bank - Bersih	21.222.666.224	5.944.576.235	Total Bank - Net
<u>Deposito</u>			<u>Time Deposit</u>
Rupiah			Rupiah
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	5.022.438.356	-	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
PT Bank Bukopin, Tbk	50.000.000	50.000.000	PT Bank Bukopin, Tbk
Jumlah Deposito	5.072.438.356	50.000.000	Total Deposito
Dikurangi Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(82.048.216)	(825.030)	Less Allowance Expected Credit Loss
Jumlah Deposito - Bersih	4.990.390.140	49.174.970	Total Deposito - Net
Jumlah	26.295.352.736	6.143.631.401	Total
Jangka waktu deposito berjangka Rupiah	<u>1 bulan/month</u>		Rupiah time deposits period
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah	5,5 % dan 4,5 % per tahun/per annum		Annual interest rate of Rupiah time deposits

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

6. PIUTANG USAHA

Merupakan piutang usaha kepada PT Pertamina (Persero) atas tagihan lifting minyak PT OEKA (entitas anak) pada tahun 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp.10.380.420.002 dan Rp.3.090.579.179.

6. TRADE ACCOUNT RECEIVABLES

Represents trade receivables to PT Pertamina (Persero) for oil lifting claims of PT OEKA (subsidiary) in 2021 and 2020, amounting to Rp.10.380.420.002 and Rp.3.090.579.179, respectively.

7. ASET KEUANGAN ATAS PROYEK KONSESI

	31 Desember/ December 31, 2021
Saldo awal	219.254.000.000
Penambahan: Pendapatan bunga dari jasa konsesi	-
Pengurangan: Penurunan nilai	(24.541.000.000)
Penerimaan dari PLN	-
Saldo Akhir	194.713.000.000
Dikurangi bagian lancar piutang usaha - aset keuangan atas jasa konsesi telah difaktur	-
Belum difaktur	-
Jumlah Bagian Lancar	-
Bagian Tidak Lancar	194.713.000.000

Akun ini merupakan nilai aset keuangan atas proyek konsesi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lampung 2x6 MW sehubungan dengan pembayaran kapasitas minimum masa depan kepada PT PLN (Persero) yang tercantum dalam PPA yang telah diklasifikasikan sebagai aset keuangan sebagai hasil penerapan ISAK 16 sesuai dengan berita acara COD tanggal 2 Mei 2014.

Perusahaan menelaah secara berkala atas jumlah nilai tercatat aset keuangan konsesi dan memastikan bahwa jumlah nilai tercatatnya tidak melebihi nilai wajar, berdasarkan laporan penilai independen yang telah teregistrasi di OJK, KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan pada tanggal 28 Januari 2022, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan nomor izin No. 2.09.0074 dan OJK dengan No. STTD.PPB- 10/PM.2/2018.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai

	31 Desember/ December 31, 2021
Saldo awal tahun	24.874.811.619
Pengakuan kerugian penurunan Piutang	24.541.000.000
Jumlah	49.415.811.619

7. FINANCIAL ASSET FOR CONCESSION PROJECT

	31 Desember/ December 31, 2020	
	238.227.745.563	<i>Beginning balance</i>
		<i>Additions:</i>
	1.578.809.568	<i>Interest revenue from service concession</i>
		<i>Less:</i>
	(10.871.720.772)	<i>Impairment</i>
	(9.680.834.359)	<i>Received from PLN</i>
	219.254.000.000	<i>Ending Balance</i>
		<i>Less current portion</i>
	-	<i>trade receivables - financial sset for concession project</i>
	24.825.080.634	<i>Unbilled</i>
	24.825.080.634	<i>Total Current Portion</i>
	194.428.919.366	<i>Non Current Portion</i>

This account represents financial assets for the concession project of Coal Fired Power Plant (PLTU) Central Lampung 2x6 MW in relation with the future minimum capacity payments to PT PLN (Persero) listed in PPA that have been classified as financial asset as a result of adoption of ISAK 16 based on the COD official report dated on May 2, 2014.

The Company regularly reviewed the carrying amount of concession financial asset and ensured that the carrying amount not exceed the fair value. Based on independent appraisal report registered in OJK, KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan dated January 28, 2022, an independent appraiser registered in the Ministry of Finance with license number No. 2.09.0074, and OJK No. STTD.PPB-10/PM.2/2018.

Movement in the allowance for impairment losses

	31 Desember/ December 31, 2020	
	14.003.090.847	<i>Balance at beginning of year</i>
	10.871.720.772	<i>Impairment losses recognized on receivables</i>
	24.874.811.619	<i>Total</i>

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang kepada pihak ketiga adalah cukup.

Management believes that the allowance for impairment losses from third parties is adequate.

Selama tahun 2021 PT SDP tidak melakukan produksi listrik, selain terdampak Covid-2019, nilai penggantian komponen C Perusahaan dari PT PLN (Persero) tidak sebanding dengan nilai perolehan batubara PT SDP, penyesuaian tarif komponen C tersebut saat ini dalam proses amandedem. (lihat catatan 35).

During 2021 PT SDP does not produce electricity, apart from being affected by Covid-2019, the replacement value of the Company's C component from PT PLN (Persero) is not comparable to the acquisition value of PT SDP's coal, the adjustment of the tariff for component C is currently in the amendment process. (see note 35).

8. PIUTANG LAIN-LAIN

8. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
PT Sa Ary Indoraya	-	77.651.480.000	PT Sa Ary Indoraya
PT PP (Persero) Tbk Div EPC	27.404.284.730	43.454.622.444	PT PP (Persero) Tbk Div EPC
PT Meulaboh Power Generation	27.986.000.000	27.986.000.000	PT Meulaboh Power Generation
PT Inpolo Meka Energi	30.464.466.667	26.960.000.000	PT Inpolo Meka Energi
Karyawan	215.373.845	219.858.292	Employees
Jumlah	86.070.125.242	176.271.960.736	Total
Dikurangi Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(13.704.915.615)	(13.639.611.210)	Less Allowance of expected credit loss
Jumlah	72.365.209.627	162.632.349.526	Total

Piutang kepada PT Sa Ary Indoraya merupakan piutang atas penjualan saham PT MDP sebesar 86% dari jumlah saham, sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 27 Desember 2019 dan Akta jual beli tanggal 17 Februari 2020.

Receivable to PT Sa Ary Indoraya represents receivable of PT MDP's shares sales amounted 86% of total shares, in accordance with Conditional Share Sale and Purchase Agreement dated December 27, 2019 and the Deed of sale and purchase dated February 17, 2020.

Berdasarkan Surat Permohonan Jadwal Pembayaran Atas Pengambilalihan Saham PT MDP No. Ref:002/SK/SAI/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021, dan Surat Jawaban Permohonan Penyesuaian Jadwal Pembayaran atas pengambilalihan saham PT MDP no. 355/EXT/DFPM/PPE/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021. Perusahaan sepakat pelunasan atas pengambilalihan saham PT MDP akan dilunasi hingga Desember 2023.

Based on the Request for Payment Schedule for the Acquisition of PT MDP Shares No. Ref: 002/SK/SAI/XII/2021 dated December 6, 2021, and the Answer to the Request for Adjustment of the Payment Schedule for the acquisition of PT MDP shares no. 355/EXT/DFPM/PPE/XII/2021 dated December 14, 2021. The company agreed that the settlement of the takeover of PT MDP's shares will be paid in full until December 2023.

Pada tahun 2021 piutang lain-lain kepada PT Sa Ary Indoraya direklasifikasi menjadi piutang lain-lain jangka panjang.

on 2021 other receivables from PT Sa Ary Indoraya were reclassified into other long-term receivables.

Piutang kepada PT Meulaboh Power Generation merupakan piutang modal kerja tanpa jaminan dan dikenakan bunga sebesar 9,5%, sesuai Addendum no. 2 perjanjian pinjam meminjam No. 419A/PPM/PPE-MPG-XII/2019 tanggal 20 November 2021 dengan jangka waktu pinjaman yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2022.

PT Meulaboh Power Generation's receivable represent unsecured working capital receivables and bear interest at 9,5%, according to Addendum no. 2 of the loan agreement No. 419A/PPM/PPE-MPG-XII/2019 date November 20, 2021 with a loan term that will mature at December 20, 2022.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Piutang lain-lain kepada PT Inpola Meka Energi merupakan piutang pinjaman modal kerja tanpa jaminan untuk kegiatan operasional, dengan tingkat bunga sebesar 12%, dan jangka waktu selama satu tahun sampai dengan tanggal 10 Desember 2022.

Other receivable from PT Inpola Meka Energi represent unsecured working capital loans for operational activities, with an interest rate of 12%, and a period of one year until December 10, 2022.

Piutang lain-lain kepada karyawan merupakan pinjaman karyawan PT OEKA, tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga dan dipotong dari pembayaran gaji setiap bulannya.

Other receivables to employees represent loans of PT OEKA employees, unsecured and not subject to interest and deducted from monthly salary payments.

Piutang kepada PT PP (Persero) Tbk Divisi EPC merupakan piutang atas klaim biaya operasi Perusahaan.

Receivable to PT PP (Persero) Tbk EPC Division represents receivable for claims for operating expenses.

9. PERSEDIAAN

Merupakan persediaan batubara dan solar PT SDP (entitas anak) untuk bahan bakar PLTU 2X6 MW di Lampung Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 yang terdiri dari:

9. INVENTORIES

Represent inventory of coal and diesel fuel of PT SDP (subsidiary) for PLTU 2X6 MW fuel at Central Lampung as of December 31, 2021 and 2020 which consist of:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Batubara	171.344.300	538.882.900	Coal
Suku cadang	193.314.000	377.205.400	Sparepart
Solar	3.600.000	4.950.000	Diesel fuel
Jumlah	368.258.300	921.038.300	Total Inventory

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi fisik dan nilai realisasi neto dari persediaan pada tanggal 31 Desember 2021, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat keusangan dan penurunan nilai persediaan.

Based on the review of the physical condition and net realizable values of inventories as of December 31, 2021, management believes that there is no obsolescence and decline in inventories.

10. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2021
Uang muka proyek	5.892.633.520
Uang muka pemasok	1.130.811.774
Dana kerja	683.273.017
Asuransi	221.504.580
Bonus peralatan	142.690.050
Sewa gedung	-
Jumlah	8.070.912.941

Uang muka proyek merupakan uang muka atas pembayaran paket diesel engine generator di PT Odira Energi Karang Agung terkait pekerjaan *work over* sumur minyak per 31 Desember 2021 dan 2020.

10. PREPAID EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2020	
	8.817.489.986	Project advance
	4.807.660.797	Vendor advance
	675.419.857	Working fund
	187.733.288	Insurance
	141.050.050	Equipment bonus
	191.540.733	Rent advance
Jumlah	14.820.894.711	Total

Project advances represent advances for diesel engine generator payments packages at PT Odira Energi Karang Agung related to work over oil wells as of December 31, 2021 and 2020.

Uang muka pemasok merupakan uang muka atas pekerjaan, pembelian batubara di PT Sepoetih Daya Prima (entitas anak) dan beban-beban yang dibayarkan terkait pelaksanaan proyek di PT Mahkota Dinamika Niaga (entitas anak) per 31 Desember 2021 dan 2020.

Vendor advance represent advance fund of project, on coal purchases in PT Sepoetih Daya Prima (subsidiary) and expenses paid related to the implementation of the project in PT Mahkota Dinamika Niaga (subsidiary) as of December 31, 2021 and 2020.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Dana kerja merupakan dana yang dibayarkan ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) di PT Odira Energy Karang Agung (entitas anak) sesuai dengan ketentuan pasal 5.3.3. kontrak bagi hasil. Jumlah dana kerja minimal yang harus ada sebelum pembahasan program kerja tahunan adalah USD 75.000.

Working fund represent funds paid to Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities Republic of Indonesia (SKK MIGAS) in PT Odira Energy Karang Agung (subsidiary) in accordance with article 5.3.3. production sharing contracts. Minimum amount of working fund that must exist before the discussion of the annual work program is USD 75,000.

Asuransi dibayar dimuka merupakan asuransi yang dibayarkan kepada PT Asuransi Jasindo terhadap Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) per 31 Desember 2021 di PT OEKA (entitas anak) dan asuransi atas alat berat yang dibayarkan kepada PT Surya Artha Nusantara Finance per 31 Desember 2020 di PT Sepoetih Daya Prima (entitas anak).

Prepaid insurance represent insurance payment paid to PT Asuransi Jasindo on Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities Republic of Indonesia (SKK MIGAS) as of December 31, 2021 in PT OEKA (subsidiary) and insurance of heavy equipment paid to PT Surya Artha Nusantara Finance as of December 31, 2020 in PT Sepoetih Daya Prima (subsidiary).

Biaya bonus peralatan adalah biaya yang dibayarkan PT Odira Energy Karang Agung (entitas anak) kepada Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan hak pengelolaan migas di blok Karang Agung sesuai dengan ketentuan Kontrak Bagi Hasil pasal 8.2 yaitu bonus peralatan. Pengakuan biaya bonus seluruhnya pada saat produksi minyak tercapai dalam satu tahun penuh.

Equipment bonus costs are fees paid by PT Odira Energy Karang Agung (subsidiary) to the Government of Indonesia to acquire management rights Karang Agung block oil and gas in accordance with the provisions of the Production Sharing Contract on clause 8.2 is equipment bonus. Recognition bonus expense entirely of petroleum production is reached in a full year.

11. PERPAJAKAN

11. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
PPN Masukan	78.586.644.397	77.179.193.357	
PPH Pasal 22	703.289.729	703.289.729	VAT In
PPH Pasal 25	7.386.505	7.386.505	Income Tax Article 22
Jumlah	79.297.320.631	77.889.869.591	Income Tax Article 25
			Total

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Pajak Penghasilan:			Income Tax:
Pasal 21	1.875.511.580	4.587.015.257	Article 21
Pasal 22	228.920.233	228.920.233	Article 22
Pasal 23	2.802.453.296	3.255.937.206	Article 23
Pasal 4 Ayat 2	51.538.266	87.106.909	Article 4 (2)
Pasal 26	40.000.000	40.000.000	Article 26
PPN Keluaran	14.705.671.291	15.347.674.035	VAT Out
SKP dan STP	722.396.927	355.148.335	SKP and STP
Jumlah	20.426.491.593	23.901.801.975	Total
Terdiri dari:			Consist of:
Perusahaan	32.786.277	24.780.953	The Company
Entitas anak	20.393.705.316	23.877.021.022	Subsidiaries
Jumlah	20.426.491.593	23.901.801.975	Total

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

c. Pajak penghasilan badan

Rincian beban pajak adalah sebagai berikut:

c. Corporate income tax

The details of tax expense are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
Pajak kini:			Current tax:
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	-	-	Subsidiaries
Sub Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	Sub Total
Pajak tangguhan:			Deferred tax:
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	-	-	Subsidiaries
Sub Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	Sub Total
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	Total
	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
Laba sebelum pajak			Profit before tax
Konsolidasian	(115.544.925.095)	(31.982.745.018)	Consolidated
Penyesuaian Konsolidasi	27.011.095.673	26.169.006.536	Consolidation Adjustment
Entitas anak:			Subsidiaries:
PT Sepoetih Daya Prima	(44.179.201.845)	(38.417.789.210)	PT Sepoetih Daya Prima
PT Odira Energy Karang Agung	101.087.159.988	66.428.907.033	PT Odira Energy Karang Agung
PT Mahkota Dinamika Niaga	(2.866.248.046)	(5.127.278.278)	PT Mahkota Dinamika Niaga
Perusahaan	<u>(196.597.730.865)</u>	<u>(81.035.591.099)</u>	The Company
Beda tetap:			Fixed different:
Beban pegawai	10.512.973.457	14.778.071.642	Employees expense
Beban umum	3.004.247.512	2.715.092.570	General expense
Beban penyusutan	148.666.112	816.066.530	Depreciation expense
Beban pemasaran	471.192.162	69.819.934	Marketing expense
Pendapatan bunga	(5.234.508.264)	(60.826.964)	Interest income
Beban administrasi bank	14.911.578	10.990.733	Foreign exchange
Selisih kurs	1.007.067	13.318.657	Bank charges expense
Rugi entitas asosiasi	3.739.732.512	3.029.568.851	Loss from associated Company
Beban bunga aset hak guna	7.076.514	78.429.607	Interest expenses on use rights assets
Beban lain-lain	183.932.432.215	59.585.059.539	Others expense
Laba (Rugi) Fiskal Tahun Berjalan	<u>-</u>	<u>-</u>	Profit (Loss) Fiscal Current Year
Akumulasi Laba (Rugi) Fiskal - Akhir Tahun	<u>-</u>	<u>-</u>	Accumulated Profit (loss) Fiscal - Ending of Year
Beban pajak kini:			Current tax expense:
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak:			Subsidiaries:
PT Sepoetih Daya Prima	-	-	PT Sepoetih Daya Prima
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	Total
Dikurangi - Uang muka PPh:			Less - Income tax advance:
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak:			Subsidiaries:
PT Sepoetih Daya Prima	710.676.234	710.676.234	PT Sepoetih Daya Prima
Jumlah	<u>710.676.234</u>	<u>710.676.234</u>	Total
Pajak penghasilan badan kurang (lebih) bayar	<u>(710.676.234)</u>	<u>(710.676.234)</u>	Corporate income tax under (over) Payment

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Perusahaan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

The corporate income tax calculation for the year ended in December 31, 2021, is a preliminary estimation made for accounting purpose and subject to revision when the Company submit its Annual Corporate Income Tax Return.

(Lanjutan/Continued)

Jika terdapat perbedaan antara laba kena pajak yang diakui sebelumnya dengan jumlah yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dicatat sebagai penyesuaian tahun sebelumnya dan diakui pada tahun berjalan saat SPT dilaporkan.

If there is a difference between the previously recognized taxable profit and the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) it is recorded as an adjustment for the previous year and is recognized in the current year when the SPT was reported.

Pajak tangguhan

Deferred tax

Perusahaan dan entitas anak tidak memperhitungkan manfaat (beban) pajak tangguhan dan aset (liabilitas) pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dikarenakan belum ada keyakinan memadai akan terpulihkan dimasa yang akan datang.

The Company and subsidiaries does not take into account the deferred tax benefits (expenses) and deferred tax assets (liabilities) for the years ended December 31, 2021 and 2020 because there is no sufficient assurance that they will be recovered in the future.

d. Surat ketetapan pajak

d. Tax assessments

PT SDP

PT SDP

Tahun fiskal 2019

2019 Fiscal year

Pada 13 Juli 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dan pasal 25 untuk masa pajak Januari - Desember 2019 senilai Rp.344.214.539. SKPLB atas PPh 22 untuk masa pajak Januari - Desember 2019 senilai Rp.251.268.796 dan PPh 25 untuk masa pajak Januari - Desember 2019 senilai Rp.92.945.743. Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak Januari-Desember 2019 senilai Rp.428.784.524. Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk masa pajak Januari-Desember 2019 senilai Rp.2.641.117. Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 untuk masa pajak Januari-Desember 2019 senilai Rp.115.405.043. Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat 2 untuk masa pajak Januari-Desember 2019 senilai Rp.30.979.942.

On July 13, 2021, the Company received a tax assessment letter ("SKPLB") on Income Tax (PPh) article 22 and article 25 for the tax period January - December 2019 amounting to Rp.344,214,539. SKPLB on PPh 22 for the January - December 2019 tax period of Rp.251,268,796 and PPh 25 for the January - December 2019 tax period of Rp.92,945,743. The Company received a Tax Underpayment Assessment ("SKPKB") for Value Added Tax (VAT) for the tax period January-December 2019 amounting to Rp.428,784,524. The Company received an underpaid tax assessment letter ("SKPKB") for Income Tax (PPh) article 21 for the tax period January-December 2019 amounting to Rp.2,641,117. The Company received an underpaid tax assessment letter ("SKPKB") for Income Tax (PPh) article 23 for the tax period January-December 2019 amounting to Rp.115,405,043. The Company received an underpaid tax assessment letter ("SKPKB") for the final Income Tax (PPh) article 4 paragraph 2 for the tax period January-December 2019 in the amount of Rp.30,979,942.

PT OEKA

PT OEKA

Pada tahun 2021 dan 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 23, pasal 4 (2), pasal 26 (4), dan PPN untuk masa pajak Januari-Desember 2019. Dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 23, pasal 4 (2) untuk masa pajak Januari-Desember 2015, 2016, dan 2017, dengan rincian sebagai berikut:

In 2021 and 2020, the Company received an underpaid tax assessment letter ("SKPKB") on Income Tax (PPh) article 21, article 23, article 4 (2), article 26 (4), and VAT for the January-December tax period. 2019. And the Underpaid Tax Assessment ("SKPKB") on Income Tax (PPh) article 21, article 23, article 4 (2) for the tax period January-December 2015, 2016, and 2017, with details as follows:

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	2019	2017	2016	2015	
PPh 21	-	(2.353.608.485)	(2.654.477.295)	(2.268.878.654)	PPh 21
PPh 23	(235.890.427)	(69.984.645)	(39.184.604)	(140.372.204)	PPh 23
PPh 4 (2)	(108.398.800)	(399.530.000)	(159.708.000)	(97.932.250)	PPh 4 (2)
PPN	(63.527.683)	-	-	-	PPN
Jumlah	(407.816.910)	(2.823.123.130)	(2.853.369.899)	(2.507.183.108)	Total

12. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK BERELASI

12. OTHER RECEIVABLES - RELATED PARTIES

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
PT Muba Daya Pratama	259.058.240.411	169.586.638.905	PT Muba Daya Pratama
PT Sa Ary Indoraya	75.571.480.000	-	PT Sa Ary Indoraya
Surya Mina Asinusa – KSO	2.225.311.049	2.225.311.048	Surya Mina Asinusa - KSO
PT Asinusa Putra Sekawan	438.457.014	438.457.014	PT Asinusa Putra Sekawan
Alm. Bapak Rahardjo	5.000.000.000	5.000.000.000	Alm. Mr. Rahardjo
Jumlah	342.293.488.474	177.250.406.967	Total
Penyisihan piutang			Allowance for accounts receivable
Alm. Bapak Rahardjo	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)	of Alm. Mr. Rahardjo
Dikurangi cadangan			Less allowance
kerugian kredit ekspektasian	(94.346.171.177)	(62.851.207.828)	expected credit loss
Jumlah	242.947.317.297	109.399.199.139	Total

Piutang kepada PT Muba Daya Pratama (MDP) merupakan piutang modal kerja per 31 Desember 2019 yang diberikan kepada PT MDP sejak tahun 2016, pada saat PT MDP masih menjadi entitas anak Perusahaan, setelah di kurangi utang PT OEKA (entitas anak) kepada PT MDP berdasarkan surat berita acara kesepakatan antara PT OEKA dan PT MDP pada tanggal 30 September 2021.

Receivables to PT Muba Daya Pratama (MDP) represent working capital receivables as of December 31, 2019 given to PT MDP since 2016, when PT MDP was still as a subsidiary of the Company, after deducting the payables of PT OEKA (subsidiary) to PT MDP based on the letter of agreement between PT OEKA and PT MDP dated September 30, 2021.

Piutang kepada PT Sa Ary Indoraya merupakan piutang atas pengambilalihan saham PT MDP pada tahun 2019 (lihat Catatan 8).

Receivables from PT Sa Ary Indoraya represent receivables from the acquisition of shares of PT MDP in 2019 (see Note 8).

Piutang kepada Bapak Rahardjo Moecharar merupakan pemberian pinjaman kepada pemegang saham sesuai Berita Acara Kesepakatan Bersama dengan PT SDP tanggal 28 Desember 2012.

Receivable to Mr. Rahardjo Moecharar was the granting of loans to shareholders in accordance to Minutes of Mutual Agreement with PT SDP dated December 28, 2012.

Pada tanggal 5 September 2014, Bapak Rahardjo Moecharar telah meninggal dunia dan tidak ditemukan kata sepakat dengan ahli waris atas pengembalian piutang tersebut atas hal tersebut manajemen berkesimpulan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagihkan dan melakukan penyisihan atas seluruh piutang tersebut.

On September 5, 2014, Mr. Rahardjo Moecharar has passed away and an agreement was not found with heir for the repayment of debt, for that management concludes that receivable cannot be collected and makes allowance of the entire receivables.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan piutang lain-lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain-lain di kemudian hari.

Management believes that allowance for impairment losses is adequate to cover possible loss from uncollectible other receivables in the future.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Rincian saldo investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
Investasi pada entitas asosiasi	40.433.671.321	44.173.403.833	<i>Investment in associates</i>
Investasi ventura bersama	50.078.892.647	44.162.889.949	<i>Investment in joint ventures</i>
Jumlah	<u>90.512.563.968</u>	<u>88.336.293.782</u>	Total

a. Investasi pada entitas asosiasi

<u>Nama/ Name</u>	<u>Domisili/ Domicile</u>	<u>Jenis Usaha/ Type of Business</u>	<u>Awal Operasi Komersial/ Start Commercial Operation</u>	<u>Persentase Penyertaan/ Percentage of Participation</u>
PT Inpola Meka Energi	Jakarta	Ketenagalistrikan/ <i>Electricity</i>	2008	38,77%

Rincian investasi entitas asosiasi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
PT Inpola Meka Energi	40.433.671.321	44.173.403.833	<i>PT Inpola Meka Energi</i>

PT Inpola Meka Energi

Perusahaan memiliki saham sebesar 38,77% pada PT Inpola Meka Energi dengan nilai perolehan Rp.49.664.500.000, berdasarkan Notaris Karin Christiana Basoeki, S.H., No. 61 tanggal 29 Maret 2019.

Mutasi investasi pada entitas asosiasi PT Inpola Meka Energi adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
Saldo awal	44.173.403.833	47.202.972.684	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	-	-	<i>Addition</i>
Penyesuaian bagian laba (rugi) tahun sebelumnya	-	-	<i>Adjustment of the previous year's profit (loss)</i>
Bagian laba (rugi) tahun berjalan	<u>(3.739.732.512)</u>	<u>(3.029.568.851)</u>	<i>Share of current year's profit (loss)</i>
Saldo akhir	<u>40.433.671.321</u>	<u>44.173.403.833</u>	<i>Ending balance</i>

b. Investasi pada ventura bersama

Pada tanggal 24 Juli 2018, PT Surya Mina Bunkerindo (SMB), anak usaha dari PT Mahkota Dinamika Niaga melakukan investasi kerja sama operasi dengan nama Surya Mina Asinusa KSO sebesar Rp.6.834.400.000. Atas investasi tersebut, SMB berhak atas sebesar 80% sesuai dengan Akta

13. INVESTMENTS IN ASSOCIATES COMPANY AND JOINT VENTURES

The details of investments in associates and joint ventures are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
	44.173.403.833	<i>Investment in associates</i>
	44.162.889.949	<i>Investment in joint ventures</i>
Total	<u>88.336.293.782</u>	

a. Investments in associates companies

<u>Nama/ Name</u>	<u>Domisili/ Domicile</u>	<u>Jenis Usaha/ Type of Business</u>	<u>Awal Operasi Komersial/ Start Commercial Operation</u>	<u>Persentase Penyertaan/ Percentage of Participation</u>
PT Inpola Meka Energi	Jakarta	Ketenagalistrikan/ <i>Electricity</i>	2008	38,77%

Details of investments in associates as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
PT Inpola Meka Energi	44.173.403.833	<i>PT Inpola Meka Energi</i>

PT Inpola Meka Energi

The Company owned 38.77% shares on the Deed of Sale and Purchase at PT Inpola Meka Energi or amounting to Rp.49,664,500,000, according to Notary Karin Christiana Basoeki, S.H., No. 61 dated March 29, 2019.

The movements of investments in associates of PT Inpola Meka Energi are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
Saldo awal	47.202.972.684	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	-	<i>Addition</i>
Penyesuaian bagian laba (rugi) tahun sebelumnya	-	<i>Adjustment of the previous year's profit (loss)</i>
Bagian laba (rugi) tahun berjalan	<u>(3.029.568.851)</u>	<i>Share of current year's profit (loss)</i>
Saldo akhir	<u>44.173.403.833</u>	<i>Ending balance</i>

b. Investments in joint venture

On July 24, 2018, the PT Surya Mina Bunkerindo (SMB), a subsidiary of PT Mahkota Dinamika Niaga established the joint venture investment named Surya Mina Asinusa KSO in amount of Rp.6,834,400,000. As the purpose of this investment, the SMB is entitled to the ownership of shares in amount of 80% in

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

No. 1 tanggal 4 Februari 2014 dibuat oleh Notaris Soeleman Odang, SH. Per 31 Desember 2021, nilai investasi kerja sama sebesar Rp.50.078.892.647, sebagai berikut:

accordance with Deed No. 1 dated February 4, 2014 made by Notary Soeleman Odang, SH. As of December 31, 2020, the investment value is amounted to Rp.50,078,892,647 as follows:

	<u>Proyek/ Project</u>	<u>Persentase penyertaan/ Percentage of participation</u>	<u>Status/ Status</u>	
	Surya Mina Bunkerindo – Asinusa Putra Sekawan	Tangki Timbun Nipa	80% : 20%	Berjalan/ In Progress
	Mutasi investasi ventura bersama adalah sebagai berikut:			<i>Changes in investments in joint ventures are as follows:</i>
		<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
	Nilai tercatat awal tahun	44.162.889.949	35.029.339.205	<i>Carrying amount at the beginning year</i>
	Mutasi investasi - bersih	5.916.314.698	9.139.280.812	<i>Investment movement - net</i>
	Bagian ventura bersama	(312.000)	(5.730.068)	<i>Share in profit of joint ventures</i>
	Nilai tercatat akhir tahun	<u>50.078.892.647</u>	<u>44.162.889.949</u>	<i>Carrying amount at end of year</i>

14. INVESTASI JANGKA PANJANG

14. LONG-TERM INVESTMENTS

<u>Nama/ Name</u>	<u>Domisili/ Domicile</u>	<u>Jenis Usaha/ Type of Business</u>	<u>Persentase kepemilikan dan hak suara yang dimiliki Grup/ Percentage of ownership interest and voting power held by the Group (%)</u>		<u>Jumlah tercatat/ Carrying amount</u>	
			<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>
PT Meulaboh Power Generation	Jakarta	Penyediaan tenaga listrik/ <i>Electricity producer</i>	17%	17%	235.144.000.000	235.144.000.000
PT Muba Daya Pratama	Palembang	Penyediaan tenaga listrik/ <i>Electricity producer</i>	13%	13%	10.790.000.000	10.790.000.000
PT Pembangkitan Perkasa Daya (PPD)	Jakarta	Penyediaan tenaga listrik/ <i>Electricity producer</i>	5%	5%	494.935.000	494.935.000
Jumlah/Total					<u>246.428.935.000</u>	<u>246.428.935.000</u>

Mutasi investasi jangka panjang adalah sebagai berikut:

Changes in long-term investments are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
Nilai tercatat awal tahun	246.428.935.000	246.428.935.000	<i>Carrying amount at the beginning year</i>
Penambahan investasi	-	-	<i>Addition investment</i>
Reklasifikasi	-	-	<i>Reclassification</i>
Nilai tercatat akhir tahun	<u>246.428.935.000</u>	<u>246.428.935.000</u>	<i>Carrying amount at end of year</i>

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

PT Meulaboh Power Generation

Perusahaan memiliki saham sebesar 17,16% pada PT Meulaboh Power Generation dengan nilai perolehan Rp.235.144.000.000, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Sirkuler "PT Meulaboh Power Generation. No. 20 tanggal 15 September 2021 dibuat oleh Notaris Leny, S.H., M.Kn. di Kabupaten Bekasi.

PT Muba Daya Pratama

Perusahaan memiliki saham sebesar 13% pada PT Muba Daya Perkasa dengan nilai perolehan Rp.10.790.000.000, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang dinyatakan dalam Akta No. 2711 tanggal 17 Februari 2020 dari Notaris Ivan John Harris. S.H.. M.Kn.,

PT Pembangkitan Perkasa Daya

Pada tanggal 2 Mei 2019, Perusahaan menyetorkan dana kepada PT Pembangkitan Perkasa Daya sebesar Rp.494.935.000 dengan penyertaan setara dengan 5%. PT Pembangkitan Perkasa Daya didirikan sesuai dengan Akta No. 32 tanggal 24 Januari 2019 dibuat oleh Notaris Selam Bastomi, S.H., M.Kn., di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-005337.AH.01.01.TAHUN 2019.

PT Meulaboh Power Generation

The Company has 17.16% shares on PT Meulaboh Power Generation or amounting to Rp.235,144,000,000, based on Resolution of the Shareholders as a substitute General Meeting of Shareholders (GMS) with Circular "PT Meulaboh Power Generation. No. 20 dated September 15, 2021 by Notary Leny, S.H., M.Kn. in Bekasi Regency.

PT Muba Daya Pratama

The Company has 13% shares on PT Muba Daya Perkasa or amounting to Rp.10,790,000,000, based on the Company's Shareholders' General Meeting as stated in Deed No. 27 11 dated February 17, 2020 of Notary Ivan John Harris. S.H.. M.Kn.,

PT Pembangkitan Perkasa Daya

On May 2, 2019, the Company paid the capital up to PT Pembangkitan Perkasa Daya amounted to Rp.494,935,000 that is equal to 5%. PT Pembangkitan Perkasa Daya was established according to the Deed No. 32 dated January 24, 2019 by Notary Selam Bastomi, S.H., M.Kn., in Jakarta. The Deed of establishment had been approved by Minister of Justice and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-005337.AH.01.01. TAHUN 2019.

15. ASET HAK GUNA

Perusahaan menyewa beberapa kendaraan dengan masa sewa selama tiga tahun.

15. RIGHTS-OF-USE ASSETS

The Company lease several vehicles with the lease term of three years.

	31 Desember/December 31, 2021			
	1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	
Nilai perolehan				Acquisition cost
Kendaraan	2.882.413.413	-	-	Vehicles
Jumlah	2.882.413.413	-	-	Total
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Kendaraan	2.743.780.624	138.632.789	-	Vehicles
Jumlah	2.743.780.624	138.632.789	-	Total
Nilai Buku	138.632.789			Book Value

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

31 Desember/December 31, 2020				
1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2020	
Nilai perolehan				Acquisition cost
Kendaraan	2.882.413.413	-	2.882.413.413	Vehicles
Alat Berat	1.225.000.000	-	-	Heavy equipment
Jumlah	4.107.413.413	-	2.882.413.413	Total
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Kendaraan	1.942.764.098	801.016.526	-	Vehicles
Alat berat	331.770.842	153.125.004	484.895.846	Heavy equipment
Jumlah	2.274.534.940	954.141.530	2.743.780.624	Total
Nilai Buku	1.832.878.473		138.632.789	Book Value

Jumlah yang diakui ke laba rugi yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in profit or loss arising from leases are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Beban penyusutan aset hak guna	138.632.789	801.016.526	Depreciation expense on rights-of use assets
Beban bunga atas liabilitas sewa	7.076.514	78.429.607	Interest expense on lease liabilities

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa masing-masing sebesar Rp.232.923.486 dan Rp.1.185.748.400 pada tahun 2021 dan 2020.

The total cash outflow for leases amounted to Rp.232,923,486 and Rp.1,185,748,400 in 2021 and 2020, respectively.

Pada 31 Desember 2020 berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 292/EXT/DIR/SDP/XII/2020, Perusahaan telah menjual aset tetap alat berat Excavator dengan harga jual senilai Rp.430.000.000 dari nilai buku sebesar Rp.740.104.154, dan dengan nilai kerugian atas penjualan aset sebesar Rp.310.104.154. Penjualan tersebut telah melalui Persetujuan rapat Direksi berdasarkan surat Keputusan Rapat Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Nopember 2020, dan sepengetahuan Komisaris Perusahaan Berdasarkan surat No. 265/EXT/DIR/SDP/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020.

On December 31, 2020, based on Sale and Purchase Agreement No. 292/EXT/DIR/SDP/XII/2020, the Company has sold the fixed assets of excavator heavy equipment with a selling price of Rp.430,000,000 of the book value of Rp.740,104,154, and with a loss on the sale of assets of Rp.310,104,154. The sale has been approved by the Board of Directors meeting based on the Decree of the Company's Board of Directors Meeting on November 30, 2020, and to the knowledge of the Company's Commissioners based on letter No. 265/EXT/DIR/SDP/XII/2020 dated December 1, 2020.

16. ASET TETAP

16. PROPERTY AND EQUIPMENT

31 Desember/December 31, 2021				
1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2021	
Nilai perolehan				Acquisition cost
Pemilikan langsung				Direct ownership
Peralatan kantor	386.440.446	-	386.440.446	Office equipment
Sub Jumlah	386.440.446	-	386.440.446	Sub Total
Jumlah	386.440.446	-	386.440.446	Total
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Pemilikan langsung				Direct ownership
Peralatan kantor	197.253.393	91.593.435	-	Office equipment
Sub Jumlah	197.253.393	91.593.435	-	Sub Total
Jumlah	197.253.393	91.593.435	-	Total
Nilai Buku	189.187.053		97.593.618	Book Value

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

31 Desember/December 31, 2020						
	1 Januari/ January 1, 2020	Penerapan PSAK 73 (Catatan 2)/ Adoption of PSAK 73 (Note 2)	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2020	
Nilai perolehan						Acquisition cost
Pemilikan langsung						Direct ownership
Peralatan kantor	386.440.446	-	-	-	386.440.446	Office equipment
Sub Jumlah	386.440.446	-	-	-	386.440.446	Sub Total
Aset sewa pembiayaan						Asset leasing
Alat berat	1.225.000.000	-	-	1.225.000.000	-	Heavy equipment
Sub Jumlah	1.225.000.000	-	-	1.225.000.000	-	Sub Total
Jumlah	1.611.440.446	-	-	1.225.000.000	386.440.446	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct ownership
Peralatan kantor	100.643.278	-	96.610.115	-	197.253.393	Office equipment
Sub Jumlah	100.643.278	-	96.610.115	-	197.253.393	Sub Total
Aset sewa pembiayaan						Asset leasing
Alat berat	331.770.842	(331.770.842)	-	-	-	Heavy equipment
Jumlah	432.414.120	(331.770.842)	96.610.115	-	197.253.393	Total
Nilai Buku	1.179.026.326				189.187.053	Book Value

Perusahaan

Perusahaan memiliki aset tetap berupa peralatan kantor.

The Company

The Company has property and equipment is office equipment.

17. ASET MINYAK DAN GAS BUMI

17. OIL AND GAS PROPERTIES

31 Desember/December 31, 2021						
	1 Januari/ January 1, 2021	Selisih kurs penjabaran/ Translation of foreign exchange differences	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2021	
Nilai perolehan						Acquisition cost
Aset Minyak dan Gas Bumi						Oil and Gas Properties
Sumur dan perlengkapan terkait dan fasilitasnya	703.078.617.984	7.843.421.654	-	(1.780.991.550)	709.141.048.088	Wells and related equipment and facilities
Sumur, perlengkapan dan fasilitas dalam pengerjaan	103.707.994.298	1.205.821.036	-	-	104.913.815.334	Uncompleted wells, equipment and facilities
Bonus tanda tangan Hak-hak konsesi aset minyak dan gas	14.105.005.000	164.000.000	-	-	14.269.005.000	Signature bonus Oil and gas concessions rights
	225.971.143.746	-	-	(15.162.856.254)	210.808.287.492	
Jumlah	1.046.862.761.028	9.213.242.690	-	(16.943.847.804)	1.039.132.155.914	Total
Akumulasi penyusutan, deplesi dan amortisasi dan cadangan penurunan nilai						Accumulated depreciation, depletion and amortization and impairment reserves
	(71.614.741.714)	(709.669.683)	(23.242.977.817)	-	(95.567.389.214)	
Jumlah	(71.614.741.714)	(709.669.683)	(23.242.977.817)	-	(95.567.389.214)	Total
Nilai Buku	975.248.019.314				943.564.766.700	Book Value

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

31 Desember/December 31, 2020						
1 Januari/ January 1, 2020	Selisih kurs penjabaran/ Translation of foreign exchange differences	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2020		
Nilai perolehan					Acquisition cost:	
Aset Minyak dan Gas Bumi					Oil and Gas Properties	
Sumur dan perlengkapan terkait dan fasilitasnya	695.102.912.602	9.756.696.932	-	(1.780.991.550)	703.078.617.984	Wells and related equipment and facilities
Sumur, perlengkapan dan fasilitas dalam pengerjaan	102.208.029.769	1.499.964.529	-	-	103.707.994.298	Uncompleted wells, equipment and facilities
Bonus tanda tangan	13.901.000.000	204.005.000	-	-	14.105.005.000	Signature bonus
Hak-hak konsesi aset minyak dan gas	241.134.000.000	-	-	(15.162.856.254)	225.971.143.746	Oil and gas concessions rights
Jumlah	1.052.345.942.371	11.460.666.461	-	(16.943.847.804)	1.046.862.761.028	Total
Akumulasi penyusutan, deplesi dan amortisasi dan cadangan penurunan nilai					Accumulated depreciation, depletion and amortization and impairment reserves	
	(57.135.320.259)	(182.243.464)	(14.297.177.991)	-	(71.614.741.714)	
Jumlah	(57.135.320.259)	(182.243.464)	(14.297.177.991)	-	(71.614.741.714)	Total
Nilai Buku	995.210.622.112				975.248.019.314	Book Value

Merupakan aset minyak dan gas bumi PT OEKA (Entitas anak) yang terdiri dari:

- Aset minyak dan gas bumi yang mencerminkan seluruh biaya eksplorasi dan pengembangan untuk mendapatkan minyak dan gas sejak tanggal penandatanganan kontrak bagi hasil yaitu 16 Januari 2007. Seluruh biaya tersebut diajukan penggantian ke Pemerintah RI melalui mekanisme *cost recovery* setelah produksi minyak atau gas dimulai.
- Bonus tanda tangan adalah biaya yang dibayarkan Perusahaan kepada Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan hak pengelolaan migas di Blok Karang Agung sesuai dengan ketentuan Kontrak Bagi Hasil pasal 8.1. Bonus tanda tangan diakui seluruhnya pada saat produksi minyak tercapai dalam satu tahun penuh.

Perusahaan menelaah secara berkala atas jumlah nilai tercatat aset minyak dan gas bumi dan memastikan bahwa jumlah nilai tercatatnya tidak melebihi nilai wajar, berdasarkan laporan penilai independen yang telah teregistrasi di OJK, KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan.

Represent oil and gas properties of PT OEKA (Subsidiary) consisting of:

- Oil and gas properties reflect all costs of exploration and development to obtain oil and gas from the date of the production sharing contract signed on January 16, 2007. The entire cost proposed for reimbursement to the Government of Indonesia through a cost recovery mechanism after oil or gas production begins.
- Signature bonus is the fee paid by the Company to the Government of Indonesia to acquire concession of Karang Agung block oil and gas in accordance with the provisions of the Production Sharing Contract clause 8.1. Entire bonus expenses is recognised when the oil production is reached in a full year.

The Company regularly reviewed the carrying amount of oil and gas properties and ensured that the carrying amount not exceed the fair value, based on independent appraisal report registered in OJK, KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan.

18. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember/ December 31, 2021
Deposit sewa gedung	555.543.204
Jumlah	555.543.204

Merupakan aset PT OEKA dan PT MDN atas deposit sewa gedung.

18. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2020	
	392.769.050	Building rent deposit
Jumlah	392.769.050	Total

Represent asset PT OEKA and PT MDN on the building rent deposit.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

19. UTANG USAHA

19. TRADE ACCOUNT PAYABLES

Jangka pendek

Short-term

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Perusahaan	1.278.905.704	668.745.781	<i>The Company Subsidiary</i>
Entitas anak	39.189.825.739	57.362.413.873	
Jumlah	40.468.731.443	58.031.159.654	Total
	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Perusahaan:			The Company:
CV Cipta Karya	375.000.000	-	<i>CV Cipta Karya</i>
Lain-lain dibawah 300 Juta	903.905.704	668.745.781	<i>Others less than 300 Millions</i>
Sub Jumlah	1.278.905.704	668.745.781	Sub Total
Entitas Anak:			Subsidiary:
PT SDP			PT SDP
PT Murah Rejeki Jaya Sempurna	13.691.135.749	14.093.194.700	<i>PT Murah Rejeki Jaya Sempurna</i>
PT Panca Sukses Makmur	2.543.957.899	2.543.957.899	<i>PT Panca Sukses Makmur</i>
PT Astria Trans	1.595.192.650	1.595.192.650	<i>PT Astria Trans</i>
PT Valindo Teknik Pramata	905.353.900	905.353.900	<i>PT Valindo Teknik Pramata</i>
PT PP Presisi Tbk	371.200.000	-	<i>PT PP Presisi Tbk</i>
PT Putera Hulu Lematang	308.333.170	318.333.170	<i>PT Putera Hulu Lematang</i>
Lain-lain dibawah 300 Juta	2.278.305.554	1.292.088.786	<i>Others less than 300 Millions</i>
Sub Jumlah	21.693.478.922	20.748.121.105	Sub Total
PT OEKA			PT OEKA
PT Pertamina EP	2.918.664.620	-	<i>PT Pertamina EP</i>
PT Pertamina Gas	1.281.019.641	5.688.649.931	<i>PT Pertamina Gas</i>
PT Deva Samudra Energi	760.227.010	368.256.794	<i>PT Deva Samudra Energi</i>
PT Iskandar Wira Satya	704.299.906	696.205.075	<i>PT Iskandar Wira Satya</i>
Universitas Sriwijaya	696.073.313	-	<i>Universitas Sriwijaya</i>
PT Prima Sentra Usaha	606.487.848	599.517.214	<i>PT Prima Sentra Usaha</i>
PT Pajaga Lugas	556.062.000	-	<i>PT Pajaga Lugas</i>
PT Van Leeuwen Pipe and Tube Indonesia	457.250.197	451.994.818	<i>PT Van Leeuwen Pipe and Tube Indonesia</i>
PT Eonchemicals Putra	301.050.780	-	<i>PT Eonchemicals Putra</i>
Lain-lain dibawah 300 Juta	4.077.473.196	24.036.057.939	<i>Others Less than 300 Millions</i>
Sub Jumlah	12.358.608.511	31.840.681.771	Sub Total
PT MDN			PT MDN
Wood Mackenzie Asia Pasific Pte Ltd	1.038.415.000	1.038.415.000	<i>Wood Mackenzie Asia Pasific Pte Ltd</i>
PT Indospec Asia	600.000.000	600.000.000	<i>PT Indospec Asia</i>
BPPU ITS	600.000.000	600.000.000	<i>BPPU ITS</i>
PT Adisya Solusi	515.454.545	515.454.545	<i>PT Adisya Solusi</i>
Febri Gracio Stenry & Partners Law Office	375.000.000	375.000.000	<i>Febri Gracio Stenry & Partners Law Office</i>
Lain-lain dibawah 300 Juta	2.008.868.761	1.644.741.452	<i>Others Less than 300 Millions</i>
Sub Jumlah	5.137.738.306	4.773.610.997	Sub Total
Jumlah	40.468.731.443	58.031.159.654	Total
Perusahaan			The Company
Merupakan utang atas jasa manajemen dan operasional Perusahaan.			<i>The remaining of payables represent management and operations services.</i>

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Entitas Anak

Subsidiaries

PT SDP

PT SDP

Utang kepada PT Murah Rejeki Jaya Sempurna merupakan utang atas pengadaan batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lampung Tengah.

Payable to PT Murah Rejeki Jaya Sempurna represent payable of coal procurement for Coal Fired Power Plant (PLTU) Central Lampung.

Utang kepada PT Astria Trans merupakan utang atas pengadaan batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lampung Tengah.

Payable to PT Asia Trans represent payable of coal procurement for for Coal Fired Power Plant (PLTU) Central Lampung.

Selebihnya merupakan utang PT SDP (entitas anak) atas pengadaan batubara.

The remaining of payable represents PT SDP (subsidiary) payable on coal procurement.

PT OEKA

PT OEKA

Utang kepada PT Pertamina EP merupakan utang atas biaya *Facility Sharing Agreement* Penyaluran PEP Ramba.

Payables to PT Pertamina EP represent payable for the cost of the Facility Sharing Agreement for Distribution of PEP Ramba.

Utang kepada PT Pertamina Gas merupakan utang atas biaya pengangkutan minyak bumi Perusahaan.

Payables to PT Pertamina Gas represent payables for the transportation costs of the Company's petroleum.

Utang kepada PT Deva Samudra Energi merupakan utang atas biaya pembelian BBM untuk industry.

Payables to PT Deva Samudra Energi represent payables for the cost of purchasing fuel for the industry.

Selebihnya merupakan utang atas operasional OEKA.

The remaining of payables represent operations services OEKA.

Berdasarkan surat perjanjian perdamaian antara PT Odira Energi Karang Agung (dalam PKPU) dengan para kreditor PT Odira Energi Karang Agung (dalam PKPU) tanggal 17 Desember 2019, Perusahaan mendapatkan potongan utang usaha sebesar 25% bagi utang diatas Rp.1.000.000.000.

Based on the peace agreement letter between PT Odira Energy Karang Agung (in PKPU) and the creditors of PT Odira Energi Karang Agung (in PKPU) dated December 17, 2019, the Company received a 25% discount on accounts payable for debts above Rp.1,000,000,000.

PT MDN

PT MDN

Utang kepada Wood Mackenzie Asia Pasific Pte Ltd merupakan utang atas kajian *feasibility studies* pada proyek terminal tangki timbun di Pulau Nipa.

Payable to Wood Mackenzie Asia Pacific Pte Ltd represents payable for the the feasibility studies on the storage tank terminal project on Nipa Island.

Utang kepada PT Indospec Asia merupakan utang atas pekerjaan pemeriksaan pipanisasi dan sertifikasi persetujuan layak operasi (PLO) pada proyek pembangunan terminal tangki timbun di Pulau Nipa.

Payable to PT Indospec Asia represents payable for pipanisation inspection work and certification for operation approval (PLO) for the construction of a fuel storage tank terminal on Nipa Island.

Utang kepada BPPU ITS merupakan utang atas pekerjaan *Front End Engineering Design* (FEED) untuk dermaga pada proyek terminal tangki timbun di Pulau Nipa.

Payable to BPPU ITS represents payable for Front End Engineering Design (FEED) work for the fuel storage terminal project on Nipa Island.

Selebihnya merupakan utang PT MDN atas proyek terminal tangki penyimpanan bahan bakar minyak di Pulau Nipa.

The remaining of payable PT MDN represents payable for the fuel storage tank terminal project on Nipa Island.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Jangka panjang

Merupakan saldo utang usaha PT OEKA (entitas anak) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, berdasarkan Perjanjian Perdamaian antara para kreditor Perusahaan (dalam PKPU) dengan PT OEKA pada tanggal 17 Desember 2019 di Jakarta, yang telah di sahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (HOMOLOGASI) Nomor: 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 Desember 2019.

Long-term

Represents the balance of trade payables of PT OEKA (a subsidiary) with a maturity of more than one year, based on the Reconciliation Agreement between the Company's creditors (in PKPU) and PT OEKA on December 17, 2019 in Jakarta, which has been ratified based on the ratification of the settlement agreement (HOMOLOGASI) Number: 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dated December 18, 2019.

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
PT OEKA			PT OEKA
PT Darma 45 Abadi	23.725.731.943	23.493.662.180	PT Darma 45 Abadi
PT Menara Gading Putih	6.437.976.925	6.363.982.402	PT Menara Gading Putih
PT GL Nusantara	6.415.587.444	6.341.850.253	PT GL Nusantara
PT Hardinata Prabujaya	3.712.764.797	3.670.092.345	PT Hardinata Prabujaya
PT Viduo Vi Prabu	2.852.216.546	2.819.434.757	PT Viduo Vi Parbu
PT Laskar Prabu Sriwijaya	2.404.375.193	2.376.740.643	PT Laskar Prabu Sriwijaya
PT Vittolu Prabu Gasoil	2.175.683.174	2.150.677.083	PT Vittolu Prabu Gasoil
PT Prima Sentra Usaha	2.085.340.748	2.061.373.002	PT Prima Sentra Usaha
Ferry Rosnanda	1.623.121.312	1.604.466.059	Ferry Rosnanda
Lemigas	1.341.731.359	1.326.310.246	Lemigas
PT Handiyan Hottap Instrumen	1.210.176.819	1.196.267.720	PT Handiyan Hottap Instrumen
PT Putra Bajubang	903.531.920	1.651.946.643	PT Putra Bajubang
PT Multikarya Asia Pasifik Raya	619.265.625	1.794.331.650	PT Multikarya Asia Pasifik Raya
PT Rafinfa Industri Indonesia	802.353	92.470.089	PT Rafinfa Industri Indonesia
PT Pertamina	-	1.438.076.272	PT Pertamina
PT Pertamina Gas	-	781.054.869	PT Pertamina Gas
PT Kejora Gasbumi Mandiri	-	967.649.312	PT Kejora Gasbumi Mandiri
Jumlah	55.508.306.158	60.130.385.525	Total

Utang kepada PT Darma 45 Abadi merupakan utang atas biaya pekerjaan EPCI (*Engineering, Procurement, Construction & Installation*).

Payable to PT Darma 45 Abadi represent payable of the cost of the work of the EPCI (*Engineering, Procurement, Construction & Installation*).

Utang kepada PT Menara Gading Putih merupakan utang atas pekerjaan pemasangan pipa fasilitas produksi proyek Sumur Minyak Ridho di Blok Karang Agung yang berlokasi di Palembang.

Payable to PT Menara Gading Putih of production pipe facilities installation on Ridho Oil Well in the Karang Agung Block that located in Palembang.

Selebihnya merupakan utang atas operasional OEKA.

The remaining of payables represent operations services OEKA.

20. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

20. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Gaji dan tunjangan	21.102.328.986	21.562.674.662	Salaries and allowances
Beban umum	26.144.980.974	12.173.700.832	General expenses
Sewa	3.533.200.000	3.133.520.000	Rent
Pemakaian KWH Impor	3.930.499.795	2.921.264.584	Use of Imported KWH
Asuransi	-	831.321.907	Insurance
Jumlah	54.711.009.755	40.622.481.985	Total

Biaya yang masih harus dibayar gaji dan tunjangan merupakan biaya gaji dan tunjangan masih harus dibayar PT OEKA (entitas anak) sebelum diakuisisi Perusahaan pada tahun 2018.

Accrued expenses for salaries and allowances are salaries and allowances costs accrued by PT OEKA (subsidiary) before being acquisition by the Company in 2018.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Beban umum yang masih harus dibayar merupakan utang beban operasional Perusahaan dan entitas anak per 31 Desember 2021 dan 2020.

The general expenses accrued represent the operating expenses of the Company and subsidiaries as of December 31, 2021 and 2020.

Biaya yang masih harus dibayar asuransi merupakan biaya asuransi yang masih harus dibayar PT SDP (entitas anak).

Accrued expenses represent accrued insurances are PT SDP (subsidiary).

Asuransi atas instalasi dan pembangkit listrik yang dibayarkan kepada PT Asuransi Ramayana Tbk dan PT Jasa Raharja Putera terhadap risiko kerugian *Earthquake Property All Risk* dan *Machinery Breakdown & Business Interruption* per 31 Desember 2020.

Insurance of installation and power plant prepaid insurance expenses which was paid to PT Asuransi Ramayana Tbk and PT Jasa Raharja Putera to risk of loss of *Earthquake Property All Risk* and *Machinery Breakdown & Business Interruption* as of December 31, 2020.

21. UTANG BANK

Merupakan pinjaman bank bukopin yang diterima PT SDP (entitas anak) sebagai berikut:

21. BANK LOANS

Represents bank bukopin loans obtained from PT SDP (subsidiary) as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Jumlah pinjaman	92.813.240.483	92.944.406.837	<i>Total loan</i>
Dikurangi - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.582.451.709	5.200.727.245	<i>Less - current portion</i>
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	90.230.788.774	87.743.679.592	<i>Long-term loan - net of current maturities</i>

Sesuai surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. 07639/DRTK/IV/2021 tanggal 19 April 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

Based on the approval letter for extension of credit facility No. 07639/DRTK/IV/2021 dated April 19, 2021, under the conditions as follows:

Jenis fasilitas/ <i>Type of facilities</i>	Fasilitas maksimum/ <i>Maximum facility</i>	Tanggal perjanjian/ addendum Agreement/ addendum Date		Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Tingkat bunga per tahun/ <i>Interest rate per annum</i>	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
		2021	2020				
Jangka Panjang / Long Term							
Kredit Modal Kerja/ <i>Working Capital Credit</i>	20.000.000.000	30 Maret/ March 30, 2021	19 Mei/ May 19, 2021	120 bulan setelah tanggal restrukturisasi/ <i>120 months after the date of restructuring</i>	11,5%	19.865.697.553	19.950.092.992
Kredit Modal Kerja/ <i>Working Capital Credit</i>	20.000.000.000	30 Maret/ March 30, 2021	19 Mei/ May 19, 2021	120 bulan setelah tanggal restrukturisasi/ <i>120 months after the date of restructuring</i>	11,5%	19.921.631.347	19.893.389.677
Kredit Investasi <i>Civil Work/ Investment Credit Civil Work</i>	20.554.892.155	30 Maret/ March 30, 2021	19 Mei/ May 19, 2021	120 bulan setelah tanggal restrukturisasi/ <i>120 months after the date of restructuring</i>	11,5%	18.531.691.308	18.557.392.200
Kredit Investasi LC/ <i>Investment Credit LC</i>	30.818.428.731	30 Maret/ March 30, 2021	19 Mei/ May 19, 2021	120 bulan setelah tanggal restrukturisasi/ <i>120 months after the date of restructuring</i>	11,5%	27.783.839.469	27.823.605.312
Kredit Investasi IDC / <i>Investment Credit IDC</i>	7.443.351.660	30 Maret/ March 30, 2021	19 Mei/ May 19, 2021	120 bulan setelah tanggal restrukturisasi/ <i>120 months after the date of restructuring</i>	11,5%	6.710.380.806	6.719.926.656
				Jumlah/ Total		<u>92.813.240.483</u>	<u>92.944.406.837</u>

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Jaminan atas seluruh fasilitas yang diterima adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 119.900 m² dan bangunan instalasi pembangkit listrik milik Perusahaan yang terletak di Lampung Tengah, Lampung.
2. Sebidang tanah dan bangunan milik PT Lima Putra Contrindo seluas 4.680 m² yang terletak di Kawasan Modern Cikande Industrial Estate, Serang, Banten.
3. Sebidang tanah dan bangunan milik PT Lima Putra Contrindo, luas 120 m², yang terletak di Kawasan Modern Cikande Industrial Estate, Serang, Banten.
4. Sebidang tanah dan bangunan milik Maryati seluas 1.317 m² yang terletak di Jakarta Timur.
5. Sebidang tanah dan bangunan milik Maryati seluas 247 m² yang terletak di Jakarta Timur.
6. Sebidang tanah dan bangunan milik Rahardjo Moecharar seluas 894 m² yang terletak di Jakarta Timur.
7. Sebidang tanah dan bangunan milik Rahardjo Moecharar seluas 506 m² yang terletak di Jakarta Timur.
8. Sebidang tanah dan bangunan milik Rahardjo Moecharar seluas 390 m² yang terletak di Jakarta Timur.
9. Mesin dan peralatan PLTU sehubungan dengan transaksi yang dibiayai dari fasilitas-fasilitas tersebut.
10. Tagihan milik Perusahaan kepada PT PLN (Persero) atas transaksi sewa pembiayaan instalasi dan pembangkit *power plant* (atau "atas penjualan energi listrik" sesuai *power purchase agreement* tanggal 21 Maret 2007 dan addendum-addendumsnya) sebesar Rp.140.000.000.000.

PT SDP wajib menjaga rasio keuangan seperti *leverage* maksimum 2x, *interest service coverage ratio* minimum 1,5x, *current ratio* minimum 1,1x, *debt to EBITDA* maksimum 4x dan *debt coverage service ratio* minimum 1x.

Pada tahun 2020, Sesuai surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. 06189/DKM/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, Perusahaan mendapatkan keringanan kewajiban kredit kepada PT Bank Bukopin Tbk berupa perpanjangan waktu selama 120 bulan dan pembayaran suku bunga efektif sebesar 3,5% selama 12 bulan pertama dan terhadap sisa kewajiban bunga sebesar 8% ditangguhkan dan akan mulai dibayarkan sejak bulan ke 13 sampai dengan fasilitas kredit lunas selama 108 bulan secara pro rata.

Sesuai surat No. 294/EXT/DIR/SDP/XII/2020 tanggal tanggal 30 Desember 2020, Perusahaan mengajukan permohonan kepada Bank Bukopin

The collateral for the whole facilities obtained are as follow:

1. *A land area of 119,900 m² and building of power plant installation owned by the Company where located in Central Lampung, Lampung.*
2. *A building and land area of 4,680 m² owned by PT Lima Putra Contrindo located in Modern Cikande Industrial Estate Area, Serang, Banten.*
3. *A buildings and land area of 120 m² owned by PT Lima Putra Contrindo located in Modern Cikande Industrial Estate Area, Serang, Banten.*
4. *A building and land area of 1,317 m² owned by Maryati located in East Jakarta.*
5. *A building and land area of 247 m² owned by Maryati located in East Jakarta.*
6. *A building and land area of 894 m² owned by Rahardjo Moecharar located in East Jakarta.*
7. *A building and land area of 506 m² owned by Rahardjo Moecharar located in East Jakarta.*
8. *A building and land area of 390 m² owned by Rahardjo Moecharar located in East Jakarta.*
9. *Machinery and equipment regarding to the transaction financed by those facilities.*
10. *The Company's receivable to PT PLN (Persero) over finance lease transaction of installation and power plant (or "on sale of electric energy" according to the power purchase agreement on March 21, 2007 and its addendums) amounted of Rp.140,000,000,000.*

PT SDP is required to maintain certain financial ratio such as maximum of leverage ratio is 2x, minimum interest service coverage ratio is 1.5x, minimum coverage ratio is 1.1x, maximum debt to EBITDA of 4x and minimum debt coverage service ratio is 1x.

In 2020, Based on the approval letter for extension of credit facility No. 06189/DKM/III/2020 dated March 30, 2020, the Company received a credit obligation relief to PT Bank Bukopin Tbk in the form of an extension of time for 120 months and an effective interest rate payment of 3.5% for the first 12 months and the remaining 8% interest obligation was deferred and will be paid starting from the 13th month. until the credit facility is paid off for 108 months on a pro rata basis.

Based on letter No. 294/EXT/DIR/SDP/XII/2020 dated December 30, 2020, the Company submitted a request to Bank Bukopin to extend the 2nd waiver

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

untuk memperpanjang keringanan ke-2 kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp.100.000.000 per bulan, yang berlaku dari bulan Maret 2021 sampai dengan Februari 2022.

Bank Bukopin telah menerima pengajuan permohonan perpanjangan keringanan ke-2 dari Perusahaan dan menyampaikan bahwa pengajuan permohonan tersebut dapat di proses dengan syarat jika adanya penurunan Outstanding Kredit sebesar Rp.50.000.000.000 dari Perusahaan dan adanya penempatan dana dari holding dan induk Perusahaan yaitu PT PP (Persero) Tbk atau PT PP Energi yang akan dijadikan *Blended Fund* untuk pembayaran kewajiban restruktur Perusahaan.

Sebagai tanggapan atas surat Bank Bukopin, Perusahaan menyampaikan keberatan untuk bisa memenuhi penurunan Outstanding Kredit seperti yang disyaratkan Bank Bukopin untuk perpanjangan restrukturisasi kredit Perusahaan, dan tetap mengajukan permohonan kepada Bank Bukopin untuk memperpanjang keringanan ke-2 kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp.100.000.000 per bulan, yang berlaku dari bulan Maret 2021 sampai dengan Februari 2022.

Pada tahun 2021, Sesuai surat restrukturisasi fasilitas kredit No. 07639/DRTK/IV/2021 tanggal 29 April 2021, Perusahaan mendapatkan keringanan kewajiban kredit kepada PT Bank Bukopin Tbk berupa pembayaran suku bunga efektif sebesar 1,15% selama 12 bulan pertama dan terhadap sisa kewajiban 12 bulan tersebut ditangguhkan dan akan mulai dibayarkan sejak bulan ke 13 sejak restruktur sampai dengan jatuh tempo kredit lunas secara pro rata.

22. LIABILITAS PROGRAM IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut masing-masing adalah 28 karyawan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen KKA Tubagus Syafril & Amiran Nangasan (Perusahaan dan entitas anak PT OEKA) dan aktuaris independen PT Sinco Aktuarindo Utama (Entitas anak PT SDP) per 31 Desember 2021 dan 2020. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

of principal and interest payment obligations of Rp.100,000,000 per month, which is valid from March 2021 to February 2022.

Bank Bukopin has received a request for extension of the 2nd relief from the Company and said that the application can be processed on condition if there is a decrease in Outstanding Credit of Rp.50,000,000,000 from the Company and the placement of funds from the holding and parent Company, namely PT PP (Persero) Tbk or PT PP Energi which will be used as a Blended Fund for payment of the Company restructuring obligations.

In response to Bank Bukopin's letter, the Company submitted an objection to request fulfillment reduction in Credit Outstanding as required by Bank Bukopin for the extension of the Company's credit restructuring, and still submitted request to Bank Bukopin to extend the second relief of principal and interest payment obligations of Rp.100,000,000 per month, which is valid from March 2021 to February 2022.

In 2021, Based on letter of restructuring credit facility No. 07639/DRTK/IV/2021 dated April 29, 2021, the Company received a credit obligation relief to PT Bank Bukopin Tbk in an effective interest rate payment of 1.15% for the first 12 – months and against the remaining balance. The 12-months obligation is deferred and will begin to be paid from the month 13th of the restructuring until the loan maturity is paid off on a pro rata basis.

22. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

The Company calculate employment benefits liabilities for its qualified employees based on Labor Law No. 13/2003. The number of employees entitled to the post employment benefit is 28 employees and for the years ended December 31, 2021 and 2021 respectively.

Employment benefits are calculated by independent actuarial KKA Tubagus Syafril & Amiran Nangasan (the Company and subsidiary of PT OEKA) and independent actuary of PT Sinco Aktuarindo Utama (subsidiary of PT SDP) as of December 31, 2021 and 2020. Main assumption that used to determine actuarial valuation are stated as follows:

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
Tingkat diskonto per tahun	7.50%	6.71%	<i>Discounted rate per annum</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	6.75%	7.00%	<i>Salary increment rate per annum</i>
Tingkat pensiun normal	55 tahun/years Indonesia	55 tahun/years Indonesia	<i>Normal retirement rate</i>
Tingkat kematian	Mortality	Mortality	<i>Mortality rate</i>
Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah:		<i>Post - employment benefit expense are recognized in consolidated comprehensive income as follows:</i>	

	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
Biaya jasa kini	893.524.872	1.301.639.141	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	426.285.231	338.767.241	<i>Interest cost</i>
Kurtailmen	(1.079.286.851)	-	<i>Curtailmen</i>
Biaya jasa masa lalu	(605.223.193)	1.006.757.639	<i>Past service cost</i>
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	(364.699.941)	2.647.164.021	<i>Components of defined benefit costs recognized in profit or loss</i>
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	38.024	(9.648.456)	<i>Actuarial gains and losses arising from changes in demography assumption</i>
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	231.424.978	247.241.630	<i>Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumption</i>
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(464.765.116)	188.579.166	<i>Actuarial gains and losses arising from experience adjustments</i>
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(233.302.114)	426.172.340	<i>Components of benefit costs recognized in other comprehensive income</i>
Jumlah	(598.002.055)	3.073.336.361	<i>Total</i>

Dari biaya tahun berjalan sebesar Rp.1.319.810.103 dan Rp.2.647.164.021 masing-masing termasuk dalam beban umum dan administrasi tahun 2021 dan 2020.

From the expense of the year amounted to Rp.1,319,810,103 and Rp.2,647,164,021 were included in general and administration expenses in 2021 and 2020, respectively.

Liabilitas imbalan pasca kerja sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statement of financial position arising from the obligation in respect of the defined benefits plan is as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
Nilai kini kewajiban	5.384.182.200	7.269.444.452	<i>Present value of funded obligation</i>
Nilai wajar aset program	-	-	<i>Fair value of plan assets</i>
Status pendanaan defisit (surplus)	5.384.182.200	7.269.444.452	<i>Funded status deficit (surplus)</i>
Batasan atas aset yang diakui	-	-	<i>Restrictions on recognized assets</i>
Liabilitas bersih yang timbul dari kewajiban imbalan pasti	5.384.182.200	7.269.444.452	<i>Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumption</i>

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Mutasi nilai kini kewajiban manfaat pasti pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefit obligation in the current year are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Kewajiban imbalan pasti - awal	7.269.444.452	4.455.501.191	<i>Beginning defined benefit obligation</i>
Biaya jasa kini	893.524.872	1.301.639.142	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	426.285.231	338.767.240	<i>Interest cost</i>
Biaya jasa masa lalu	(511.620.825)	1.006.757.639	<i>Past service cost</i>
Manfaat dibayarkan	(1.287.260.197)	(259.393.100)	<i>Benefit payment</i>
Kurtailmen	(1.172.889.219)	-	<i>Curtailmen</i>
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):			<i>Remeasurement (gains/losses):</i>
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	38.024	(9.648.456)	<i>Actuarial gains and losses arising from changes in demography assumption</i>
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	231.424.978	247.241.630	<i>Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumption</i>
Keuntungan dan Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(464.765.116)	188.579.166	<i>Actuarial gains and losses arising from experience adjustments</i>
Kewajiban imbalan pasti - akhir	5.384.182.200	7.269.444.452	<i>Ending defined benefit obligation</i>

Mutasi nilai kini dari liabilitas (aset) adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of liabilities (assets) are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Nilai wajar aset program - awal	7.269.444.452	4.455.501.191	<i>Fair value of plan assets - beginning</i>
Dampak divestasi entitas anak	-	-	<i>Impact of divestment of subsidiary</i>
Biaya yang diakui via laba/rugi	(364.699.941)	2.647.164.020	<i>Expense recognized through profit/loss</i>
Jumlah yang diakui pada pendapatan komprehensif lain	(233.302.114)	426.172.340	<i>Total recognized on other comprehensive income</i>
Pembayaran periode berjalan:			<i>Payment during period:</i>
- Iuran Perusahaan	-	-	<i>Company contribution -</i>
- Pembayaran manfaat	(1.287.260.197)	(259.393.099)	<i>Benefit payment -</i>
Nilai Wajar Aset Program - Akhir	5.384.182.200	7.269.444.452	<i>Fair Value of Plan Assets - Ending</i>

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

The significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefit obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on each changes of the assumptions that possibly occur at the end of the reporting period, while all other assumptions remain constant.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang menjadi sebesar Rp.5.039.998.965 (meningkat menjadi sebesar Rp.5.789.515.902).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan turun menjadi sebesar Rp.5.790.946.725 (naik menjadi sebesar Rp.5.032.499.104).

- *If the discount rate increases (decreases) by 1%, defined benefit obligation will decrease to Rp.5,039,998,965 (increase to Rp.5,789,515,902).*
- *If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation will be decrease to Rp.5,790,946,725 (increase to Rp.5,032,499,104).*

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representing the actual change in the defined benefit considering that the change of occurrence assumptions are not isolated one to another because some of those assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan. Metode tersebut sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the sensitivity analysis above, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period. The used method is same as applied in calculating defined benefit obligation recognized in the consolidated statement of financial position.

23. UTANG LAIN-LAIN

Jangka panjang

	31 Desember/ December 31, 2021
Pihak berelasi	
PT PP (Persero) Tbk	1.231.727.199.674
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan PT Asinusa Putra Sekawan	13.766.787.229 80.253.552
Sub Jumlah	1.245.574.240.455
Pihak ketiga	
PT Persada Tanjung Api-Api PT Odira Energy Persada	43.440.138.391 75.712.759.203
Sub Jumlah	119.152.897.594
Jumlah	1.364.727.138.049

Utang lain-lain kepada PT PP (Persero) Tbk merupakan utang Perusahaan dan Entitas anak sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021
Pinjaman modal kerja yang diterima Perusahaan, Pinjaman tersebut tanpa jaminan.	1.158.790.233.023
Pinjaman modal kerja yang diterima PT SDP (Entitas Anak) untuk proyek instalasi dan pembangkit selama masa pengembangan sesuai dengan surat pernyataan utang dari Perusahaan atas hasil rekonsiliasi pinjaman PT PP (Persero) Tbk atas pinjaman tersebut dikenakan bunga 6% pertahunnya.	72.936.966.651
Jumlah	1.231.727.199.674

23. OTHERS PAYABLE

Long-term

	31 Desember/ December 31, 2020
	1.088.104.988.573
	13.766.787.229
	80.253.552
Sub Jumlah	1.101.952.029.354
	46.669.289.038
	75.629.458.267
Sub Jumlah	122.298.747.305
Jumlah	1.224.250.776.659

Other payable to PT PP (Persero) Tbk represent the Company and Subsidiaries liability as follow:

	31 Desember/ December 31, 2020
Related parties	
PT PP (Persero) Tbk Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan PT Asinusa Putra Sekawan	1.088.104.988.573 13.766.787.229 80.253.552
Sub Total	1.101.952.029.354
Third party	
PT Persada Tanjung Api-Api PT Odira Energy Persada	46.669.289.038 75.629.458.267
Sub Total	122.298.747.305
Total	1.224.250.776.659

*Loan of working capital obtained by the Company, unsecured.
Loan of working capital obtained by the PT SDP (Subsidiaries) for installation and power plant project during developing according to debt statement from the Company on the debt reconciliation from regarding loan from PT PP (Persero) Tbk the loan bears an annual interest rate of 6%.*

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Utang lain-lain kepada YKKPP merupakan utang Perusahaan dan Entitas anak sebagai berikut:

Other payable to YKKPP represent the Company and Subsidiaries liability as follow:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Pinjaman Perusahaan sehubungan dengan pengalihan saham PT SDP dari PT PP (Persero) Tbk, sesuai dengan perjanjian kesepakatan para pihak antara PT Mugi Makmur Sejahtera, PT SDP dan PT PPEN tanggal 28 Desember 2018 dengan jangka waktu pinjaman selama 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 28 Desember 2020, sebesar Rp.9.234.400.000 utang tersebut tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga dan Utang lain-lain Perusahaan kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP) atas transaksi pembelian saham PT Presisi, Tbk sebesar Rp.157.387.229.	9.391.787.229	9.391.787.229	<i>The Company's loan represent a payable regarding to the transfer shares of PT SDP from PT PP (Persero) Tbk, in accordance with mutual agreement between PT Mugi Makmur Sejahtera, PT SDP, and PT PPEN dated December 28, 2018 with the loan's term of payment is 2 (two) years until dated December 28, 2020 amounting Rp.9.234.400.000 The loan is unsecured and free of interest and other payable of the Company to Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP) for transaction the purchase PT PP Presisi, Tbk shares amounted to Rp.157,387,229.</i>
Pinjaman modal kerja yang diterima PT SDP (Entitas Anak) untuk proyek instalasi dan pembangkit selama masa pengembangan sesuai dengan amandemen II atas surat perjanjian pinjaman dana No. 002/ADD/SPPD/XI/2021 tanggal 18 Nopember 2019 saldo utang lain-lain pihak berelasi fasilitas ini adalah pinjaman tanpa jaminan yang dikenakan bunga sebesar 10% per tahun dan jangka waktu pinjaman sampai dengan 18 Nopember 2022.	4.375.000.000	4.375.000.000	<i>Loan of working capital obtained the PT SDP (Subsidiaries) for installation and power plant project during developing according with amendment II to the loan fund agreement letter No. 002/ADD/SPPD/XII/2021 dated November 18, 2021, the balance of other debts of related parties This facility is an unsecured loan which beared interest 10% p.a. and the loan period is up to November 18, 2022.</i>
Jumlah	13.766.787.229	13.766.787.229	Total

Utang lain-lain PT OEKA (entitas anak) kepada PT Odira Energy Persada merupakan pinjaman yang diberikan oleh entitas induk terdahulu. Pinjaman terdiri dari pencairan pinjaman dalam bentuk kas yang transaksinya dilakukan dalam mata uang dollar sebesar USD.7.144.271.

Other payable of PT OEKA (subsidiary) to PT Odira Energy Persada represents payable obtained from previous parent entity. Loans consist of cash disbursement loan which the transaction are conducted in dollar amounted USD.7,144,271.

Merupakan pinjaman modal kerja yang diterima PT OEKA (entitas anak) dari PT Odira Energy Persada, PT Odira Energy Persada merupakan pemegang saham PT OEKA sebelum PT OEKA diambil alih oleh Perusahaan, pinjaman terdiri dari pencairan pinjaman dalam bentuk kas yang transaksinya dilakukan dalam mata uang dollar sebesar USD.7.144.271.

Represent a working capital loan obtained by PT OEKA (subsidiary) from PT Odira Energy Persada, PT Odira Energy Persada was the shareholder of PT OEKA before PT OEKA was taken over by the Company, loans consist of cash disbursement loan which the transaction are conducted in dollar amounted USD.7,144,271.

Merupakan pinjaman modal kerja yang diterima PT OEKA (entitas anak) dari PT Persada Tanjung Api-Api sesuai perjanjian pinjam meminjam antara PT OEKA dengan PT Persada Tanjung Api-Api No. 012/PTAA-OEKA/2017 tanggal 13 Desember 2017. PT Persada Tanjung Api-Api merupakan pihak afiliasi PT OEKA sebelum PT OEKA diambil alih oleh Perusahaan.

Represent a working capital loan obtained by PT OEKA (subsidiary) from PT Persada Tanjung Api-Api based on loan agreement between PT OEKA with PT Persada Tanjung Api-Api No. 012/PTAA-OEKA/2017 dated December 13, 2017. PT Persada Tanjung Api-Api was the affiliated party of PT OEKA before PT OEKA was taken over by the Company.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

24. MODAL SAHAM

Pada tahun 2020, berdasarkan Akta Pernyataan Sirkular Pemegang Saham No. 31 tanggal 24 April 2020 dari Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp.700.000.000.000 terbagi atas 700.000 saham dengan nominal saham Rp.1.000.000. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.521.073.000.000 atau sebesar 521.073 lembar saham dengan susunan pemegang saham per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Total stock	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai nominal/ Par value
PT PP (Persero) Tbk	516.142	99,05%	516.142.000.000
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP)	4.931	0,95%	4.931.000.000
Jumlah	521.073	100%	521.073.000.000

Pada tahun 2021, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 05 tanggal 22 Juni 2021 dari Hana Badrina, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp.700.000.000.000 terbagi atas 700.000 saham dengan nominal saham Rp.1.000.000. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.541.233.000.000 atau sebesar 541.233 lembar saham dengan susunan pemegang saham per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Total stock	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai nominal/ Par value
PT PP (Persero) Tbk	536.302	99,09%	536.302.000.000
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP)	4.931	0,91%	4.931.000.000
Jumlah	541.233	100%	541.233.000.000

25. UANG MUKA SETORAN MODAL

Merupakan uang muka setoran modal yang diterima Perusahaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.20.160.000.000. Uang muka setoran modal tersebut telah dikapitalisir menjadi modal saham di tahun 2021.

24. CAPITAL STOCK

In 2020, based on the Deed of Circular Statement of Shareholders No. 31 dated April 24, 2020 from Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notary in Jakarta, the authorized capital of the Company amounted to Rp.700,000,000,000 divided into 700,000 shares with par value of each share of Rp.1,000,000. The capital has been issued and fully paid amounted to of Rp.521,073,000,000 or amounted to 521,073 shares, with the composition of shareholders as of December 31, 2020 is as follows:

On 2021, based on the Deed of Decision of Shareholders No. 05 dated June 22, 2021 from Hana Badrina, S.H., M.Kn., Notary in Karawang, the authorized capital of the Company amounted to Rp.700,000,000,000 divided into 700,000 shares with par value of each share of Rp.1,000,000. The capital has been issued and fully paid amounted to Rp.541,233,000,000 or amounted to 541,233 shares, with the composition of shareholders as of December 31, 2021 is as follows:

25. ADVANCE FOR FUTURE SHARES SUBSCRIPTION

Represents advance payment of capital obtained from the Company as of December 31, 2020 amounting to Rp.20,160,000,000. The advances for paid up capital has been capitalized into share capital in 2021.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

26. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH

Kombinasi bisnis entitas sepengendali yang disajikan sebagai tambahan modal disetor atas selisih antara harga pengalihan saham dengan nilai buku atas pengalihan saham PT MDP per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.13.425.138.372.

27. SALDO LABA

Saldo laba yang ditentukan penggunaannya merupakan cadangan wajib pada entitas anak PT OEKA.

Pemegang saham PT OEKA menyetujui untuk mencadangkan dari saldo laba sebesar Rp.46.500.234.923 sebagai tambahan cadangan modal berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham dengan Akta No. 01 tanggal 02 November 2021 dari Hana Badrina S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Karawang.

28. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

Hak non pengendali atas aset bersih

26. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET

Business combination under common control presented as additional paid-in capital the difference between the transfer price of shares and book value of transfer shares of PT MDP as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp.13,425,138,372, respectively.

27. RETAINED EARNINGS

Appropriated retained earnings is a Statutory reserve in the subsidiary of PT OEKA.

The stockholders of PT OEKA agreed to appropriate from retained earnings amounting to Rp.46,500,234,923 as additional capital reserve based on Statement of Decision of Shareholders No. 01 dated November 02, 2021 from Hana Badrina S.H., M.Kn., notary public in Karawang District.

28. NON CONTROLLING INTEREST

Non controlling rights over net assets

31 Desember 2021/December 31, 2021					
Entitas anak/ Subsidiaries	Persentase kepemilikan/ Ownership	Nilai tercatat awal/ Initial carrying amount	Penambahan (pengurangan)/ Addition (deduction)	Nilai nominal/ Par value	
PT Sepoetih Daya Prima	25%	(17.216.522.540)	(10.823.135.584)	(28.039.658.124)	
PT Odira Energy Karang Agung	30%	96.156.559.339	30.053.445.868	126.210.005.207	
PT Mahkota Dinamika Niaga	27%	(5.045.435.379)	(1.313.751.859)	(6.359.187.238)	
Jumlah		73.894.601.420	17.916.558.425	91.811.159.845	
31 Desember 2020/December 31, 2020					
Entitas anak/ Subsidiaries	Persentase kepemilikan/ Ownership	Nilai tercatat awal/ Initial carrying amount	Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK/ Adjustment in relation to application of PSAK	Penambahan (pengurangan)/ Addition (deduction)	Nilai nominal/ Par value
PT Sepoetih Daya Prima	25%	(7.612.195.470)	(1.032.739)	(9.603.294.331)	(17.216.522.540)
PT Odira Energy Karang Agung	30%	77.145.007.125	(65.078.142)	19.076.630.356	96.156.559.339
PT Mahkota Dinamika Niaga	27%	(3.634.503.988)	(95.424.144)	(1.315.507.247)	(5.045.435.379)
Jumlah		65.898.307.667	(161.535.025)	8.157.828.778	73.894.601.420

29. PENDAPATAN USAHA

	2021
Pendapatan minyak dan gas bumi	138.699.027.599
Pendapatan batubara	-
Pendapatan keuangan atas penjualan listrik	-
Jumlah	138.699.027.599

29. REVENUES

	2020
Pendapatan minyak dan gas bumi	48.200.714.637
Pendapatan batubara	12.942.096.130
Pendapatan keuangan atas penjualan listrik	1.578.809.568
Jumlah	62.721.620.335

Sale of oil and gas
Coal income
Finance income of
electricity sales
Total

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

30. BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Minyak	119.423.876.538	55.370.607.358
Penyusutan dan amortisasi	9.416.563.828	5.273.634.147
Sewa operasi	2.109.946.297	6.662.412.773
Batubara	184.993.252	20.911.566.645
Keuangan atas penjualan listrik	177.793.083	1.015.688.893
Jumlah	<u>131.313.172.998</u>	<u>89.233.909.816</u>

*Oil
Depreciation and amortization
Operating lease
Coal
Finance of electricity sales
Total*

31. BEBAN USAHA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Biaya pegawai	13.920.292.976	21.126.924.511
Biaya umum	6.442.637.526	4.365.466.409
Biaya pemasaran	440.177.217	6.850.532
Biaya penyusutan dan amortisasi	230.226.224	897.626.642
Jumlah	<u>21.033.333.943</u>	<u>26.396.868.094</u>

*Employee expenses
General expenses
Marketing expenses
Depreciation and amortization expenses
Total*

32. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Selisih kurs - bersih	10.790.689.298	8.452.437.740
Pendapatan bunga	3.384.292.436	125.819.384
Pemulihan cadangan penurunan nilai	409.356	10.255.057
Beban bunga	(122.491.801.333)	(48.516.625.720)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(31.654.062.305)	(33.023.158.462)
Penurunan nilai atas aset proyek konsesi	(24.541.000.000)	(10.871.720.772)
Penurunan nilai aset minyak dan gas bumi	(16.943.847.804)	(16.943.847.804)
Bagian rugi - Entitas asosiasi dan ventura bersama	(3.740.044.512)	(3.029.568.851)
Beban administrasi bank	(23.184.532)	(247.297.570)
Rugi penjualan aset	-	(310.104.154)
Beban bunga liabilitas sewa	-	(78.429.607)
Pendapatan atas putusan PKPU	-	58.880.695.259
Pendapatan atas potongan utang PT MDP	83.321.103.643	66.477.958.057
Jumlah	<u>(101.897.445.753)</u>	<u>20.926.412.557</u>

*Foreign exchange - net
Interest income
Recovery allowance for impairment
Interest expense
Allowance for impairment loss expense
Provision for impairment losses on for consession project
Provision for impairment losses on oil and gas properties
Loss from - associated Company and joint ventures
Bank administration expense
Loss of assets sale
Interest expense on lease liabilities
Income on the PKPU decision
Others net
Total*

Pendapatan atas keputusan PKPU merupakan pendapatan atas potongan utang berdasarkan surat perjanjian perdamaian antara PT Odira Energy Karang Agung (dalam PKPU) dengan para kreditor PT Odira Energy Karang Agung (dalam PKPU) tanggal 17 Desember 2019.

Revenues on PKPU decision represent revenues from payable deductions based on the peace agreement letter between PT Odira Energy Karang Agung (in PKPU) and the creditors of PT Odira Energy Karang Agung (in PKPU) dated December 17, 2019.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

33. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

33. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan Istimewa	Transaksi	Transaction	Nature of Relationship	Related Parties
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Pemegang saham	Utang Antar Perusahaan	Intercompany Account Payable	Shareholder	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	Pemegang saham	Utang Antar Perusahaan Piutang setoran Modal Perusahaan	Intercompany Account Payable Receivables of paid up capital on the Company	Shareholder	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan
PT Inpola Meka Energi	Entitas Asosiasi	Piutang Lain-lain	Others Receivable	Entity Associated	PT Inpola Meka Energi
PT Muba Daya Pratama	Afiliasi	Piutang dan Utang antar Perusahaan	Intercompany Account Receivable and Payable	Affiliation	PT Muba Daya Pratama
PT Meulaboh Power Generation	Entitas Asosiasi	Piutang Lain-lain Tidak Lancar	Other Account Receivable - Non Current	Entity Associated	PT Meulaboh Power Generation
Surya Mina Asinusa - KSO	Afiliasi	Investasi Jangka Panjang Piutang Lain-lain Tidak Lancar	Longterm Investment Other Account Receivable - Non Current	Affiliation	Surya Mina Asinusa - KSO
Direksi dan Komisaris	Personal Kunci	Remunerasi	Remuneration	Key Person	Commissioner and Director

Rincian akun dan saldo pihak berelasi lihat catatan No.8 - Piutang lain-lain, No. 12 - Piutang Lain-lain Tidak Lancar dan catatan No. 23 - Utang Lain-lain Jangka Panjang.

The detail accounts and balances of the related parties, see notes No. 8 - Others Receivable, No. 12 - Other Account Receivable - Non current and notes No. 23 - Other Payable Long-term.

Biaya remunerasi komisaris dan direksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.7.900.445.960 dan Rp.7.938.083.431.

The remuneration expenses of commissioners, and directors for years ended December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp.7,900,445,960 and Rp.7,938,083,431, respectively.

34. PERIKATAN

34. COMMITMENTS

1. PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PT PLN (PERSERO)

1. AGREEMENT WITH PT PLN (PERSERO)

Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) (2 X 6) MW Lokasi - Lampung Tengah Antara PT SDP (Entitas Anak) dengan PT PLN (Persero)

Power Purchase Agreement (PPA) Coal Fired Power Plant (PLTU) (2 X 6) MW Location – Central Lampung Between PT SDP (Subsidiary) and PT PLN (Persero)

PT SDP (entitas anak) telah mengadakan perjanjian pembelian tenaga listrik (PPA) dengan PT PLN sesuai dengan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) (2 x 6) MW Lokasi Lampung Tengah antara PT PLN dengan PT SDP (entitas anak) pada tanggal 21 Maret 2007.

PT SDP (subsidiary) entered into Power Purchase Agreement (PPA) with PT PLN in accordance with Purchase Agreement of Power Electricity (PPA) Coal Fired Power Plant (PLTU) at Central Lampung (2 x 6) MW capacity, between PT PLN and PT SDP (subsidiary) dated March 21, 2007.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Atas perjanjian tersebut, Perusahaan masuk sebagai kategori Penghasil Listrik Independen (IPP).

According to the agreement, the Company is listed as an Independent Power Producer category (IPP).

Selanjutnya, berdasarkan:

Whereas based on:

1. Berita Acara Renegosiasi Usulan Perubahan Harga dan Kondisi Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik PLTU Lampung Tengah 2 x 6 MW No. 04/BA/121/PANITIA IPP 5/2010 tanggal 9 Juni 2010.
2. Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. S-511/D5/02/2010 tanggal 1 Juli 2010 mengenai Hasil Verifikasi atas Hasil Evaluasi Penyesuaian Harga Beli Tenaga Listrik dari IPP PLTU Lampung Tengah pada PT PLN (Persero).
3. Persetujuan Komite Direktur PT PLN No. 025.K/KOMITE-IPP/DIR/2010 tanggal 9 Juli 2010 mengenai Persetujuan Penyesuaian Harga Beli Tenaga Listrik IPP PLTU Lampung Tengah 2 x 6 MW.
4. Akta Perdamaian antara PT PLN dengan PT SDP (entitas anak) terhadap Pembaharuan Penyesuaian Harga Jual Tenaga Listrik PLTU Lampung Tengah tanggal 10 Agustus 2010.
5. Surat dari Menteri Sumber Daya Energi dan Mineral mengenai Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik PLTU Lampung Tengah Milik PT SDP kepada PT PLN No. 6660/26/MEM.L/2010 tanggal 19 Oktober 2010.

1. Official report - Renegotiation Proposal of Price Adjustment and Condition of PPA PLTU Central Lampung 2 x 6 MW No. 04/BA/121/PANITIA IPP 5/2010 dated June 9, 2010.
2. Letter from State Auditor of Finance and Development (BPKP) No. S-511/D5/02/2010 dated July 1, 2010 regarding Verification Result of Price Adjustment Evaluation Proceed for IPP PLTU Central Lampung at PT PLN (Persero).
3. PT PLN Committee Directors Approval No. 025.K/KOMITE-IPP/DIR/2010 dated July 9, 2010 regarding Price Adjustment Approval for IPP PLTU Central Lampung 2 x 6 MW.
4. Reconciliation Deed of Price Adjustment and Renewal for PLTU Central Lampung between PT PLN with PT SDP (subsidiary) dated August 10, 2010.
5. Letter of Energy and Mineral Resources Minister regarding Approval of PT SDP Power Selling Price PLTU Central Lampung to PT PLN No. 6660/26/MEM.L/2010 dated October 19, 2010.

Perjanjian tersebut di atas telah diamandemen pada tanggal 28 Juni 2012, dengan perubahan-perubahan yang signifikan sebagai berikut:

The agreement mentioned above was amended at June 28, 2012, with the significant clauses' changes as follow:

- Menyesuaikan tarif komponen A.
- Masa berlaku perjanjian ini disepakati menjadi selama 25 tahun dimulai sejak *Commercial Operation Date (COD)*, kecuali diakhiri lebih awal oleh sesuatu yang ada sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian.
- Perusahaan harus mencapai target pengoperasian untuk unit 1 dalam 30 bulan dan unit 2 pada 36 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan amandemen.
- Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan rencana dan pelaksanaan terkait seluruh kebutuhan termasuk didalamnya penyimpanan, pasokan yang cukup dan dapat diandalkan untuk proyek selama masa penggunaan batubara. Sebelumnya Perusahaan harus mengajukan kepada PT PLN terkait rencana suplai dan semua persyaratan dalam kontrak untuk direviu dan mendapat persetujuan dari PT PLN.

- To adjust the tariff of component A.
- The validity period of this agreement agreed to be for 25 years starting from *Commercial Operation Date (COD)*, except if terminated earlier in accordance with condition in the agreement.
- The Company must reach the operating target for unit 1 in 30 months and unit 2 at 36 months from the date of signing the amendments.
- The Company shall be responsible for the preparation and planning implementation included storage, sufficient supply and reliable for project during the agreement term. Previously the Company shall submit to PT PLN its coal supply plan and all material term of coal supply contract shall be submitted to PT PLN for further review and approval.

(Lanjutan/Continued)

**2. KONTRAK BAGI HASIL DENGAN BADAN
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)**

PT OEKA (entitas anak) telah melakukan kesepakatan bagi hasil dengan SKK Migas pada tahun 2007 dengan uraian umum kesepakatan dan ketentuan dalam peraturan baru minyak dan gas bumi yang berlaku tersebut adalah sebagai berikut:

Kontrak Bagi Hasil (PSC) - Indonesia

PSC diberikan untuk mencari dan mengembangkan cadangan hidrokarbon komersial di area tertentu sebelum berproduksi secara komersial. Kontraktor pada umumnya diwajibkan untuk menyerahkan kembali persentase tertentu dari area kontrak pada tanggal tertentu, kecuali jika area tersebut terkait dengan permukaan lapangan dimana telah ditemukan minyak dan gas bumi.

Tanggung jawab dari kontraktor dalam PSC umumnya termasuk menyediakan dana atas semua aktivitas serta menyiapkan dan melaksanakan program kerja dan anggaran. Sebagai imbalannya, kontraktor diizinkan untuk melakukan lifting atas minyak mentah dan produksi gas yang menjadi haknya.

Bagi hasil dalam bentuk First Tranche Petroleum (FTP) sebesar 10% dari total produksi sebelum dikurangi cost recovery tersedia untuk Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan persentase hak bagi hasil masing-masing.

Jumlah produksi setelah FTP adalah jumlah yang tersedia untuk cost recovery bagi kontraktor yang dihitung berdasarkan referensi atas harga minyak mentah yang berlaku di Indonesia dan harga gas aktual. Setelah kontraktor memulihkan semua biaya yang dikeluarkan, Pemerintah berhak memperoleh pembagian tertentu dari hasil produksi minyak mentah dan gas bumi yang tersisa, selanjutnya kontraktor berhak atas sisanya sebagai bagian ekuitas (laba).

Kontraktor diwajibkan untuk membayar pajak badan atas bagian labanya berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada saat PSC tersebut ditandatangani.

PSC di Indonesia wajib memenuhi *Domestic Market Obligation* (DMO) dimana kontraktor harus menyediakan kepada pasar domestik sebanyak yang lebih rendah antara 25% dari (i) bagian kontraktor sebelum pajak atas total produksi minyak bumi dan (ii) bagian laba kontraktor atas minyak.

**2. PRODUCTION SHARING CONTRACT WITH
BADAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)**

PT OEKA (a subsidiary) sign into a production sharing contract with SKK Migas in 2007 with a general overview of the agreement and provisions in the applicable new oil and gas regulations explained as follows:

Production Sharing Contracts (PSC) - Indonesia

A PSC is awarded to contractors to explore hydrocarbon potential and to establish commercial hydrocarbon reserves in a specified area prior to commercial production. The contractor is generally required to relinquish specified percentages of the contract area on specified dates unless such designated areas correspond to the surface area of any field in which oil and gas has been discovered.

The responsibilities of a contractor under a PSC generally include financing all activities and preparing and executing the work program and budget. In return, the contractor may freely lift and dispose of its share of crude oil and gas production.

A sharing in the form of First Tranche Petroleum (FTP) of 10% out of total production before deduction of cost recovery is available to the Government and the contractor in line with their entitlement shares.

The balance of production after FTP is available for cost recovery for the contractor which is calculated in reference to the prevailing Indonesian crude price and actual gas prices. After the contractor has recovered all allowable costs, the Government is entitled to a specified share of the remaining natural gas and crude oil production and the contractor is entitled to the balance as its equity (profit) share.

The contractor is obligated to pay Indonesian corporate taxes on its specified profit share, generally, at the Indonesian corporate tax rate in effect at the time the PSC is executed.

PSC in Indonesia are subject to a Domestic Market Obligation (DMO) under which the contractor is required to supply the domestic market with the lesser of 25% of (i) the contractor's pre-tax share of total crude oil production and (ii) the contractor's profit share for oil.

(Lanjutan/Continued)

3. PERJANJIAN PEMBANGUNAN STORAGE TANK TERMINAL BESERTA FASILITAS PENDUKUNG DI PULAU NIPA PHASE - 1 ANTARA PT SURYA MINA ASINUSA KSO (ENTITAS ANAK MDN) DENGAN PT PP (PERSERO) TBK

Berdasarkan surat perjanjian No. 001/PK/NIPA/P-2017 tanggal 23 November 2017 antara Surya Mina Asinusa KSO dengan PT PP (Persero) Tbk, Divisi EPC, dilakukan PERJANJIAN PEMBANGUNAN STORAGE TANK TERMINAL BESERTA FASILITAS PENDUKUNG DI PULAU NIPA PHASE - 1 Terkait pembangunan Nipa Storage Tank Terminal berkapasitas 500.000 CBM dan fasilitas pendukung di Pulau Nipa. Nilai kontrak proyek tersebut sebesar USD 196.189.969,75 atau sejumlah Rp.2.656.019.810.475. Nilai kontrak tersebut belum termasuk PPN 10%. Harga kontrak adalah *Lump Sum Fixed*. Kontraktor wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak dalam bentuk *surety bond*.

Saat ini proyek pembangunan storage tank terminal beserta fasilitas pendukung di Pulau Nipa phase - 1 dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

4. PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN SURYA MINA ASINUSA KSO (ENTITAS ANAK MDN).

Berdasarkan Akta No. 13 dari Notaris Pratiwi Handayani, S.H., tanggal 21 April 2014 tentang Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian Pertahanan Di Pulau Nipa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah disepakati oleh Tuan Purnomo Yusgiantoro mewakili Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Tuan Wing Indrasgoro Direktur PT Surya Mina Bunkerindo dan sah mewakili untuk dan atas nama Surya Mina Asinusa Kerjasama Operasi (KSO) yang beranggotakan PT Surya Mina Bunkerindo dan PT Asinusa Putra Sekawan. Dimana Akta tersebut telah diamandemen terakhir oleh Akta addendum perjanjian Notaris yang sama No. 14 tanggal 19 April 2018 dibuat di hadapan Notaris Pratiwi Handayani, S.H.,

Perjanjian ini bertujuan untuk mengembangkan zona pertahanan berbasis ekonomi di Pulau Nipa sebagai salah satu pulau kecil terluar yang merupakan kawasan strategis nasional tertentu dan memiliki titik dasar (*base point*) pengukuran garis batas wilayah Negara.

3. AGREEMENT OF TANK TERMINAL STORAGE DEVELOPMENT AND SUPPORTING FACILITIES IN NIPA ISLAND PHASE - 1 PT SURYA MINA ASINUSA KSO (SUBSIDIARY MDN) WITH PT PP (PERSERO) TBK

Based on the agreement letter No. 001/PK/NIPA/ P-2017 dated November 23, 2017 between Surya Mina Asinusa KSO and PT PP (Persero) Tbk, EPC Division, the AGREEMENT OF TANK TERMINAL STORAGE DEVELOPMENT AND SUPPORTING FACILITIES IN NIPA ISLAND PHASE - 1 Related to the construction of the Nipa Storage Tank Terminal with a capacity of 500,000 CBM and supporting facilities on Nipa Island. The contract value of the project is USD 196,189,969.75 or a total of Rp.2,656,019,810,475. The contract value does not include 10% VAT. The contract price is Lump Sum Fixed. The contractor is obliged to submit a bank guarantee worths of 5% of the contract value in the form of a surety bond.

Currently agreement of tank terminal storage development and supporting facilities in Nipa Island phase -1 terminated indefinitely.

4. JOINT OPERATION AGREEMENT (JO) BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND SURYA MINA ASINUSA JO (SUBSIDIARY MDN).

Based on Deed No. 13 of Notary Pratiwi Handayani, S.H., dated April 21, 2014 concerning the Utilization of Some Land-Owned Property in the Ministry of Defense on Nipa Island, Batam City, Riau Islands Province, which was agreed by Mr. Purnomo Yusgiantoro representing the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as First Party and Mr. Wing Indrasgoro Director of PT Surya Mina Bunkerindo and legally represent for and on behalf of Surya Mina Asinusa Joint Operations (JO) consisting of PT Surya Mina Bunkerindo and PT Asinusa Putra Sekawan. As lastly amended by the Deed of Addendum of cooperation agreement No. 14 dated April 19, 2018 made before the Notary Pratiwi Handayani, S.H.,

This agreement's purpose to develop an economy-based defense zone in Nipa Island as one of the outermost small islands which is a particular national strategic area and has a base point for measuring the country's territorial boundaries.

(Lanjutan/Continued)

Objek Kerjasama Pemanfaatan (Objek KSP) adalah Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan berupa sebidang tanah seluas 10.000 m², terletak di Pulau Nipa. Objek tersebut dihitung sebagai nilai investasi Pihak Kesatu sebesar Rp.72.652.743.363 berdasarkan nilai buku/nilai reklamasi.

The Object of Utilization Cooperation (KSP Object) is a State-Owned Property of the Ministry of Defense in the form of a plot of land measuring 10,000 m², located on Nipa Island. The object is calculated as the investment value of the First Party in the amount of Rp.72,652,743,363 based on the book value/ reclamation value.

Penerimaan langsung Negara yang wajib disetorkan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu KSP Pulau Nipa, terdiri dari:

Direct state revenue that must be deposited by the Second Party during the term of the Nipa Island KSP, consist of:

- a. Kontribusi tetap sebesar 0,5% dari nilai investasi Pemerintah (sebesar Rp.363.263.716,82) dengan asumsi kenaikan nilai investasi sebesar 7,5% (sebesar Rp.37.561.251.276) selama jangka waktu KSP Pulau Nipa ini.
- b. Nilai pembagian keuntungan (profit sharing) KSP Pulau Nipa adalah sebesar 6,23% dari net cash flow proyek kerja sama dengan nilai minimal sebesar Rp.300.047.443.500 selama jangka waktu KSP Pulau Nipa.
- c. Nilai hibah awal berupa bangunan kantor tertutup, speedboat dan furniture/ peralatan kantor adalah sebesar Rp.8.340.000.000, yang nantinya akan ditetapkan status penggunaannya sebagai barang milik Negara pada Kementerian Pertahanan.

- a. *Fixed contribution of 0.5% of the value of Government investment (amounting to Rp.363,263,716.82) assuming an increase in the investment value of 7.5% (amounting to Rp.37,561,251,276) during the term of the Nipa Island KSP.*
- b. *The value of profit sharing of KSP of Nipa Island is 6.23% of the net cash flow of the project work together with a minimum value of Rp.300,047,443,500 during the term of the KSP of Nipa Island.*
- c. *The initial grant value in the form of closed office building, speedboat and office furniture/ equipment is Rp.8,340,000,000, whose status will be determined later as State property in the Ministry of Defense.*

Dari nilai hibah tersebut telah dikeluarkan sebesar 5% (Rp.417.000.000) sebagai jaminan dengan masa berlaku sekurangkurangnya 36 bulan sejak dikeluarkan.

Of the grant value has been issued at 5% (Rp.417,000,000) as collateral with a validity period of at least 36 months from the date of issuance.

- d. Nilai sisa aset barang milik Negara dari KSP Pulau Nipa berupa bangunan tangki minyak beserta fasilitas pendukungnya yang akan diterima pada akhir jangka waktu KSP Pulau Nipa adalah minimal sebesar Rp.576.024.033.880.

- d. *The remaining value of State property assets from Nipa Island KSP in the form of oil tank buildings and supporting facilities that will be received at the end of the term of the Nipa Island KSP is a minimum of Rp.576,024,033,880.*

Total penerimaan langsung negara minimal selama jangka waktu KSP Pulau Nipa adalah sebesar Rp.921.972.728.656.

The total direct state revenue is at least during the KSP period of Nipa Island amounting to Rp.921,972,728,656.

Dalam perjanjian terdapat beberapa sanksi yaitu:

In the agreement there are several sanctions, as follows:

- a. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini belum memulai pembangunan sarana dan prasarana penyimpanan minyak beserta fasilitas pendukungnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, Pihak Pertama berhak mengakhiri perjanjian ini.

- a. *If within a period of 1 year after the signing of this agreement the construction of facilities and infrastructure for storing oil and its supporting facilities as referred to in article 5 has not begun, the First Party has the right to terminate this agreement.*

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- b. Dalam hal Pihak Kedua lalai dalam melakukan pembayaran atas pembagian keuntungan dari waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (6) dan ayat (12), maka pihak kedua dikenakan denda sebesar 1% per hari dari nilai pembagian keuntungan tahun berjalan.

Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak ditandatangani oleh para pihak, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 30 tahun berdasarkan kesepakatan para pihak dan prioritas diberikan kepada pihak kedua.

Berdasarkan Akta Addendum No. 14 dari Notaris Pratiwi Handayani, S.H., tanggal 19 April 2018 tentang Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian Pertahanan Di Pulau Nipa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat beberapa perubahan atas perjanjian tersebut sebagai berikut:

Perubahan pertama terdapat pada Tahap Pembangunan:

- a. Pihak Kedua harus melaksanakan kegiatan persiapan dan perencanaan teknis konstruksi dalam jangka waktu yang sebelumnya paling lama 12 bulan menjadi 57 bulan kalender terhitung sejak perjanjian KSP Pulau Nipa ditandatangani.
- b. Pihak Kedua harus melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi dalam jangka waktu yang sebelumnya paling lama 36 bulan menjadi 84 bulan kalender terhitung sejak perjanjian KSP Pulau Nipa ditandatangani.
- c. Pihak Kedua harus membangun dan mengadakan peralatan hibah awal dalam jangka waktu yang sebelumnya paling lambat 36 bulan menjadi 72 bulan kalender terhitung sejak Perjanjian KSP Pulau Nipa ini ditandatangani untuk hibah awal berupa kantor terintegrasi *furniture* dan sarana pendukung perkantoran.

Perubahan kedua terdapat pada Penerimaan Langsung Negara tentang pembayaran keuntungan KSP Pulau Nipa yang sebelumnya paling cepat dimulai pada tahun ke-4 berubah menjadi pada tahun ke-8 sejak ditandatanganinya perjanjian KSP Pulau Nipa.

- b. *In the event that the Second Party fails in making payment for the distribution of profits from the time referred to in article 16 paragraph (6) and paragraph (12), the second party is subject to a fine of 1% per day from the value of profit sharing for the current year.*

The term of this Agreement is valid for 30 years after being signed by the parties, and can be extended for a period of 30 years based on the agreement of the parties and priority given to the second party.

Based on the Deed of Addendum No. 14 of Notary Pratiwi Handayani, S.H., dated April 19, 2018 concerning the Utilization of Some Land-Owned Property in the Ministry of Defense on Nipa Island, Batam City, Riau Islands Province. There are several changes to the agreement as follows:

The first change is in the Development Phase:

- a. *Second Party must carry out preparatory activities and construction technical planning within a previous period of a maximum of 12 months to 57 calendar months as of the signing of the Nipa Island KSP agreement.*
- b. *Second Party must carry out construction activities within a previous period of a maximum of 36 months to 84 calendar months as of the signing of the Nipa Island KSP agreement.*
- c. *Second Party must build and hold initial grant equipment within the previous period no later than 36 months to 72 calendar months as of the Nipa Island KSP Agreement signed for the initial grant in the form of integrated office furniture and office support facilities.*

The second amendment was found in the Direct State Revenue regarding KSP Nipa Island Profit Sharing where as the existing agreement started as soon as to the 4th year, which later changed to the 8th year since the signing of the Nipa Island KSP agreement.

(Lanjutan/Continued)

**5. PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)
ANTARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
SURYA MINA ASINUSA KSO (ENTITAS
ANAK MDN).**

Berdasarkan Akta No. 09 dari Notaris Pratiwi Handayani, S.H., tanggal 16 April 2014 tentang Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Pulau Nipa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah disepakati oleh Tuan Sharif Cicip Sutardjo Mewakili Kementerian Dan Perikanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Tuan Wing Indrasmoro selaku Direktur PT Surya Mina Bunkerindo dan sah mewakili untuk dan atas nama Surya Mina Asinusa Kerjasama Operasi (KSO) sebagai yang beranggotakan PT Surya Mina Bunkerindo dan PT Asinusa Putra Sekawan sebagaimana amendemen terakhir oleh Akta No. 14 tanggal 19 April 2018.

Perjanjian ini bertujuan untuk mengembangkan zona pertahanan berbasis ekonomi di Pulau Nipa sebagai salah satu pulau kecil terluar yang merupakan kawasan strategis nasional tertentu dan memiliki titik dasar (base point) pengukuran garis batas wilayah Negara.

Objek Kerjasama Pemanfaatan (Objek KSP) adalah barang milik negara Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa sebidang tanah seluas 240.000 m², terletak di Pulau Nipa. Objek tersebut dihitung sebagai nilai investasi Pihak Kesatu sebesar Rp.231.020.559.930 berdasarkan nilai buku/nilai reklamasi.

Penerimaan langsung Negara yang wajib disetorkan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu KSP Pulau Nipa, terdiri dari:

- a. Kontribusi tetap sebesar 0,5% dari nilai investasi Pihak Pertama (Rp.1.155.102.799) dengan asumsi kenaikan nilai investasi sebesar 7,5% (Rp.119.436.939.332) selama jangka waktu KSP Pulau Nipa ini.
- b. Nilai pembagian keuntungan (profit sharing) KSP Pulau Nipa adalah sebesar 6,95% dari net cash flow proyek kerjasama dengan nilai minimal sebesar Rp.1.414.905.240.000 selama jangka waktu KSP Pulau Nipa.
- c. Nilai hibah awal berupa bangunan kantor terintegrasi, speedboat dan furniture/peralatan kantor adalah sebesar Rp.5.200.000.000, yang nantinya akan ditetapkan status penggunaannya sebagai barang milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**5. JOINT OPERATION AGREEMENT (JO)
BETWEEN THE MINISTRY OF MARITIME
AFFAIRS AND FISHERIES OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND SURYA
MINA ASINUSA JO (SUBSIDIARY MDN).**

Based on Deed No. 09 of Notary Pratiwi Handayani, S.H., dated April 16, 2014 concerning the Utilization of Some of State-Owned Property in the form of land in the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in Nipa Island, Batam City, Riau Islands Province, which was agreed upon by Mr. Sharif Cicip Sutardjo Representing the Ministry and Fisheries of the Republic of Indonesia hereinafter referred to as First Party and Mr. Wing Indrasmoro Director of PT Surya Mina Bunkerindo and legally represented for and on behalf of Surya Mina Asinusa Joint Operations (JO) consisting of PT Surya Mina Bunkerindo and PT Asinusa Putra Sekawan as lastly amended by Deed of addendum No. 14 dated April 19, 2018.

This agreement aims to develop an economy-based defense zone in Nipa Island as one of the outermost small islands which is a particular national strategic area and has a base point for measuring the country's territorial boundaries.

The Utilization Cooperation Object (KSP Object) is a state-owned property of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in the form of a plot of land covering 240,000 m², located on Nipa Island. The object is calculated as the First Party investment value of Rp.231,020,559,930 based on book value/ reclamation value.

Direct state revenue that must be deposited by the Second Party during the term of the Nipa Island KSP, consisting of:

- a. *Fixed contribution of 0.5% of the investment value of the First Party (Rp.1,155,102,799) assuming an increase in the investment value of 7.5% (Rp.119,436,939,332) during the term of the Nipa Island KSP.*
- b. *The value of profit sharing of Nipa Island KSP is 6.95% of the net cash flow cooperation project with a minimum value of Rp.1,414,905,240,000 during the KSP period of Nipa Island.*
- c. *The initial grant value in the form of an integrated office building, speedboat and office furniture/equipment is Rp.5,200,000,000, which later will be determined the status of its use as State property at the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries.*

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Dari nilai hibah tersebut, telah dikeluarkan sebesar 5% (Rp.260.000.000) sebagai jaminan dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 36 bulan sejak dikeluarkan.

Of the grant value, it has been issued at 5% (Rp.260,000,000) as collateral with a validity period of at least 36 months from the date of issuance.

- d. Nilai sisa aset barang milik Negara dari KSP Pulau Nipa berupa bangunan tangki minyak beserta fasilitas pendukungnya yang akan diterima pada akhir jangka waktu KSP Pulau Nipa adalah minimal sebesar Rp.1.704.073.842.605.

- d. The remaining value of State property assets from Nipa Island KSP in the form of oil tank buildings and supporting facilities that will be received at the end of the term of the Nipa Island KSP is a minimum of Rp.1,704,073,842,605.*

Total penerimaan langsung negara minimal selama jangka waktu KSP Pulau Nipa adalah sebesar Rp.3.243.616.021.937.

The total direct state revenue is at least during the KSP period of Nipa Island amounting to Rp.3,243,616,021,937.

Dalam perjanjian terdapat beberapa sanksi yaitu:

In the agreement there are several sanctions, namely:

- a. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini belum memulai pembangunan sarana dan prasarana penyimpanan minyak beserta fasilitas pendukungnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, Pihak Pertama berhak mengakhiri perjanjian ini.
- b. Dalam hal Pihak Kedua lalai dalam melakukan pembayaran atas pembagian keuntungan dari waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (6) dan ayat (12), maka pihak kedua dikenakan denda sebesar 1% per hari dari nilai pembagian keuntungan tahun berjalan.

- a. If within a period of 1 year after the signing of this agreement the construction of facilities and infrastructure for storing oil and its supporting facilities as referred to in article 5 has not begun, the First Party has the right to terminate this agreement.*
- b. In the event that the Second Party fails in making payment for the distribution of profits from the time referred to in article 16 paragraph (6) and paragraph (12), the second party is subject to a fine of 1% per day from the value of profit sharing for the current year.*

Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak ditandatangani oleh para pihak, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 30 tahun berdasarkan kesepakatan para pihak dan prioritas diberikan kepada pihak kedua.

The term of this Agreement is valid for 30 years after being signed by the parties and can be extended for a period of 30 years based on the agreement of the parties and priority given to the second party.

Berdasarkan Akta addendum No.06 dari Notaris Pratiwi Handayani, S.H. tanggal 16 April 2018 tentang Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Pulau Nipa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat beberapa perubahan atas perjanjian tersebut sebagai berikut:

Based on the Deed of Addendum No. 06 of Notary Pratiwi Handayani, S.H. dated April 16, 2018 concerning the Utilization of a Part of Land Owned Property in the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in Nipa Island, Batam City, Riau Islands Province. There are several changes to the agreement as follows:

Perubahan pertama terdapat pada Tahap Pembangunan:

The first change is in the Development Phase:

- a. Pihak kedua harus melaksanakan kegiatan persiapan dan perencanaan teknis konstruksi dalam jangka waktu yang sebelumnya paling lama 12 bulan menjadi 57 bulan kalender terhitung sejak perjanjian KSP Pulau Nipa ditandatangani.

- a. Second party must carry out preparatory activities and construction technical planning within a previous period of a maximum of 12 months to 57 calendar months as of the signing of the Nipa Island KSP agreement.*

(Lanjutan/Continued)

- b. Pihak kedua harus melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi dalam jangka waktu yang sebelumnya paling lama 36 bulan menjadi 84 bulan kalender terhitung sejak perjanjian KSP Pulau Nipa ditandatangani.
- c. Pihak kedua harus membangun dan mengadakan peralatan hibah awal dalam jangka waktu yang sebelumnya paling lambat 36 bulan menjadi 72 bulan kalender terhitung sejak Perjanjian KSP Pulau Nipa ini ditandatangani untuk hibah awal berupa kantor terintegrasi furniture dan sarana pendukung perkantoran.
- b. *Second party must carry out construction building activities within a previous period of a maximum of 36 months to 84 calendar months as of the signing of the Nipa Island KSP agreement.*
- c. *Second party must build and hold initial grant equipment within the previous period no later than 36 months to 72 calendar months as of the Nipa Island KSP Agreement signed for the initial grant in the form of integrated office furniture and office support facilities.*

Perubahan kedua terdapat pada Penerimaan Langsung Negara tentang pembayaran keuntungan (*Profit Sharing*) KSP Pulau Nipa yang sebelumnya paling cepat dimulai pada tahun ke-4 berubah menjadi pada tahun ke-8 sejak ditandatanganinya perjanjian KSP Pulau Nipa ini.

The second amendment was found at the State Direct Revenue regarding the (Profit Sharing) payment. The Nipa Island KSP where as the existing agreement started as soon as to the 4th year was changed to the 8th year since the signing of the Nipa Island KSP agreement.

Perusahaan untuk sementara mengurangi aktivitas konstruksi di Proyek Nipa karena sedang mengkaji ulang serta menjajaki prospek bisnis yang lebih baik dibantu konsultan internasional. Aktivitas konstruksi akan segera mulai kembali bila kajian tersebut telah selesai.

The Company has temporarily slowing down construction activities at the Nipa Project because it is reviewing and exploring better business prospects supported by international consultants. Construction activities will resume immediately when the study is completed.

35. KONTINJENSI

PT SDP (entitas anak)

1. Somasi atas kewajiban pelunasan utang kepada PT Murah Rejeki Jaya Sempurna

Pada pelaksanaan kegiatan produksi listrik PT SDP (Entitas anak) melakukan Perjanjian jual beli batu bara kepada PT Murah Rejeki Jaya Sempurna dimana sebelumnya CV Panca Sukses Makmur berdasarkan perjanjian jual beli batubara No. 001/PJBB/MRJS-SDP/II/2020 tanggal 11 Februari 2020. PT SDP (Entitas anak) memiliki kewajiban pembayaran kepada PT Murah Rejeki Jaya Sempurna sebesar Rp.16.274.739.537 yang sampai saat ini belum diselesaikan.

PT SDP (Entitas anak) telah beberapa kali menerima somasi dari kuasa hukum PT Murah Rejeki Jaya Sempurna terakhir berdasarkan surat Tanggapan dan Klarifikasi No: 059/S.Pdt/SP/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 menerangkan bahwa Perusahaan paling lambat membayar sebesar Rp.3.000.000.000 pada akhir Agustus 2021 dan mengenai sisanya Perusahaan diwajibkan memberikan skema pembayaran paling lambat akhir November 2021.

35. CONTINGENCIES

PT SDP (Subsidiary)

1. The Somasi on the obligation to pay off debts to PT Murah Rejeki Jaya Sempurna

In the implementation of electricity production activities, PT SDP (Subsidiary) entered into a coal sale and purchase agreement with PT Murah Rejeki Jaya Sempurna where previously CV Panca Sukses Makmur was based on a coal sale and purchase agreement No. 001/PJBB/MRJS-SDP/II/2020 dated February 11, 2020. PT SDP (Subsidiary) has a payment obligation to PT Murah Rejeki Jaya Sempurna amounted to, Rp.16,274,739,537 which not yet to be resolved until now.

The Company has received several subpoenas from the lawyer of PT Murah Rejeki Jaya Sempurna, the latest based on the Response and Clarification letter No: 059/S.Pdt/SP/VIII/2021 dated August 9, 2021, explaining that the Company must pay Rp.3,000,000,000 at the last by end of August 2021 and regarding the remainder, the Company is required to provide a payment scheme no later than the end of November 2021.

(Lanjutan/Continued)

Jika PT SDP (Entitas anak) tidak mampu menyelesaikan kewajiban kepada PT Murah Rejeki Jaya Sempurna, maka akan dipertimbangkan untuk mengundang secara terbuka untuk melakukan penagihan melalui media massa dan akan dilakukan Langkah hukum melalui Kepailitan dan atau Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan akan dipertimbangkan untuk diajukan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sesuai dengan konfirmasi legal No 002/PPE/LEG/SP/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, saat ini PT SDP sedang dalam proses negosiasi dalam rangka penyelesaian somasi tersebut.

2. Klaim kerugian atas sengketa tarif listrik jual beli listrik PT SDP (entitas anak) dengan PT PLN (Persero).

Perusahaan menerima somasi dari lawyer PT Valindo berdasarkan surat somasi No: 109/Rd/Somasi/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 menerangkan bahwa dalam surat somasi tersebut, PT Valindo Teknik Pratama menyatakan bahwa telah berulang kali meminta PT. Sepoetih Daya Prima untuk segera melakukan pembayaran akan tetapi PT. Valindo Teknik Pratama tidak juga mendapatkan kepastian penyelesaian pembayaran menyeluruh atas kewajiban PT. Sepoetih Daya Prima kepada PT. Valindo Teknik Pratama.

Berdasarkan hal-hat tersebut, maka PT. Valindo Teknik Pratama memberi Somasi/Peringatan kepada PT. Sepoetih Daya Prima agar segera melaksanakan pembayaran sebesar Rp.816.693.400, apabila dengan alasan apapun, jumlah tunggakan tidak dibayarkan secara penuh atau diselesaikan paling lambat 14 hari terhitung sejak surat somasi terbit, maka PT Valindo Teknik Pratama akan menggunakan haknya untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui mekanisme hukum pidana, hukum perdata atau melalui pengadilan niaga dan untuk setiap pengeluaran dan biaya yang timbul akibat permasalahan ini ditanggung oleh PT Sepoetih Daya Prima.

Sesuai dengan konfirmasi legal No 002/PPE/LEG/SP/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, saat ini PT SDP sedang dalam proses negosiasi dalam rangka penyelesaian somasi tersebut.

If PT SDP (Subsidiary) is unable to complete its obligations to PT Murah Rejeki Jaya Sempurna, it will be considered to openly invite billing through the mass media and legal steps will be taken through Bankruptcy and or Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) and will be considered for submission. to The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK).

In accordance with legal confirmation No 002/PPE/LEG/SP/I/2022 dated January 27, 2022, PT SDP is currently in the process of negotiating the settlement of the somations.

2. Claims for losses on electricity tariff disputes for buying and selling electricity from PT SDP (a subsidiary) with PT PLN (Persero).

The Company received a summons from PT Valindo's lawyer based on the summons No: 109/Rd/Somasi/V/2021 dated May 24, 2021 explaining that in the summons, PT Valindo Teknik Pratama stated that it had repeatedly asked PT. Sepoetih Daya Prima to immediately make payments but PT. Valindo Teknik Pratama also did not get certainty of the complete payment settlement for the liability of PT. Sepoetih Daya Prima to PT. Valindo Teknik Pratama.

Based on these things, then PT. Valindo Teknik Pratama gave a summons/warning to PT. Sepoetih Daya Prima to immediately make a payment of Rp.816,693, if for any reason, the arrears are not paid in full or settled no later than 14 days from the issuance of the summons, PT Valindo Teknik Pratama will exercise its right to take the necessary legal steps to resolve this issue through criminal law mechanisms, civil law or through a commercial court and for any expenses and costs arising from this matter to be borne by PT Sepoetih Daya Prima.

In accordance with legal confirmation No 002/PPE/LEG/SP/I/2022 dated January 27, 2022, PT SDP is currently in the process of negotiating the settlement of the somations.

(Lanjutan/Continued)

3. Klaim kerugian atas sengketa tarif listrik jual beli listrik PT SDP (entitas anak) dengan PT PLN (Persero).

Berdasarkan surat konfirmasi legal No. 002/PPE/LEG/SP/1/2022 tanggal 27 Januari 2021, terdapat klaim kerugian PT SDP (Entitas anak) kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp.79,4 milyar, atas kerugian yang timbul dari penggunaan NPHR sementara sebesar 4.400, klaim atas kerugian konsumsi batubara selama penetapan NPHR sementara oleh PT PLN (Persero), klaim atas denda AFPM akibat kerugian batubara masing masing sejak tahun 2014 hingga sekarang, dan klaim selisih tarif komponen B&D. Dengan rincian kronologi sebagai berikut:

a. Kronologi penetapan tarif NPHR.

Pada tahun 2014 sesuai kesepakatan PT PLN (Persero) dan PT SDP pada tanggal 10 Juni 2013, bahwa penetapan NPHR PT SDP berdasarkan pengujian PT PLN Jaser (Pusertif) dimana hasil *Performance Test* PT PLN Jaser 18-19 Februari 2014 diperoleh NPHR sebesar 4,914 kCal/kWh, dan pada tanggal 26 Juni 2014 PT PLN (Persero) menolak hasil *Performance Test* dan meminta PT PLN Jaser melakukan test ulang, sekaligus menetapkan NPHR sementara sebesar 4.400 kCal/kWh, lalu PT SDP agar PT PLN (Persero) mau membayar tagihan listrik SDP, maka sejak COD Juni 2014 pembayaran tagihan listrik menggunakan NPHR sementara sebesar 4,400 kCal/kWh.

Pada tahun 2015 *Performance Test* ulang (PT-2) dilakukan pada tanggal 16-17 September 2015, diperoleh NPHR 4,405 kCal/kWh. Dimana laporan baru diberikan oleh PT PLN (Persero) pada November 2016 ke PT SDP.

Pada tahun 2016 hingga 2019 Perusahaan berkali-kali melakukan rapat dengan PT PLN (Persero) namun tidak menemukan titik temu, hingga akhirnya PT SDP meminta agar dilakukan mediasi oleh Kementerian ESDM - Gatrik, akan tetapi pada tahun 2020 mediasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM - Gatrik tidak mencapai kesepakatan dikarenakan PT PLN (Persero) menolak membuka dan mereview bersama hasil PT-2 dengan Gatrik. PT PLN (Persero) mengirim surat bahwa NPHR definitif yang digunakan dalam kontrak adalah berdasarkan NPHR sementara dan direspon oleh PT SDP melalui surat

3. Claims for losses on electricity tariff disputes for buying and selling electricity from PT SDP (a subsidiary) with PT PLN (Persero).

Based on the legal confirmation letter No. 002/PPE/LEG/SP/1/2022 dated January 27, 2021, there is a claim for losses from PT SDP (subsidiary) to PT PLN (Persero) amounting to Rp.79.4 billion, for losses arising from use of a temporary NPHR of 4,400, claims for loss of coal consumption during the determination of the temporary NPHR by PT PLN (Persero), claims for AFPM fines due to coal losses respectively from 2014 to the present, and claims for the difference in tariff for the B&D component. With the details of the chronology as follows:

a. Chronology of NPHR tariff setting.

In 2014 according to the agreement between PT PLN (Persero) and PT SDP on June 10, 2013, that the determination of PT SDP's NPHR was based on the PT PLN Jaser (Pusertif) test where the results of the PT PLN Jaser *Performance Test* February 18-19, 2014 obtained an NPHR of 4.914 kCal/kWh, and at dated June 26, 2014 the PT PLN (Persero) rejected the *Performance Test* results and asked PT PLN Jaser to do a retest, as well as set a temporary NPHR of 4,400 kCal/kWh, then PT SDP asked PT PLN (Persero) to pay PT SDP electricity bills, so since COD in June 2014 the payment of electricity bills uses a temporary NPHR of 4.400 kCal/kWh.

In 2015, another *Performance Test* (PT-2) was conducted on September 16-17, 2015, and obtained an NPHR of 4.405 kCal/kWh. Where a new report was given by PT PLN (Persero) in November 2016 to PT SDP.

In 2016 to 2019 the Company repeatedly held meetings with PT PLN (Persero) but did not find a common ground, until finally PT SDP asked for a mediation by the Ministry of Energy and Mineral Resources - Gatrik, but in 2020 the mediation conducted by the Ministry of Energy and Mineral Resources - Gatrik did not reached an agreement because PT PLN (Persero) refused to open and jointly review the results of PT-2 with Gatrik. PT PLN (Persero) sent a letter that the definitive NPHR used in the contract was based on the temporary NPHR and responded by PT SDP through a PT PLN (Persero) letter

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

PT PLN (Persero) bahwa PT SDP menolak NPHR sementara dijadikan NPHR definitif karena tidak berdasarkan perhitungan/kaidah teknis maupun bisnis, dimana PT SDP meminta PT-2 untuk direview bersama, namun sampai saat ini PT PLN (Persero) belum menanggapi surat tersebut.

Pada tahun 2021 berdasarkan berita acara kesepakatan untuk verifikasi perhitungan NPHR oleh LAPI ITB, tanggal 23 September 2021, PLN dan SDP sepakat untuk menunjuk LAPI ITB untuk melakukan reuvi penetapan NPHR IPP PLTU Lampung Tengah, dan sepakat bahwa hasil kajian/rekomendasi dari LAPI ITB terkait NPHR pada PLTU Lampung Tengah tersebut akan di teriman dan tunduk pada persetujuan korporatif masing-masing pihak.

Sampai tanggal pelaporan penyesuaian tarif tersebut masih dalam proses.

b. Kronologi penyesuaian tarif B&D

Pada tahun 2015 PT SDP mengajukan permohonan penyesuaian tarif komponen B&D mengacu pada *Clause 11 point 1 PPA*, dan disetujui oleh PLN dan meminta lembaga independen untuk melakukan audit teknologi dan keuangan sesuai *Clause 11 point 1 PPA*, dan disetujui oleh PLN atas permintaan PT SDP dimana BPPT sebagai Lembaga Independent yang akan melakukan audit.

Pada tanggal 31 Oktober 2016 PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa penyesuaian tarif B&D yang bisa diterima sebesar Rp.213/kWh, namun tertunda karena adanya perubahan pejabat PT PLN (Persero) yang menangani, lalu pada tanggal 2 Oktober 2017, PT PLN (Persero) melalui pejabat yang baru melakukan review ulang dan menyampaikan bahwa penyesuaian tarif B&D yang bisa diterima sebesar Rp.161/kWh.

Pada tahun 2018 PT PLN (Persero) kembali melakukan review ulang dan menyampaikan bahwa tarif yang bisa diterima PT PLN (Persero) adalah Rp.120/kWh, yang ditindak lanjuti dengan pertemuan direksi PT PP (Persero) Tbk dan PT PLN (Persero) ditahun 2019 dan menyepakati agar masalah penyelesaian tarif dapat segera dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu evaluasi (audit) BPKP.

that PT SDP rejected the temporary NPHR as the definitive NPHR because it was not based on technical or business calculations/rules, where PT SDP asked PT-2 for review together, but until now PT PLN (Persero) has not responded to the letter.

In 2021 based on the minutes of the agreement to verify the NPHR calculation by LAPI ITB, on September 23, 2021, the PLN and SDP agreed to appoint LAPI ITB to review the determination of the NPHR IPP PLTU Central Lampung, and agreed that the results of the study/recommendations from LAPI ITB were related The NPHR at the Central Lampung PLTU will be accepted and subject to the corporate approval of each party.

Until reporting date, the tariff adjustment is still in process.

b. Chronology of B&D tariff adjustments

In 2015 PT SDP submitted an application for tariff adjustment for B&D components referring to Clause 11 point 1 PPA, and was approved by PLN and asked an independent institution to conduct technology and financial audits according to Clause 11 point 1 PPA, and was approved by PLN at the request of PT SDP where BPPT as an Independent Institution that will conduct an audit.

On October 31, 2016, PT PLN (Persero) stated that the acceptable B&D tariff adjustment was Rp.213/kWh, but it was delayed due to a change in the PT PLN (Persero) official in charge, then on October 2, 2017, PT PLN (Persero) through a new official reviewed and conveyed that the adjustment tariff B&D that can be received is Rp.161/kWh.

In 2018 PT PLN (Persero) reviewed for the second time and told that the tariff PT PLN (Persero) could accept was Rp.120/kWh, which was followed up with a meeting of the directors of PT PP (Persero) Tbk and PT PLN (Persero) in 2019 and agreed that the problem of tariff resolution could be immediately proceed to the next stage, namely the evaluation (audit) of the BPKP.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Pada tahun 2020 telah dilakukan pembahasan awal dengan BPKP, namun belum bisa dilanjutkan karena PLN meminta agar BPKP mengaudit tarif B&D namun hasilnya tidak boleh melebihi yang diminta PT PLN (Persero) yakni 120/kwh, dan PT SDP menolak permintaan PT PLN (Persero) tersebut dan meminta agar kewenangan BPKP tidak dibatasi atas tarif. PT SDP menyampaikan bahwa apapun hasil evaluasi BPKP harus diikuti oleh PT PLN (Persero) dan PT SDP.

Pada tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan untuk verifikasi kesepakatan komponen listrik B dan D oleh BPKB IPP PLTU Lampung Tengah 2 x 6 MW tanggal 23 September 2021, PLN dan SDP sepakat bahwa usulan penyesuaian harga komponen B dan D yang sebelumnya sebesar Rp.49,14/kWh untuk komponen B menjadi Rp.102/kWh, dan usulan komponen D yang sebelumnya Rp.18,43/kWh menjadi Rp.18,43/kWh. Usulan tersebut sesuai pasal II ayat I PPA akan dilakukan peninjauan dan verifikasi oleh BPKP, untuk selanjutnya dijadikan dasar pengajuan permohonan penyesuaian harga kepada Menteri ESDM. Dan amandemen PPA terkait penyesuaian harga komponen listrik B dan D tersebut dilaksanakan setelah penyesuaian harga pembelian tenaga listrik dari menteri ESDM.

Sampai tanggal pelaporan penyesuaian tarif tersebut masih dalam proses.

PT OEKA (entitas anak)

Pada tahun 2019 Perusahaan melakukan perjanjian perdamaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan para kreditor Perusahaan (dalam PKPU), sesuai dengan surat perjanjian perdamaian antara Perusahaan dengan para kreditor Perusahaan (dalam PKPU) tanggal 17 Desember 2019, dan Surat Putusan Pengesahan Perdamaian (HOMOLOGASI) Nomor 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2019. Terhadap keputusan tersebut terdapat kreditor yang melakukan banding.

Berdasarkan surat korespondensi Legal Perusahaan No. 133/EXT/OEKA/D00/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, terdapat 2 Perkara hukum yang sedang dijalani oleh Perusahaan antara lain:

1. Perkara Perdata No. 564/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, antara PT Dharma Empat Lima Abadi, PT Menara Gading Putih, dan PT Ogan Lematang

In 2020, an initial discussion was held with BPKP, but it could not be continued because PT PLN (Persero) asked BPKP to audit the B&D rates but the results could not exceed what PT PLN (Persero) requested, which is 120/kwh, and PT SDP rejected PT PLN's request and asked that BPKP's authority not be limited over tariff. PT SDP told that whatever the results of the BPKP evaluation must be followed by PT PLN (Persero) and PT SDP.

In 2021, based on the Minutes of Agreement to verify the agreement for electrical components B and D by BPKB IPP PLTU Central Lampung 2 x 6 MW on September 23, 2021, PLN and SDP agreed that the proposed price adjustment for components B and D was previously Rp.49.14/ kWh for component B becomes Rp.102/kWh, and the proposed component D which was previously Rp.18.43/kWh becomes Rp.18.43/kWh. The proposal in accordance with paragraph 1 of Clause II of the PPA will be reviewed and verified by BPKP, which will then be used as the basis for submitting an application for price adjustment to the Minister of Energy and Mineral Resources. And the amendments to the PPA related to the price adjustments for components B and D were carried out after the electricity purchase price was adjusted from the minister of ESDM.

Until reporting date, the tariff adjustment is still on process.

PT OEKA (Subsidiary)

In 2019 the Company entered into a peace agreement through a Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) with the Company's creditors (in PKPU), in accordance with the letter of the peace agreement between the Company and the Company's creditors (in PKPU) dated December 17, 2019, and the court decision of homologation (HOMOLOGATION) Number 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dated December 18, 2019. Against the decision there are creditors who make an appeal.

Based on the Company's Legal Correspondency Letter No. 133/EXT/OEKA/D00/I/2022 dated January 31, 2022, there are 2 legal cases being pursued by the Company, among others:

1. Civil Case No. 564/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Sel in the South Jakarta District Court, between PT Dharma Empat Lima Abadi, PT Menara Gading Putih, and PT Ogan Lematang with the

(Lanjutan/Continued)

dengan Perusahaan, terkait perkara Perdata, pengajuan banding terhadap putusan sela dari pengadilan yang menetapkan Perusahaan tetap melaksanakan putusan PKPU dan perjanjian perdamaian, perkara perdata tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 sudah submit dalam Kontra Memori Banding dan dipersidangkan pada tanggal 8 Februari 2022, dalam Laporan Persidangan perkara permohonan pembatalan perjanjian perdamaian (Homologasi) penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Nomor: 28/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt. Pst.jo. Nomor: 187/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT Ogan Lematang (Pemohon) melawan PT Odira Energy Karang Agung (Termohon) dengan hasil persidangan yaitu pemeriksaan alat bukti surat Perusahaan (Termohon) yang tertunda pada persidangan sebelumnya, persidangan ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 22 Februari 2022.

2. Perkara permohonan pembatalan perjanjian perdamaian (Homologasi) Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) No. 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst antara PT Ogan Lematang (Pemohon) dengan Perusahaan (Termohon), perkara permohonan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut sampai tanggal 31 Desember 2021 sudah masuk sampai dengan tahapan pengajuan Replik dari pemohon.

Sampai dengan tanggal pelaporan masih belum ada keputusan atas gugatan tersebut.

Berdasarkan pasal 2 Surat Perjanjian Perdamaian antara Perusahaan dengan para kreditor Perusahaan (dalam PKPU) tanggal 17 Desember 2019, dan Surat Putusan Pengesahan Perdamaian (HOMOLOGASI) No. 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2019. PT OEKA sepakat melakukan pembayaran kepada para kreditor dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kreditor dengan jumlah piutang sampai dengan Rp.100.000.000 akan dibayarkan paling lambat 6 bulan sejak homologasi dengan ketentuan Perusahaan memiliki masa tenggang selama 3 bulan sejak homologasi.
- Kreditor dengan jumlah piutang dari Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 akan dibayarkan paling lambat 12 bulan sejak homologasi dengan ketentuan Perusahaan memiliki masa tenggang selama 6 bulan sejak homologasi.
- Kreditor dengan jumlah piutang dari Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.1.000.000.000 akan dibayarkan paling lambat 24 bulan sejak homologasi dengan ketentuan Perusahaan memiliki masa tenggang selama 12 bulan sejak homologasi.

Company, related to civil cases, appeal against the interim order of the court that stipulates the Company shall continues to implement PKPU decision and peace agreements, the civil case until December 31, 2021 has been submitted in the from of Counter Memory of Appeal and there will be retrial on February 8, 2022, in the Trial Report on the application for the cancellation of the peace agreement (Homologation) delay of debt payment obligations (PKPU) Number: 28/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/ 2021/PN.Niaga.Jkt. Pst.jo. Nomor: 187/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst between PT Ogan Lematang (Applicant) and PT Odira Energy Karang Agung (Termohon) with the results of the trial, namely the examination of the Company's letter evidence (Respondent) pending at the previous trial, the trial was postponed and will be reopened on February 22, 2022.

2. Case of request for cancellation of peace agreement (Homologation) Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) No. 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst between PT Ogan Lematang (Applicant) and the Company (Respondent), the case of the application for the cancellation of the peace agreement until December 31, 2021 has entered up to the stage of rcounter plea submission from the applicant.

Until reporting date, there is not decision has yet been made on the lawsuit.

Based on article 2 of the Peace Agreement Letter between the Company and the Company's creditors (in PKPU) dated December 17, 2019, and court decision of homologation (HOMOLOGATION) No. 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dated December 18, 2019. PT OEKA agreed to make payments to creditors with the following conditions:

- Creditors with total receivables up to Rp.100,000,000 will be paid no later than 6 months from the homologation provided that the Company has a grace period of 3 months from the homologation.
- Creditors with total receivables of Rp.100,000,000 to Rp.500,000,000 will be paid no later than 12 months from the homologation provided that the Company has a grace period of 6 months from the homologation.
- Creditors with total receivables of Rp.500,000,000 to Rp.1,000,000,000 will be paid no later than 24 months from the homologation provided that the Company has a grace period of 12 months from the homologation.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- Kreditor dengan jumlah piutang dari Rp.1.000.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000.000 akan dibayarkan paling lambat 54 bulan sejak homologasi dengan ketentuan Perusahaan memiliki masa tenggang selama 36 bulan sejak homologasi, dengan opsi memberikan potongan piutang sebesar 25%.
 - Kreditor dengan jumlah piutang dari Rp.1.000.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000.000 akan dibayarkan paling lambat 54 bulan sejak homologasi dengan ketentuan Perusahaan memiliki masa tenggang selama 36 bulan sejak homologasi, dengan opsi tidak memberikan potongan piutang sebesar 25%, PT Multikarya Asia Pasifik Raya dan PT Prima Sentra Usaha.
 - Kreditor dengan jumlah piutang dari Rp.5.000.000.000 sampai dengan Rp.150.000.000.000 akan dibayarkan paling lambat 120 bulan sejak homologasi dengan ketentuan Perusahaan memiliki masa tenggang selama 84 bulan sejak homologasi, dengan opsi memberikan potongan piutang sebesar 25%.
- Creditors with total receivables of Rp.1,000,000,000 to Rp.5,000,000,000 will be paid no later than 54 months from the homologation provided that the Company has a grace period of 36 months from the homologation, with the option of providing a 25% discount on receivables.
 - Creditors with total receivables of Rp.1,000,000,000 to Rp.5,000,000,000 will be paid no later than 54 months from the homologation provided that the Company has a grace period of 36 months from the homologation, with the option of not giving a 25% discount on receivables, PT Multikarya Asia Pacific Raya and PT Prima Sentra Usaha.
 - Creditors with total receivables of Rp.5,000,000,000 to Rp.150,000,000,000 will be paid no later than 120 months from the homologation provided that the Company has a grace period of 84 months from the homologation, with the option of providing a 25% discount on receivables.

36. SEGMENT OPERASI

36. OPERATION SEGMENT

a. Segmen primer

a. Primary segment

Segmen primer Perusahaan dikelompokkan berdasarkan jenis usaha/produk yang dihasilkan. Informasi segmen berdasarkan jenis usaha/produk adalah sebagai berikut:

The Company's primary segments are classified based on business type/product produced, as follows:

31 Desember/December 31, 2021

Keterangan	Penghasil Listrik Independen/ Independent Power Producer	Minyak dan Gas Bumi/ Oil and Gas	Konsolidasi/ Consolidated	Descriptions
Aset				Assets
Aset segmen	196.425.115.039	1.121.498.183.403	1.317.923.298.442	Segment assets
Aset tidak dapat Dialokasikan	-	-	597.673.895.582	Non-allocation asset
Jumlah Aset	196.425.115.039	1.121.498.183.403	1.915.597.194.024	Total Assets
Liabilitas				Liabilities
Utang segmen	223.936.182.116	246.014.395.550	469.950.577.666	Segment liabilities
Utang segmen tidak dapat dialokasikan	-	-	1.164.088.522.015	Non-allocation Segment liabilities
Jumlah Liabilitas	223.936.182.116	246.014.395.550	1.634.039.099.681	Total Liabilities

PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

31 Desember/December 31, 2021

Keterangan	Penghasil Listrik Independen/ Independent Power Producer	Minyak dan Gas Bumi/ Oil and Gas	Konsolidasi/ Consolidated	Descriptions
Penjualan dan pendapatan usaha	-	138.699.027.599	138.699.027.599	Sales and revenues
Beban pokok penjualan dan beban langsung	(2.472.732.632)	(128.840.440.366)	(131.313.172.998)	Cost of sale and direct cost
Hasil Segmen	(2.472.732.632)	9.858.587.233	7.385.854.601	Segment Revenue
Beban usaha	(1.523.663.822)	(5.372.590.880)	(6.896.254.702)	Operating expenses
Beban usaha yang tidak dapat Dialokasikan	-	-	(14.137.079.243)	Unallocated operating expenses
Rugi Usaha	(3.996.396.454)	4.485.996.353	(13.647.479.344)	Operating Loss
Pendapatan (beban) lain-lain	(40.182.805.391)	93.734.915.589	53.552.110.198	Other income (expense)
Pendapatan (beban) lain-lain yang tidak dapat dialokasikan	-	-	(155.449.555.949)	Unallocated other income (expense)
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(44.179.201.845)	98.220.911.942	(115.544.925.095)	Loss Before Income Tax

31 Desember/December 31, 2020

Keterangan	Penghasil Listrik Independen/ Independent Power Producer	Minyak dan Gas Bumi/ Oil and Gas	Konsolidasi/ Consolidated	Descriptions
Aset				Assets
Aset segmen	221.590.515.402	1.124.235.480.925	1.345.825.996.327	Segment assets
Aset tidak dapat Dialokasikan	-	-	559.059.402.508	Non-allocation asset
Jumlah Aset	221.590.515.402	1.124.235.480.925	1.904.885.398.835	Total Assets
Liabilitas				Liabilities
Utang segmen	212.550.049.123	364.251.968.799	576.802.017.922	Segment liabilities
Utang segmentidak dapat dialokasikan	-	-	930.666.104.899	Non-allocation segment liabilities
Jumlah Liabilitas	212.550.049.123	364.251.968.799	1.507.468.122.821	Total Liabilities

31 Desember/December 31, 2020

Keterangan	Penghasil Listrik Independen/ Independent Power Producer	Minyak dan Gas Bumi/ Oil and Gas	Konsolidasi/ Consolidated	Descriptions
Penjualan dan pendapatan usaha	14.520.905.698	48.200.714.637	62.721.620.335	Sales and revenues
Beban pokok penjualan dan beban langsung	(28.742.793.314)	(60.491.116.502)	(89.233.909.816)	Cost of sale and direct cost
Hasil Segmen	(14.221.887.616)	(12.290.401.865)	(26.512.289.481)	Segment Revenue
Beban usaha	(4.343.654.516)	(3.674.162.902)	(8.017.817.418)	Operating expenses
Beban usaha yang tidak dapat Dialokasikan	-	-	(18.379.050.676)	Unallocated operating expenses
Rugi Usaha	(18.565.542.132)	(15.964.564.767)	(52.909.157.575)	Operating Loss
Pendapatan (beban) lain-lain	(19.852.247.078)	77.266.193.522	57.413.946.444	Other income (Expense)
Pendapatan (beban) lain-lain yang tidak dapat dialokasikan	-	-	(36.487.533.887)	Unallocated Other income (expense)
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(38.417.789.210)	61.301.628.755	(31.982.745.018)	Loss Before Income Tax

(Lanjutan/Continued)

b. Segmen sekunder

Segmen sekunder Perusahaan dikelompokkan berdasarkan daerah geografis dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021
Aset	
Sumatera	1.317.923.298.442
Jakarta	597.673.895.582
Jumlah	1.915.597.194.024
Liabilitas	
Sumatera	469.950.577.666
Jakarta	1.164.088.522.015
Jumlah	1.634.039.099.681
Pendapatan	
Sumatera	138.699.027.599
Jumlah	138.699.027.599

b. Secondary segment

The Company secondary segments are grouped on the basis of geographical locations:

	31 Desember/ December 31, 2020	
Assets		Assets
	1.345.825.996.327	Sumatera
	559.059.402.508	Jakarta
	1.904.885.398.835	Total
Liabilities		Liabilities
	576.802.017.922	Sumatera
	930.666.104.899	Jakarta
	1.507.468.122.821	Total
Revenue		Revenue
	62.721.620.335	Sumatera
	62.721.620.335	Total

37. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Instrumen keuangan utama Perusahaan terdiri dari setara kas, piutang usaha, pinjaman bank dan pinjaman pihak berelasi. Instrumen keuangan tersebut berasal dari kegiatan usaha Perusahaan atau untuk tujuan pembiayaan bagi kegiatan operasional Perusahaan.

Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko mata uang, risiko kredit dan risiko permodalan. Manajemen menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko keuangan sebagai berikut:

Risiko nilai tukar mata uang asing

Mata uang pelaporan Perusahaan adalah dalam Rupiah. Risiko mata uang asing adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan nilai tukar mata uang asing.

PT OEKA (Entitas anak) yang mempunyai kegiatan operasi, eksploitasi minyak dan gas bumi, mempunyai mata uang fungsional Dollar AS, sehingga tidak mempunyai dampak signifikan atas selisih kurs.

Selanjutnya Perusahaan tidak secara signifikan menggunakan mata uang asing, karena hampir semua transaksi aset dan liabilitas Perusahaan dalam mata uang Rupiah.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Company's principal financial instruments comprise of cash and cash equivalent, bank loan and loan from related party. These financial instruments mainly originated from the Company's operations or used to finance Company's operations.

The main risks arising from the Company's financial instruments are foreign currency risk, credit risk and capital risk. The management reviewed and approved policies for managing each of these financial risks, which are described in more detail as follows:

Foreign exchange risk

The Company's reporting currency is in Rupiah. Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because the changes in foreign exchange rates.

PT OEKA (a subsidiary), which has operations, exploitation of oil and gas, has a functional currency of the US Dollar, so that it does not have a significant impact on foreign exchange differences.

Furthermore, the Company does not significantly use foreign currencies, because almost all of its transactions assets and liabilities are denominated in Rupiah.

(Lanjutan/Continued)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo.

Manajemen berkeyakinan bahwa risiko Likuiditas yang mungkin dihadapi masih dapat diatasi oleh Perusahaan.

Perusahaan dan entitas anak melakukan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk dan kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo, selain itu Perusahaan juga mendapatkan komitmen dari pemegang saham berupa tambahan setoran modal.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Perusahaan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Perusahaan. Risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha yang diberikan kepada pelanggan atas dari sewa operasi.

Piutang usaha Perusahaan saat ini hanya kepada PT Pertamina (Persero), risiko yang muncul jika terjadi gagal bayar karena PT Pertamina (Persero) tidak mampu untuk membayar atau terjadi konflik antara Perusahaan dengan PT Pertamina (Persero).

Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit yang mungkin dihadapi Perusahaan relatif rendah, mengingat PT Pertamina (Persero) adalah salah satu badan usaha milik Negara yang berkredibilitas tinggi.

38. KELANGSUNGAN HIDUP DAN RENCANA MANAJEMEN

Perusahaan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami rugi bersih sebesar Rp.115.859.181.671 dengan akumulasi defisit sebesar Rp.362.734.069.564. selain itu penyebaran virus Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Efek masa depan dari virus Covid-19 terhadap Indonesia dan aktivitas bisnis Perusahaan masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah korban yang terinfeksi virus Covid-19 secara signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan aktivitas bisnis Perusahaan. Kejadian tersebut, mengidentifikasi terdapat ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan pada kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company is unable to meet its obligations when they fall due.

Management believes that the Liquidity risk that may be occur can still be overcome by the Company.

The Company and subsidiary evaluate and monitors cash-in flow and cash-out flow to ensure the availability of funds to settle the due obligation in addition, the Company also received a commitment from shareholders in the form of additional capital deposits.

Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss, when the Company's customers fail to fulfill their contractual obligations to the Company. Credit risk arises mainly from trade receivables that are given to customer as result of operating lease.

The Company's account receivables are currently only to PT Pertamina (Persero), the risk that arises if there is a default because PT Pertamina (Persero) is unable to pay or there is a conflict between the Company and PT Pertamina (Persero).

Management believes that the credit risk that may be occur is low, considering that PT PLN (Persero) is one of the state-owned enterprises that highly credible.

38. GOING CONCERN AND MANAGEMENT PLAN

The Company

The Company's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2021 suffered a net loss of Rp.115,859,181,671 with an accumulated deficit of Rp.362,734,069,564. In addition, the spread of the Covid-19 virus that occurred almost throughout the world, including Indonesia. The future effects of the Covid-19 virus on Indonesia and the Company's business activities cannot be determined at this time. A significant increase in the number of victims infected with the Covid-19 virus or a prolonged spread may affect Indonesia and the Company's business activities. The incident identified a material uncertainty that could cause significant doubts about the Company's ability to maintain business continuity.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, manajemen sudah melakukan langkah-langkah dan upaya menjaga kelangsungan usaha dan memitigasi resiko atas dampak COVID-19 terhadap kinerja Perusahaan sebagai berikut:

- Perusahaan melalui entitas anak PT OEKA memiliki program kerja peningkatan produksi minyak bumi menjadi 700 BOPD yang saat ini telah mencapai 450 BOPD dan juga melakukan eksplorasi sumur gas dengan potensi 500 BCF dengan kapasitas produksi 5 mmscfd, dimana hal tersebut dapat meningkatkan serap laba kepada Perusahaan.
- Perusahaan memiliki portofolio PLTA melalui entitas anak usaha PT Inpola Meka Energi yang pada tahun 2022 ini akan mendapatkan persetujuan peningkatan produksi listrik dari semula 10MW menjadi 15 MW, sehingga siap beroperasi maksimal, dimana hal tersebut dapat meningkatkan serap laba kepada Perusahaan.
- Perusahaan memiliki beban yang sangat besar terhadap bunga pinjaman pemegang saham kepada PT PP (Persero) Tbk, untuk mengatasi hal tersebut Perusahaan memiliki rencana dalam pelunasan utang kepada pemegang saham dengan cara divestasi beberapa entitas anak.
- Melakukan reviu dan evaluasi terhadap aktivitas operasi di masing-masing anak Perusahaan.
- Manajemen mulai berfokus dalam pengembangan *renewable* energi seperti solar panel skala kecil dan menengah.
- Perusahaan mulai menerapkan *strategic partnership* dalam rencana investasi dan aksi korporasi.
- Melakukan efisiensi pada biaya usaha Perusahaan.
- Menyusun pola kerja baru yang sebelumnya bekerja di kantor 100% menjadi sistem *shifting*.
- Menyiapkan infrastruktur yang baik untuk mendukung perubahan pola kerja serta melakukan monitoring pekerjaan karyawan untuk menjaga produktivitas kerja para karyawan.
- Tetap konsisten dalam melakukan penyetoran pajak dan melaporkan SPT Masa secara tertib sebelum tanggal jatuh tempo.

To anticipate these situations, the Company's management has prepared a plan and and efforts to mitigate the risk of the impact of COVID-19 on the Company's performance as follows:

- *The Company through its subsidiary PT OEKA has a work program to increase oil production to 700 BOPD which currently has reached 450 BOPD and also explores gas wells with a potential of 500 BCF with a production capacity of 5 mmscfd, which can increase profit absorption for the Company.*
- *The Company has a hydropower portfolio through its subsidiary PT Inpola Meka Energi which in 2022 will get approval to increase electricity production from the original 10MW to 15 MW, so that it is ready to operate optimally, which can increase profit absorption for the Company.*
- *The Company has a very large expenses on shareholder loan interest to PT PP (Persero) Tbk, to overcome this the Company has a plan to pay off debt to shareholders by divesting several subsidiaries.*
- *Review and evaluate the operating activities of each subsidiaries.*
- *Management has begun to focus on developing renewable energy such as small and medium scale solar panels.*
- *The Company began implementing a strategic partnership in investment plans and corporate actions.*
- *Make efficiency in the Company's business costs.*
- *Arrange a new work pattern that previously worked in an office 100% into a shifting system.*
- *Prepare good infrastructure to support changes in work patterns and monitor employee work to maintain employee productivity.*
- *Stay consistent in making tax deposits and reporting periodic tax returns in an orderly manner before the due date.*

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

PT SDP (Entitas Anak)

Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami rugi bersih sebesar Rp.44.179.201.845 dengan akumulasi defisit sebesar Rp.167.094.256.716. Hal ini diakibatkan karena harga jual batubara yang dibayarkan oleh PT PLN (Persero) lebih rendah dibandingkan dengan harga belinya dan Perusahaan memutuskan untuk memberhentikan sementara produksinya. Kejadian tersebut, mengidentifikasi terdapat ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan pada kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, manajemen sudah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Amandemen tarif komponen B, dari Rp. 49/kwh, naik menjadi Rp.102/kwh, saat ini masih di verifikasi BPKP Pusat Jakarta.
- Amandemen nilai Nett Plant Heat Rate (NPHR), yang saat ini di angka 4.400 Kcal/Kwh, menjadi 4.900 Kcal/Kwh, masih proses negosiasi dengan PLN, dimana pada tahun 2021 Perusahaan dan PLN sepakat untuk Pihak LAPI ITB untuk melakukan reviu penetapan NPHR IPP PLTU Lampung tengah, dan hasil rekomendasi dari LAPI ITB terkait NPHR pada PLTU Lampung Tengah tersebut akan diterima oleh para pihak dengan ketentuan kesepakatan tersebut dan tunduk pada persetujuan perusahaan masing - masing pihak.
- Perusahaan sedang mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa (PLTBm). Dalam hal ini Perusahaan telah melakukan surat menyurat untuk mengajukan perubahan PLTU 2x7 MW menjadi PLTBm 2x5 MW atas perubahan tersebut membutuhkan tambahan investasi yang diperkirakan sebesar Rp.30.000.000.000. Untuk kebutuhan Investasi tersebut PPE menggandeng Investor Lokal yang berminat atas rencana pengembangan PLTBm. Sampai saat ini masih melakukan kajian bisnis untuk melengkapi kajian tersebut.
- Mengajukan permohonan kepada Bank Bukopin untuk memperpanjang keringanan ke-3 kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp.100.000.000 per bulan, yang berlaku dari bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022, masih proses negosiasi dengan Bank Bukopin.
- Perusahaan juga akan melakukan reviu ulang kelayakan bisnis setelah ada keputusan terkait kenaikan komponen BD dan pengakuan NPHR.

PT SDP (Subsidiary)

The Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2021 suffered a net loss of Rp.44,179,201,845 with an accumulated deficit of Rp.167,094,256,716. This was due to the selling price of coal paid by PT PLN (Persero) which was lower than at the purchase price and the Company decided to suspend production. The incident identified a material uncertainty that could cause significant doubts about the Company's ability to maintain business continuity.

To anticipate these situations, the Company's management has prepared a plan and perform actions as follow:

- *Amendment to component B rates, from Rp.49/kwh, up to Rp.102/kwh, currently still being verified by the Central Jakarta BPKP.*
- *Amendments to the Nett Plant Heat Rate (NPHR), which is currently at 4,400 Kcal/Kwh, to 4,900 Kcal/Kwh, is still being negotiated with PT PLN (Persero). where in 2021 the Company and PLN agreed for LAPI ITB to review the determination of the IPP NPHR The Central Lampung PLTU, and the recommendation from LAPI ITB regarding the NPHR at the Central Lampung PLTU, will be accepted by the parties with the terms of the agreement and subject to the corporate approval of each party.*
- *The Company is developing a Biomass Power Plant (PLTBm). In this case, the Company has written a letter to propose a change of PLTU 2x7 MW to PLTBm 2x5 MW for the change requires an additional investment which estimated at Rp.30,000,000,000. For these investment needs, PPE cooperates with local investors who are interested in the PLTBm development plan. Until now, they are still conducting business studies to complete the study.*
- *Submit a request to Bank Bukopin to extend the 3rd relief of principal and interest obligations of Rp.100,000,000 per month, valid from April 2022 to December 2022, still in the process of negotiating with Bank Bukopin.*
- *The Company will also conduct a business feasibility review after a decision is made regarding the increase in the BD component and NPHR recognition.*

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

**39. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS
INVESTASI DAN PENDANAAN NON KAS**

- a. Pada tahun 2021 dan 2020, Perusahaan melakukan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Potongan utang atas PT MDP	88.167.985.402	-
Beban bunga pinjaman kepada PT PP (Persero) Tbk	106.626.252.134	-
Setoran modal	20.160.000.000	-
Accrual beban bunga bank bukopin	14.107.348.103	-
Pendapatan bunga PT IME	3.304.466.667	-
Penerimaan utang bank	36.720.530.624	-
Akumulasi penyusutan aset hak guna	138.632.789	2.743.780.624
Pengurang goodwill	-	(4.191.614.700)
Perolehan aset hak guna	-	2.882.413.413
Potongan utang atas putusan PKPU	-	58.880.695.259
Jumlah	<u>269.225.215.719</u>	<u>60.315.274.596</u>

- b. Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

	2021			
	1 Januari/ January 1, 2021	Arus kas/ Cash flow	Lainnya/ Others	
Utang bank	92.944.406.837	(36.851.696.978)	36.720.530.624	92.944.406.837
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	<u>92.944.406.837</u>	<u>(36.851.696.978)</u>	<u>36.720.530.624</u>	<u>92.944.406.837</u>

Debt deduction for the PT MDP
Loan interest expense to PT PP (Persero) Tbk
Paid-Up Capital
Accrued interest expense bank loan
Interest Income PT IME
Receipt of bank loans
Accumulated depreciation of use rights assets
Deduction of goodwill
Acquisition of use rights assets
Debt deduction for the PKPU decision
Total

- b. The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the year ended December 31, 2021.

Bank loan
Total liabilities from financial activities

40. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2020 direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan tahun 2021 sebagai berikut:

40. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain account in the 2020 consolidated financial statements were reclassified to confirm with the 2021 consolidated financial statements presentation as follows:

	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah reklasifikasi/ After reclassification	
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang usaha				Account payables
Lancar	118.161.545.179	(60.130.385.525)	58.031.159.654	Current
Tidak lancar	-	60.130.385.525	60.130.385.525	Non-Current
Utang lain – lain - pihak ketiga				Other payables – third party
Lancar	46.669.289.038	(46.669.289.038)	-	Current
Tidak lancar	75.629.458.267	46.669.289.038	122.298.747.305	Non-Current

(Lanjutan/Continued)

41. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi keuangan PT PP Energi (induk Perusahaan saja) menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya.

42. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2022.

41. SUPPLEMENTARY INFORMATION

Financial information of PT PP Energi (parent Company only) presents the Company's investments in subsidiary under the cost method.

42. RESPONSIBILITY OF MANAGEMENT AND APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statement and supplementary information were the responsibility of the management, and were approved by the Company's Director and authorized for issuance on February 18, 2022.

PT PP ENERGI (ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI (PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
A S E T			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	191.551.910	710.608.811	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit masing - masing sebesar Rp.13.489.541.770 dan Rp.13.429.011.536 pada 31 Desember 2021 dan 2020	72.365.209.627	162.623.090.908	<i>Other account receivables - net of allowance for credit losses of Rp.13,489,541,770 and Rp.13,429,011,536 at December 31, 2021 and 2020, respectively</i>
Biaya dibayar dimuka	-	980.134.572	<i>Prepaid expenses</i>
Pajak dibayar dimuka	2.334.168.490	2.172.347.902	<i>Prepaid taxes</i>
Jumlah Aset Lancar	74.890.930.027	166.486.182.193	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain - pihak berelasi - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit masing - masing sebesar Rp.213.929.380.732 dan Rp.139.029.499.619 pada 31 Desember 2021 dan 2020	684.646.808.724	642.817.251.271	<i>Other account receivables - net of allowance for credit losses of Rp.213.929.380.732 and Rp.139,029,499,619 at December 31, 2021 and 2020, respectively</i>
Investasi pada entitas asosiasi	432.380.148.321	436.119.880.833	<i>Investments in associates company</i>
Investasi jangka panjang lainnya	11.284.935.000	11.284.935.000	<i>Other long-term investment</i>
Aset hak guna	-	138.632.789	<i>Rights-of-use assets</i>
Aset tetap	-	10.033.323	<i>Fixed asset</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.128.311.892.045	1.090.370.733.216	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET	1.203.202.822.072	1.256.856.915.409	TOTAL ASSETS

PT PP ENERGI (ENTITAS INDUK)
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI (PARENT ENTITY)
 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
 DECEMBER 31, 2021 AND 2020
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS LANCAR			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha			Account payables
Pihak berelasi	154.000.000	66.000.000	Third party
Pihak ketiga	1.124.905.704	602.745.781	Related parties
Beban yang masih harus dibayar	3.626.575.234	2.781.966.350	Accrued expenses
Utang pajak	32.786.277	24.780.953	Taxes payables
Liabilitas sewa	-	317.665.734	Lease liabilities
Jumlah Liabilitas Lancar	4.938.267.215	3.793.158.818	Total Current Liabilities
LIABILITAS TIDAK LANCAR			NON-CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain pihak berelasi	1.168.182.020.252	1.025.309.809.151	Others liabilities - related parties
Liabilitas program imbalan pasca kerja	1.525.400.453	2.341.904.333	Employment benefit liabilities
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	1.169.707.420.705	1.027.651.713.484	Total Non Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	1.174.645.687.920	1.031.444.872.302	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham - nilai nominal			Capital stock - par value
Rp.1.000.000 per saham			Rp.1,000,000 per share
Modal dasar - 700.000 saham			Authorized capital - 700,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor -			Subscribed and paid - up capital -
541.233 and 521.073 saham pada			541,233 and 521,073 shares as of
31 Desember 2021 dan 2020	541.233.000.000	521.073.000.000	December 31, 2021 and 2020
Tambahan modal disetor - bersih			Additional paid in capital - net
Uang muka setoran modal	-	20.160.000.000	Advance for future shares subscription
Penghasilan komprehensif lain	(876.880.311)	(619.702.221)	Other comprehensive income
Defisit	(511.798.985.537)	(315.201.254.672)	Deficit
JUMLAH EKUITAS	28.557.134.152	225.412.043.107	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.203.202.822.072	1.256.856.915.409	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT PP ENERGI (ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA ATAU RUGI
DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI (PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA	-	-	SALES AND REVENUES
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN			COST OF SALES AND
BEBAN LANGSUNG	-	-	DIRECT COST
Laba Kotor	-	-	Gross Profit
Beban administrasi dan umum	(14.137.079.243)	(18.379.050.676)	<i>Administration and general expenses</i>
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(182.460.651.622)	(62.656.540.423)	<i>Other income (charge) - net</i>
	<u>(196.597.730.865)</u>	<u>(81.035.591.099)</u>	
RUGI SEBELUM PAJAK	(196.597.730.865)	(81.035.591.099)	LOSS BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	-	-	INCOME TAX EXPENSE - NET
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	<u>(196.597.730.865)</u>	<u>(81.035.591.099)</u>	LOSS FOR THE YEAR
Rugi Komprehensif Lain	(257.178.090)	(392.397.055)	<i>Other Comprehensive Loss</i>
RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>(196.854.908.955)</u>	<u>(81.427.988.154)</u>	COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR

PT PP ENERGI (ENTITAS INDUK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI (PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor/ Subscribed and paid up capital	Uang muka setoran modal/ Advance for stock subscription	Pendapatan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Defisit/ Deficit	Jumlah ekuitas/ Total equity	
Saldo per 1 Januari 2020	493.037.000.000	28.036.000.000	(227.305.166)	(234.165.663.573)	286.680.031.261	Balance as of January 1, 2020
Setoran modal	28.036.000.000	(28.036.000.000)	-	-	-	<i>Paid-up capital</i>
Uang muka setoran modal	-	20.160.000.000	-	-	20.160.000.000	<i>An advance payment of capital</i>
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	(392.397.055)	(81.035.591.099)	(81.427.988.154)	<i>Comprehensive loss of the year</i>
Saldo per 31 Desember 2020	521.073.000.000	20.160.000.000	(619.702.221)	(315.201.254.672)	225.412.043.107	Balance as of December 31, 2020
Setoran modal	20.160.000.000	(20.160.000.000)	-	-	-	<i>Paid-up capital</i>
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	(257.178.090)	(196.597.730.865)	(196.854.908.955)	<i>Comprehensive loss of the year</i>
Saldo per 31 Desember 2021	541.233.000.000	-	(876.880.311)	(511.798.985.537)	28.557.134.152	Balance as of December 31, 2021

PT PP ENERGI (ENTITAS INDUK)
 LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI (PARENT ENTITY)
 STATEMENTS OF CASH FLOWS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2021 AND 2020
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan (penambahan) kas dari pelanggan	8.855.085.316	20.916.208.696	<i>Receipt from customers</i>
Pembayaran kas kepada:			<i>Cash disbursement to:</i>
Pemasok dan pihak ketiga lainnya	(5.670.298.859)	(8.425.621.842)	<i>Supplier and other third parties</i>
Direksi dan karyawan	(8.445.647.771)	(11.213.670.890)	<i>Board of directors and employees</i>
Kas dihasilkan dari operasi	(5.260.861.314)	1.276.915.964	<i>Cash generated from operations</i>
Pembayaran pajak	(1.141.091.130)	(2.451.720.381)	<i>Payment of taxation</i>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(6.401.952.444)	(1.174.804.417)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan bunga	1.686.802.015	58.054.510	<i>Interest received</i>
Penerimaan piutang	2.080.000.000	6.150.000.000	<i>Receipt of receivables</i>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	3.766.802.015	6.208.054.510	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan uang muka setoran modal	-	20.160.000.000	<i>Received an advance payment of capital</i>
Penerimaan utang non-bank jangka panjang	51.738.109.578	15.781.000.000	<i>Received non bank loan - long-term</i>
Pembayaran pinjaman lain-lain	(49.621.008.983)	(42.588.810.629)	<i>Payment other loan</i>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	2.117.100.595	(6.647.810.629)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
PENURUNAN BERSIH - KAS DAN SETARA KAS	(518.049.834)	(1.614.560.536)	NET DECREASE - CASH AND CASH EQUIVALENTS
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	(1.007.067)	(13.318.658)	EFFECT OF CHANGES FOREIGN CURRENCY
KAS DAN SETARA KAS - AWAL TAHUN	710.608.811	2.338.488.005	CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS - AKHIR TAHUN	191.551.910	710.608.811	CASH AND CASH EQUIVALENTS - END OF YEAR

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN ENERGI DAN
ENTITAS ANAK
INFORMASI TAMBAHAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Tidak Diaudit)**

ESTIMASI CADANGAN

Informasi berikut mengenai kuantitas cadangan yang *proved developed, undeveloped* dan *probable reserve quantities* serta sumber daya kontinjen hanya merupakan estimasi, dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan nilai yang dapat direalisasikan atau nilai pasar yang wajar dari cadangan PT OEKA (entitas anak). PT OEKA menekankan bahwa estimasi cadangan secara bawaan tidak akurat. Sehubungan dengan hal tersebut, estimasi ini diharapkan dapat saja berubah bila tersedia informasi baru dikemudian hari. Terdapat berbagai ketidakpastian bawaan dalam mengestimasi cadangan minyak dan gas bumi, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali PT OEKA.

Informasi berikut atas kuantitas cadangan dan sumber daya diestimasi oleh tenaga ahli PT OEKA ataupun berdasarkan estimasi oleh masing-masing operator blok. Prinsip teknik perminyakan dan definisi yang berlaku di industri atas kategori dan sub-klasifikasi cadangan *proved* dan *probable* serta sumber daya kontinjen dipergunakan dalam penyusunan pengungkapan cadangan dan sumber daya.

Manajemen berpendapat bahwa kuantitas cadangan di bawah ini merupakan estimasi yang wajar berdasarkan data geologi dan teknik yang tersedia.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN ENERGI AND
SUBSIDIARIES
SUPPLEMENTARY INFORMATION
As of December 31, 2021
(Unaudited)**

RESERVES ESTIMATION

The following information on proved developed, undeveloped and probable reserve quantities as well as contingent resources are estimates only, and do not purport to reflect realizable values or fair market values of the PT OEKA (subsidiary) reserves. PT OEKA emphasizes that reserve estimates are inherently imprecise. Accordingly, these estimates are expected to change as future information becomes available. There are numerous uncertainties inherent in estimating oil and natural gas reserves including many factors beyond the control of the PT OEKA.

The following information on the PT OEKA's reserves and resources quantities are estimated by the PT OEKA's expert based on estimates by the operators of the respective blocks. Generally accepted petroleum engineering principles and definitions applied by the industry to proved and probable reserve categories and subclassifications as well as contingent resources were utilized in preparing the reserves and resources disclosures.

Management believes that the reserve quantities shown below are reasonable estimates based on available geological and engineering data.

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN ENERGI DAN
ENTITAS ANAK
INFORMASI TAMBAHAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Tidak Diaudit)**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN ENERGI AND
SUBSIDIARIES
SUPPLEMENTARY INFORMATION
As of December 31, 2021
(Unaudited)**

	Aset di Indonesia/ Indonesian Assets		Jumlah/ Total
	Minyak/ Oil Mbbbls	Gas mmscf	Minyak dan Gas/ Oil and Gas mboe
PT OEKA Cadangan Proven/ PT OEKA Proven Reserves			
Saldo Awal 31 Desember 2019/ Beginning Balance, December 31, 2019	5,104.12	6,524.37	6,340.27
Penemuan dan pengembangan/ Discoveries and extensions	-	-	-
Revisi/ Revisions	(74.35)	-	(74.35)
Akuisisi dan divestasi/ Acquisitions and divestments	-	-	-
Produksi/ Production	(236.78)	-	(236.78)
Saldo Akhir 31 Desember 2021/ Ending Balance, December 31, 2021	4,792.99	6,524.37	6,029.14
PT OEKA Probable and Prospect/ PT OEKA Probable and Prospect			
Saldo Awal 31 Desember 2019/ Beginning Balance, December 31, 2019	12,127.84	12,600	14,396.16
Revisi/ Revisions	(74.35)	-	(74.35)
Akuisisi dan divestasi/ Acquisitions and divestments	-	-	-
Produksi/ Production	(236.78)	-	(236.78)
Saldo akhir 31 Desember 2021/ Ending Balance, December 31, 2021	11,816.71	12,600	14,085.03